

ELITE LOKAL PALEMBANG
ABAD XIX-ABAD XX:
KAJIAN TERHADAP PERAN 'HAJI MUKIM'
DALAM MENGEMBANGKAN ISLAM

DR. Endang Rochmiatun. M. Hum

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ELITE LOKAL PALEMBANG ABAD XIX-ABAD XX:

KAJIAN TERHADAP PERAN 'HAJI MUKIM' DALAM MENGEMBANGKAN ISLAM

Penulis : DR. Endang Rochmiatun, M.Hum

Layout : Haryono

Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang

Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV.Amanah

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Februari 2018

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-5685-11-8

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam-Nya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada seluruh keluarga serta semua sahabat-sahabatnya.

Hanya karena hidayah, rahmah dan inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **Elit Lokal Palembang Abad XIX-XX: Kajian Terhadap Peran "Haji Mukim" Dalam Mengembangkan Islam**, mudah-mudahan akan dapat bermanfaat nantinya bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dalam menambah wawasan akademik tentang sejarah di Palembang

Penulisan ini merupakan hasil penelitian dengan sumber dana dari DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan dan menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. LP2M melalui Pusat Penelitian UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi salah satu peneliti.
2. Serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhirnya untuk mereka semua penulis sertakan do'a semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga Allah berkenan untuk mengabulkannya, amin ya rabbal alamin.

Palembang, Oktober 2017

Penulis

DR. Endang Rochmiatun, M. Hum

ABSTRAK

Sebagaimana diketahui, Pareto membagi elit yang berkuasa menjadi dua: elite yang sedang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak sedang memerintah (*non governing elite*). *Governing elite* terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politis sehingga bisa secara langsung mempengaruhi pada pembuatan kebijakan. Sedangkan *non governing elite* adalah mereka yang memiliki kedudukan tinggi atau memiliki kapasitas lebih dalam hal tertentu dalam setrata sosial, akan tetapi tidak menduduki jabatan-jabatan politis (pemerintahan) yang secara langsung dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan sebagaimana *governing elite*. Pada tahun 1930-an mereka (Haji Mukim) ini adalah bagian komunitas Indonesia terbesar kedua di Mekkah (setelah orang Sunda/Jawa Barat). Setelah mereka kembali ke Palembang, pembelajaran yang mereka terima dari Timur Tengah memungkinkan mereka mendirikan jaringan pendidikan yang tidak tergantung dengan pemerintah Kolonial Belanda, yakni dengan mendirikan sekolah sendiri. Dengan demikian mereka berada di luar *spectrum system* Kolonial. Mereka inilah salah satu yang dapat dimasukkan dalam kategori “Elite Lokal Modern” Palembang. Realitas di atas menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena fakta yang ada menunjukkan bahwa “Haji Mukim” ini memunyai peran sentral dalam mengembangkan Islam di Palembang.

Pertanyaan yang mendasar dalam membicarakan tentang elit local modern ini, diantaranya adalah: apa latar belakang munculnya elit local modern ?, Bagaimana proses kemunculan elit local modern di Palembang ?, serta bagaimana bentuk peran mereka ?.

Metode dalam penelitian ini yakni metode sejarah, sebagaimana biasanya dalam penelitian sejarah, tahapan yang

akan dilakukan yakni : *heuristic, kritik, interpretasi* dan *historiografi*. Dalam penelitian ini sumbangan pemikiran Pareto maupun Mosca tentang elite akan bermanfaat bagi kajian terhadap Elite lokal Palembang abad XIX-XX, yang mana akan memfokuskan kajian terhadap peran “Haji Mukim” dalam mengembangkan Islam di Palembang. Oleh karena kedua tokoh tersebut di atas telah mencoba mengemukakan ide-idenya mengenai sifat dan peranan elit dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan multimensional. Sebagaimana diketahui, peranan dan teori-teori dan konsep-konsep ilmu sosial sangat penting dalam penelitian sejarah. Untuk lebih memahami studi tentang elite lokal Palembang pada abad XIX-XX yang memfokuskan kajian terhadap peran “Haji Mukim” dalam mengembangkan Islam di Palembang secara mendalam, maka selain menggunakan pendekatan histories juga akan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti Sosiologi, Antropologi dan ekonomi.

Dapat di simpulkan bahwa “*Elit Lokal Modern*” merupakan golongan pribumi di Palembang yang pada dasarnya adalah orang-orang yang menerima perubahan kebudayaan serta pemikiran dari Barat. Perubahan budaya tradisional ke arah budaya modern ini merupakan pengaruh atau konsekwensi dari *invention* dan akulturasi yang dilakukan orang Eropa dengan orang Pribumi. Salah satu tonggak perubahan budaya pribumi Indonesia adalah dikeluarkannya kebijakan politik etis khususnya bidang pendidikan. Sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan pada rakyat pribumi telah membuka wawasan dan peluang pikiran elit tradisional terpengaruh pemikiran Barat. Pemikiran Barat disini adalah berupa ide-ide kebebasan, memperoleh hak hidup, nasionalisme dan persatuan daerah Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Rousseau yang menjunjung tinggi kebebasan dalam menentukan sesuatu. Selain itu semangat rasionalitas

orang Eropa dalam belajar dan berpikir telah mempengaruhi pemikiran para elit modern Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang merdeka.

Pada awal abad XX gerakan reformasi dan modernisasi juga melanda kehidupan keagamaan umat Islam di wilayah Palembang. Pengaruh gagasan pembaharuan tersebut diantaranya dibawa oleh beberapa ulama alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Adapun ulama-ulama yang berfaham Islam modernis-reformis di Palembang tersebut diantaranya adalah tiga ulama yang merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yakni; Abdul Somad bin Abdul Muin, dan Hasan Basri bin Muhammad Amin (Mereka ini berasal dari Muara Enim) serta Akhmad Azhari bin H. Abdul Hamid (Ia berasal dari daerah 4 Ulu Kota Palembang). Ketiga ulama ini juga merupakan contoh yang menggambarkan adanya pengaruh yang membawa gagasan pembaharuan dalam Islam. Ketika mereka pulang pada awal April 1937 mereka disambut secara baik oleh masyarakat dimana mereka berasal.

Ulama Palembang lainnya yang mendapat pengaruh gagasan pembaharuan lebih dahulu adalah H. Husein Ma'ruf yang berasal dari Desa Campang Tiga, Ogan Komering Ulu (OKU). Husein Ma'ruf dilahirkan di Desa Campang Tiga pada tahun 1860M. Ia merupakan anak dari H. Khatib Ma'ruf keturunan dari Tuan Syaikh Abdurrahman, ibunya bernama Salamah. Ia belajar dengan ayahnya dan juga dengan H. Syamsudin (alumni Al-Azhar Kairo) selama 4 tahun. Tahun 1890 M ia pergi ke Mekkah maupun ke Kairo dan juga belajar disana sampai kepulangannya pada tahun 1899 M. Ia mengajarkan Islam di daerah Campang Tiga terutama masalah menjauhkan diri dari sifat khurafat, syirik, tahayul dan sebagainya. Pada tahun 1913 ia kemudian mendirikan mushola/langgar yang digunakannya sebagai tempat pendidikan non-formal.

Adapun Hasan Basri Muhammad Amin yang berasal dari Muara Enim ini adalah sebagai salah satu contoh ulama guru yang membawa gagasan pembaharuan dalam Islam. Sebagaimana diketahui, sekembalinya dari studi di Perguruan Islam Al-Azhar Kairo Mesir, ia segera didaulat untuk memberikan pidato di depan masyarakat Muara Enim oleh sebuah panitia yang sengaja dibentuk untuk acara penyambutan. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 11 April 1937 dan dihadiri oleh sebagian besar masyarakat Muara Enim. Sebelum berpidato, oleh panitia disebutkan bahwa Hasan Basri merupakan seorang anak yang berasal dari Tungkal yang sebelumnya juga pernah belajar di Sekolah Perhimpunan Kaoem Moeslimin (PKM) di Muara Enim. Adapun yang menjadi salah satu poin penting dalam pidato Hasan Basri tersebut adalah seruannya kepada umat Islam di Muara Enim untuk kembali kepada apa yang disebutnya "Islam Sejati" yakni Islam yang berazaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits agar mendapatkan kemenangan dan keselamatan dunia akhirat.

Ulama lainnya yang membawa faham reformis yakni H. Husin Alim bin Umar. Sekembalinya dari Mekkah ia kemudian menetap di Kampung 5 ulu Palembang. Di sana ia kemudian mendirikan Sekolah Samsuel Huda. Sejak tahun 1927 dirumahnya Kampun 5 Ulu dijadikannya ruangan belajar yang menampung anak anak yang berasal dari Kampun 3,4, dan 5 Ulu Palembang, selain itu juga diselenggarakan kursus bagi orang dewasa untuk menjadi calon da'i.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Perumusan Permasalahan dan Cakupan Penelitian..	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Dan Sumber Penelitian	19
F. Kerangka Teori Dan Pendekatan.....	21
G. Sistematika pembahasan.....	26
BAB II GAMBARAN UMUM PALEMBANG PADA ABAD XIX-XX.....	29
A. Situasi dan Kondisi Palembang Sebelum Dan Sesudah Sultan Mahmud Badaruddin II Diasingkan ke Ternate (1821)	29
1. Keadaan Geografis.....	29
2. Keadaan Administratif.....	34
3. Keadaan Ekonomi.....	37
4. Keadaan Sosial Masyarakat.....	42
5. Keadaan Budaya dan Sastra	58
6. Keagamaan (Islam)	61
7. Warisan Intelektual Keagamaan pada Abad XVIII	85
8. Warisan Intelektual Keagamaan pada Akhir abad XIX-Awal Abad XX (Masa SMB II)	89

BAB III ELIT LOKAL TRADISIONAL DI PALEMBANG DALAM MANUSKRIP.....	93
A. Beberapa Zuriat Kesultanan Palembang (<i>Governing Elite</i>)	95
B. Analisis Isi Teks dan Konteks	99
C. Bagan Kekeabatan Elit Lokal Tradisional Palembang berdasar Manuskrip-Manuskrip.....	107
BAB IV ELIT LOKAL MODERN DI PALEMBANG.....	123
A. Sekilas Tentang Politik Etis	124
B. Perubahan Elit Tradisional ke Elit Modern.....	125
C. Para Haji Mukim (Ulama) Sebagai Elit Lokal Modern di Palembang.....	131
1. K.H Akhmad Azhari: Dari Madrasah Al- Islamiyah Hingga PSII (1901-1969)	134
2. Haji Malian (1862-1928) ; Dari Pasirah Hingga Madrasah Islamiyah.....	136
D. Elit Lokal Modern Dalam Organisasi Sarekat Islam..	142
E. Elit Lokal Modern Dalam Organisasi Muhammadiyah : Dari Sekolah Hingga Madrasah...	153
F. Elit Lokal Modern Dalam Organisasi Al-Irsyad	169
BAB 5 PENUTUP.....	173
DAFTAR PUSTAKA	177

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. Bagan Silsilah Raja-Raja Palembang	108
2. Naskah Silsilah Elit Lokal Tradisional Palembang	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad XVIII M Kesultanan Palembang merupakan pusat kajian Islam di Nusantara dan merupakan kontinuitas dari perkembangan Islam di Aceh yang mengalami kemunduran pada abad XVII M. Pada abad XVIII M tersebut para ulama dan cendekiawan mendapat dorongan serta perhatian yang besar dari pihak Kesultanan, sehingga muncul ulama-ulama penulis yang karya-karyanya masih tetap dapat dibaca dan diajarkan di masyarakat hingga sekarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kesultanan Palembang pada masa tersebut menjadi pusat koleksi besar karya-karya keagamaan para ulama setempat.

Sebagai salah satu Kesultanan Muslim di Nusantara, Palembang tidak sekedar pusat politik, sosial, dan ekonomi. Lebih dari itu Palembang adalah juga pusat keagamaan dan keilmuan yang memainkan peran penting dalam menyebarkan sekaligus mengembangkan gagasan-gagasan keislaman ke wilayah Nusantara lainnya dan peranan ini telah berlangsung lama. Terdapat banyak informasi bahwa sejak abad XVIII dan lebih berkembang lagi abad XIX, Palembang merupakan pusat intelektual Islam atau pusat kegiatan keilmuan Islam. Bahkan Winstedt¹ membuat kesimpulan juga bahwa abad XVIII Kesultanan Palembang merupakan pusat kajian Islam di Nusantara yang mana merupakan kontinuitas dari perkembangan intelektual Islam di Aceh yang mengalami kemunduran sejak akhir abad XVII. Selain itu Quzwain juga memperkuat pendapat ini, menurutnya Islam di Kesultanan

¹ Winsteds, *A History of Classical Malay literature* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm 84-85.

Palembang pada abad XVIII telah mencapai kemajuan yang sangat berarti. Pada abad tersebut para ulama dan cendekiawan mendapat dorongan dan perhatian yang besar dari pihak kesultanan. Dampak dari hal tersebut adalah munculnya ulama dan para penulis yang karya-karyanya masih dapat dibaca sampai sekarang.

Di samping itu, geliat intelektual ini berjalan juga seiring dengan kemajuan di bidang perdagangan yang menempatkan Palembang sebagai salah satu pelabuhan dagang yang menjadi focus bisnis para pedagang domestic maupun mancanegara. Faktor di atas selain mengundang para pelaku bisnis, juga menarik minat bagi orang yang ingin menimba dan mendalami wawasan keislaman sebagai bekal untuk terjun berdakwah di masyarakat ataupun sebagai persiapan sebelum meneruskan studi ke wilayah Timur Tengah.

Jejak kecermelangan intelektual Islam di daerah ini dapat ditelusuri dari figure-figur penguasa maupun Ulama-ulama. Mengenai kehidupan dan pemikiran ulama Palembang hingga awal abad XVIII M belum banyak catatan yang dapat memberikan informasi. Menurut Amin, pada masa Sultan Mansur Jayo Ing Lago (1706-1714 M), Sultan Agung Qomariddin Sri Truno (1714-1724 M), dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758 M) memerintah Kesultanan Palembang, hidup seorang ulama terkenal yang bernama Faqih Jalaluddin yang mengajarkan ilmu al-Qur'an dan Ushuluddin. Ia menjalankan dakwah Islam di Palembang sampai ia wafat pada tahun 1748 M.² Dari Faqih Jalaluddin ini tidak diketahui dengan jelas apakah ia meninggalkan karya sehingga corak pemikirannya belum dapat diketahui. Beberapa

² H.M. Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang dan Beberapa Aspek Hukumnya" dalam K.H.O Gadjah Nata dan Sri-Edi Swasono (eds), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.114-115).

ulama lainnya yang muncul antara lain Shihabuddin bin Abdullah Muhammad, ia menjadi salah seorang penasehat Sultan Ahmad Najamuddin dalam bidang keagamaan. Ulama terkenal lainnya yakni Kemas Fakhruddin yang dianggap sebagai penerjemah utama teks-teks Arab di Kesultanan Palembang pada masa itu.

Adapun pada paruh kedua abad XVII dan XVIII M di Palembang terdapat tiga ulama besar yang turut berperan dalam penyebaran Islam di Palembang. Ketiga ulama tersebut adalah : Abdus-Shamad al-Palimbani, Muhammad Muhyiddin bin Shihabuddin, dan Kemas Muhammad bin Ahmad. Tentang kehidupan dua ulama terakhir tersebut di atas tidak banyak diketahui, kecuali keterkaitannya dengan Tarekat Sammaniyah. Keduanya menulis biografi dan kekeramatan pendiri Tarekat Sammaniyah yakni Syaikh Muhammad Samman. Adapun Abdus-Shamad merupakan salah satu murid terkenal Syaikh Muhammad Saman yang berperan besar dalam penyebaran Tarekat Sammaniyah di Nusantara, terutama melalui karya-karyanya yang jumlahnya kurang lebih 8 karya.

Abdus-Shamad merupakan salah seorang tokoh sufi yang berhasil mengkombinasikan ajaran-ajaran tasawuf Al-Ghazali dan Ibnu 'Arabi yang sebelumnya dipandang sebagai dua corak tasawuf yang bertentangan.³ Kehadiran Abdus-Shamad telah membawa corak baru dalam perkembangan Islam di Palembang terutama pada abad XVIII M. Jika sebelumnya ulama dan Sultan cenderung bersikap keras terhadap tarekat, namun sejak masa Abdus-Shamad Sultan Palembang mendukung penyebaran tarekat. Hal tersebut berdampak terhadap keberadaan Tarekat Sammaniyah yang selanjutnya diamalkan oleh para ulama dan Sultan serta masyarakat umum.

³ H.M.Quzwain, *"Syaikh Abdus-Shamad Al-Palimbani : Suatu Studi Mengenai Perkembangan Islam di Palembang abad XVIII M"*, dalam K.H.O Gadjahnata, *Ibid.*, hlm. 142.

Syekh Abdus Samad Al-Palimbani adalah seorang ulama yang memiliki reputasi intelektual internasional dengan puluhan karya-karya terkenalnya.⁴ Berkembangnya bidang intelektual Islam pada masa itu tak lepas dari peran para penguasa (sultan) yang memerintah. Para Sultan sangat mendorong para ulama dan cendekiawan dalam melakukan kajian keislaman, terutama pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II.

Selanjutnya pada abad XIX-XX muncul ulama-ulama penulis lainnya yang menghasilkan banyak karya-karya, diantaranya adalah : Syekh Muhammad 'aqib bin Hasanuddin, Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah (1811-1874 M), Muhammad Azhari bin Abdullah bin Ma'ruf (1856-1932 M), Abdullah bin Muhammad Azhari (1854-1937 M).⁵ Selain Ulama-ulama di atas, para penyalin naskah di Palembang sebenarnya masih banyak lagi. Hal ini ditandai dengan banyaknya karya-karya berupa naskah-naskah keagamaan yang masih tersimpan pada kalangan masyarakat Palembang, baik yang bertema, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal produktifitas intelektual, Palembang termasuk wilayah yang sangat subur.

Berdasarkan pengamatan penulis,⁶ di Palembang banyak ditemukan naskah keagamaan terutama yang bertema tasawuf. Selain tema tasawuf isi teks dari naskah-naskah

⁴ Diantara karya-karyanya yang terkenal antara lain adalah : *Hidayah as-Salikin*, yang telah di cetak beberapa kali di Mesir maupun di Surabaya, dan telah beredar juga di Malaysia maupun Negara-negara lain.

⁵ Zulkifli, *Ulama Sumatra Selatan : Pemikiran dan Peranannya Dalam Lintasan Sejarah*. (Palembang: Unsri Press, 1999), hlm. 11-40.

⁶ Pengamatan dilakukan di beberapa tempat penyimpanan naskah oleh masyarakat Palembang antara lain : Kemas Andi Syarifuddin, Abdul Azim, Muhammad Jufri, Habib Ahmad Alhabsyi. Pengamatan juga dilakukan di Perpustakaan Nasional RI lantai 5 bagian Koleksi Naskah.

tersebut dapat dibedakan kedalam tema tauhid, fiqh, al-Qur'an dan tafsir, hikayat, sejarah, dan lain-lain.

Sejak Kesultanan Palembang dikuasai penguasa Kolonial Belanda tahun 1821⁷ dan kemudian dihapus pada tahun 1823 M, peristiwa tersebut berdampak besar terhadap masyarakat Palembang baik dari segi sosial ekonomi budaya maupun religi. Kehadiran Kolonial Belanda dalam rangka perluasan kekuasaan politik ini menandai berakhirnya pengaruh politik maupun ekonomi penguasa lokal yang memiliki ciri-ciri pengaruh keislaman yang sangat kuat. Pada sisi lain, kehadiran Kolonial Belanda di Palembang yang berusaha ingin mendominasi sumber ekonomi tersebut juga membawa dampak yang luas bagi penduduk Palembang terutama sehubungan dengan terciptanya ekonomi pasar.

Sebagaimana diketahui, ditengah-tengah perubahan sosial dan politik ini berdampak terjadinya juga perubahan yang sangat besar pada aktivitas ekonomi penduduk, terutama perubahan yang berkaitan dengan perluasan produksi serta perdagangan komoditas ekspor terutama kopi, karet dan lada. Perubahan tersebut sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan yang terjadi pada periode sebelumnya, terutama sejak akhir abad XVIII.

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat tersebut ternyata membawa dampak terjadinya mobilitas sosial di kalangan penduduk Palembang terutama yang berkaitan ataupun yang berhubungan dengan permasalahan menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Selain itu juga berkaitan dengan adanya

⁷ Kesultanan Palembang akhirnya dikuasai oleh Kolonial Belanda setelah kalah dalam peristiwa perang Palembang pada tahun 1819 sebagaimana di kisahkan dalam *Syair Perang Menteng*, dan Sultan Mahmud Badaruddin II pun kemudian diasingkan ke Ternate. Dikisahkan dalam *Syair* tersebut bahwa banyak para haji yang gugur dalam perang tersebut. Lihat, *Syair Perang Menteng*, dalam Manuskrip Arab-Melayu tersimpan di Palembang.

kesempatan yang sangat luas untuk menimba maupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke berbagai pusat pengajaran Islam di Timur Tengah. Perbaikan kondisi ekonomi dan adanya peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi sejak pertengahan abad XIX telah memudahkan dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Seperti diketahui, sebagai rukun Islam kelima menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Perhatian terhadap ini telah ada pada masa awal masuknya Islam ke negeri ini. Meskipun mengalami banyak kendala terutama masalah transportasi,⁸ namun demikian tidak mengurangi minat terhadap pelaksanaan ibadah tersebut. Meskipun orang yang melakukan ibadah haji ini jumlah belum begitu banyak, namun perjalanan ke tanah suci dalam rangka menunaikan rukun Islam ini terus saja meningkat, terutama setelah berkembangnya Kesultanan-Kesultanan di Nusantara.

Perjalanan ke tanah suci Mekkah ini dilakukan orang tentunya melalui banyak cara, ada yang karena dukungan dari penguasa setempat dan ada juga yang dilakukan sendiri karena kepentingan ibadah dan latar belakang permasalahan keilmuan Islam. Sebagai contoh adalah ; Muhammad Arsyad al-Banjari sengaja dikirim oleh penguasa Kesultanan Banjar Sultan Tahlilullah (1770-1734 M)⁹ dan Abdus Samad al-Palimbani beserta saudaranya wan Abdul Qadir dikirim ke Mekkah oleh ayahnya yang menjabat mufti di Keddah sekitar tahun 1770-

⁸ Pada bagian pertama abad XIX jemaah haji Indonesia memerlukan waktu tiga tahun untuk dapat melakukan ibadah haji tersebut. Baca Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta:LP3ES, 1982), hlm.30

⁹ M. Aswadie Syukur, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ; *Kitab Sabilal Muhtadin I* (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm. 1.

an.¹⁰ Selain itu juga Syekh Muhammad Jailani harus pergi ke Mekkah untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman dengan alasan agar dapat menyelesaikan masalah kasus mistik di Aceh yang sedang dihadapinya.¹¹ Terlepas dari latar belakang tersebut, keberangkatan jama'ah haji Nusantara tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial ekonomi masyarakat pada masanya, termasuk adanya mobilitas sosial yang diakibatkan adanya perbaikan kondisi ekonomi.

Konjungtur ekonomi di Palembang terutama sejak awal abad XX ini juga berkaitan erat dengan terciptanya kaum terpelajar berpendidikan Islam dari Timur Tengah. Keuntungan yang diperoleh dari komoditi karet, kopi maupun lada ini memungkinkan bertambahnya jumlah petani dan pedagang maupun saudara mereka yang kemudian melakukan ibadah haji ke Mekkah. Adapun yang lebih uniknya lagi bahwa hampir sebagian dari mereka yang menunaikan ibadah haji ini tidak segera pulang kembali ke kampung halamannya, namun demikian mereka memilih untuk menetap di tanah suci Mekkah untuk menimba ilmu keislaman maupun meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.¹²

¹⁰ M. Chatib Quzwain, *Mengenal Allah : Suatu Studi Mengenai Ajaran Tasawuf Syaikh Abdus Samad al-Palimbani* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 8.

¹¹ Ahmad Daudi, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin ar-Raniry* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.31.

¹² Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan "**Haji Mukim**". Seperti diketahui, dalam kedudukannya sebagai dua kota suci (Haramain) Mekkah-Madinah adalah tempat menunaikan ibadah haji dan sekaligus tempat pertemuan antar jama'ah haji seluruh pelosok dunia. Dalam hal ini ibadah haji merupakan ajang pertemuan antar umat muslim sedunia. Di sisi lain, kedua kota suci tersebut juga berkedudukan sebagai pusat keilmuan Islam. Dikedua kota ini berhimpun para alim ulama berkaliber dunia. Sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, para ulama tersebut melanjutkan tradisi keilmuan Islam. Mereka mendirikan majelis ta'lim yang dikenal dengan sebutan "*Halaqah*". Para Jama'ah haji yang berkesempatan bermukim di Mekkah inilah rata-rata yang kemudian

Pada tahun 1930-an mereka (Haji Mukim) ini adalah bagian komunitas Indonesia terbesar kedua di Mekkah (setelah orang Sunda/Jawa Barat).¹³ Setelah mereka kembali ke Palembang, pembelajaran yang mereka terima dari Timur Tengah memungkinkan mereka mendirikan jaringan pendidikan yang tidak tergantung dengan pemerintah Kolonial Belanda, yakni dengan mendirikan sekolah sendiri. Dengan demikian mereka berada di luar *spectrum system* Kolonial.

Mereka inilah salah satu yang dapat dimasukkan dalam kategori “Elite Lokal” Palembang. Realitas di atas menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena fakta yang ada menunjukkan bahwa “Haji Mukim” ini memunyai peran sentral dalam mengembangkan Islam di Palembang. Sementara sampai saat ini jarang ditemukan penelitian yang mengkaitkan hubungan antara aktivitas ekonomi, dengan munculnya “haji mukim” dan adanya perkembangan Islam di Palembang sampai ke daerah-daerah di wilayah Sumatra Selatan.

B. Perumusan Permasalahan dan Cakupan Penelitian

Studi ini akan membahas tentang terjadinya perubahan politik, ekonomi sosial budaya dan religi sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang oleh Kolonial Belanda pada awal abad XIX dan kemudian menganalisis hubungan antara perubahan tersebut dengan peran sentral “Haji Mukim” sebagai bagian dari kelas elite pada masa itu, terutama peran mereka dalam mengembangkan Islam di Palembang.

mengambil kesempatan untuk mengikuti aktivitas tersebut. Lebih lanjut lihat, Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren ; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 21. Di kawasan Sumatera Selatan (Palembang) sebutan Haji Mukim ini dikenal dengan sebutan “Haji Naun”. Sebutan ini dilekatkan kepada masa tinggal mereka di Mekkah dalam bilangan tahun.

¹³ Lihat Jeroen Peeters, *Kaum Tuo Kaum Mudo; Perubahan Religi di Palembang 1821-1942* (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 152-154

Bertitik tolak dari latar belakang histories yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah ;

1. Kelompok mana saja yang tergolong elite lokal di Palembang sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang ?
2. Bagaimana kehidupan elit lokal Palembang setelah Kesultanan Palembang dikuasai oleh Kolonial Belanda ?
3. Bagaimana peran elite lokal Palembang dalam mengembangkan Islam di Palembang ?
4. Bagaimana eksistensi "Haji Mukim" sebagai elite lokal Palembang dalam menjalankan perannya ?
5. Seberapa jauh warisan intelektual para "Haji Mukim" berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Palembang pada abad XIX-XX ?

Studi ini secara spasial mencakup wilayah Karesidenan Palembang pada abad XIX sampai pertengahan abad XX yang pada saat itu secara administrative terdiri dari beberapa onderafdeling. Penggunaan kata Palembang dalam studi ini untuk mewakili semua wilayah onderafdeling diatas yang berlokasi hanya di wilayah Propinsi Sumatera Selatan pada saat ini. Secara temporal mencakup periode awal abad XIX sejak dikuasainya Kesultanan Palembang oleh Kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1821 M, hal tersebut merupakan proses penting awal mula terjadinya perubahan terutama yang berkenaan dengan eksistensi elite lokal Palembang khususnya keberadaan "Haji Mukim", sedangkan periode sampai pertengahan abad XX ketika peran "Haji Mukim" sejak tahun 1970-an sudah mulai menyurut. Besar kemungkinan era "haji mukim" sejak itu telah berakhir seiring adanya kemudahan transportasi dan peningkatan pelayanan perjalanan haji sehingga ikut melahirkan paradigma baru dalam ibadah haji.

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Palembang setelah Kesultanan Palembang dikuasai oleh Kolonial Belanda yang kemudian Kesultanan tersebut dihapuskan, dan menganalisis eksistensi “Haji Mukim’ sebagai bagian dari elite lokal Palembang dalam peran yang dijalankannya berkenaan dengan perkembangan Islam di Palembang.

Secara operasional tujuan ini dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama di Palembang setelah Kesultanan Palembang dikuasai oleh Kolonial Belanda sejak tahun 1821 M.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Palembang setelah Kesultanan Palembang dikuasai oleh Kolonial Belanda sejak tahun 1821 M terhadap para elite lokal Palembang .
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh perubahan ekonomi terhadap eksistensi para “Haji Mukim” sebagai bagian dari elite lokal dan perannya dalam mengembangkan Islam di Palembang pada abad XIX-XX.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis berbagaimacam warisan yang ditinggalkan oleh para “Haji Mukim” terutama warisan intelektualnya.

D. Tinjauan Pustaka

Meninjau historiografi terdahulu dalam suatu penelitian bertujuan untuk: pertama, mengetahui bagian-bagian mana dalam perbendaharaan pengetahuan yang belum terisi sehingga penelitian yang diadakan kemudian dapat mengisi kekosongan-

kekosongan tersebut, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan pemahaman yang baru dan landasan berpijak bagi kerangka teoritis.

Penelitian tentang elit Islam yakni kaum ulama di Jawa dilakukan oleh Geertz.¹⁴ Dalam penelitiannya yang berjudul "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker" (1960), Geertz berkesimpulan bahwa pengaruh kiai di Jawa terletak pada pelaksanaan fungsi dan perannya sebagai perantara budaya (*cultural broker*).¹⁵ Dan peran seperti itu hanya bisa dilakukan oleh kiai yang memiliki kemampuan. Geertz menyebut peran ulama ini sebagai 'cultural broker' (agen/pialangbudaya) yang mana fungsi 'cultural broker' ini adalah memainkan peranan menghubungkan, mendinamisir dan merekayasa ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara 'great' dengan 'little tradition' (tradisi besar dan tradisi kecil). 'Great tradition' tidak hanya berupa fenomena Islam internasional tetapi juga pengaruh-pengaruh asing/non-Islam terhadap masyarakat Islam lokal sehingga "wajah baru Islam" ("*a new face of localized Islam*") bisa diterima oleh sebuah masyarakat setempat. Fungsi sebagai kultural broker ini menemukan legitimasinya karena, melalui

¹⁴ Geertz, "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker", *Comparative Studies on History and Society*, II. 2 (1960), hlm. 228-249.

¹⁵ Clifford Geertz menawarkan konsep 'cultural broker' dalam arti makelar budaya. Geertz melihat peran Kiai (di Jawa) tak ubahnya seperti agen pembawa nilai baru bagi masyarakat desa. Dalam pandangan itu, kiai tak hanya mengajarkan agama tapi juga mengenalkan modernitas budaya. Karena agama Islam seperti halnya agama besar lainnya, sejatinya cerminan kemodernan itu sendiri. Dalam hal inilah istilah cultural broker disandingkan pada sosok kiai. Cultural broker banyak juga digunakan sebagai istilah yang mengacu kepada orang atau sekelompok orang yang berperan sebagai perantara atau mediator budaya. Dengan demikian, siapa saja yang berperan sebagai penterjemah suatu budaya kepada orang lain sehingga ia/mereka menjadi jembatan yang menghubungkan dua orang atau dua kelompok ini dapat dikatakan sebagai "a cultural broker".

otoritas ilmu agamanya, ulama sering berperan menentukan dalam masalah-masalah sosial, politik dan perkembangan masyarakat di lingkungannya. Dalam pergulatan intensifnya sebagai dinamisator diantara tradisi besar dan tradisi kecil inilah, ulama banyak membentuk wajah Islam lokal, menghasilkan pemikiran dan karya-karya yang memperkaya khazanah pemahaman keIslaman.

Dalam perkembangannya, konsep Kiai sebagai makelar budaya ini diperbaharui oleh penelitian dari Hiroko Horikoshi¹⁶ yang melakukan penelitian terhadap institui Kiai di Jawa Barat. Dalam penelitian ini Horikoshi memperlihatkan bagaimana sosok Kiai, yang dibedakan dengan sosok ulama kampung, memiliki pengaruh yang sangat besar yang terimplementasikan melalui peran yang diabdikannya kepada masyarakat dan terlembagakan melalui ketergantungan masyarakat pada peran dan sosok Kiai itu sendiri. Akhirnya sosok Kiai tidak sekedar perantara atau makelar budaya yang menjembatani masyarakatnya dengan dunia luar yang lebih luas melainkan melangkah jauh sebagai aktor penting dalam arus perubahan sosial.

Di Jawa, penelitian lain tentang elit Islam yakni ulama telah dilakukan juga antara lain oleh Mansurnoor¹⁷ yang meneliti dalam rangka penulisan disertasi yakni dengan mengkaji ulama Madura dari segi kedudukan, fungsi dan peran sosialnya. Dalam disertasinya yang berjudul *Islamin an Indonesian World; The Ulama of Madura* (1990), ia mengemukakan bahwa ulama sebagai pemimpin umat adalah pemimpin lokal sejati. Para ulama berperan sebagai guru dan pendidik Islam

¹⁶Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Mualry Sunrawa (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987).

¹⁷ Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World; The Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990).

lainnya dan sekaligus sebagai pemimpin dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Mereka adalah pemberi motivasi dan pendorong bagi kemajuan, dan sekaligus pemelihara kesinambungan ajaran Islam dan penjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Selain itu, di Jawa Barat penelitian tentang ulama juga telah dilakukan oleh Mohammad Iskandar (2001) yang meneliti dalam rangka penyusunan Tesis S2 pada program sandwichantara Universitas Indonesia dan *Vrije Universitet*, Amsterdam dengan judul *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*. Dalam buku tersebut diuraikan tentang perbedaan makna antara “Kiai” dan “Ulama”, dengan cara mengungkapkan melalui peranan mereka dalam perubahan sosial politik yang terjadi pada masa kolonial.¹⁸ Kajian tersebut membuktikan bahwa di Jawa Barat dalam bidang keilmuan banyak orang yang tidak bergelar “Kiai” ternyata mempunyai ilmu pengetahuan yang tidak kalah dengan Kiai, terutama pada kurun waktu 1920-an sampai dengan 1930-an dalam kasus perkara *furu* atau *khilafiah*. Namun demikian pada masalah pengaruh terutama di kalangan masyarakat pedesaan, sosok “Kiai” lebih berpengaruh dan berwibawa terutama perannya sebagai stabilisator dan dinamisator. Di sisi lain, pada masa Kolonial Belanda Kiai justru seringkali dianggap sebagai factor penghambat program-program pemerintah bahkan pemberontak. Dalam kajian tersebut juga mengungkap adanya dua stereotip baik “Kiai” maupun “Ulama” antara yang berfaham reformis maupun tradisionalis. Kaum reformis menuding kaum tradisionalis telah menutup pintu ijtihad dan mengharuskan bertaklid, sehingga hal tersebut menjadi salah satu factor penghambat kemajuan

¹⁸Muhammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai Dan Ulama di Jawa Barat , 1900-1950* (Yogyakarta: Matabangsa, 2001)

dan terpruknya umat Islam. Namun demikian tuding tersebut justru berdampak positif bagi kaum tradisional, sebab gugatan dan tuding tersebut secara tidak langsung telah mendorong kaum tradisional untuk melakukan perubahan, diantaranya : memperbaiki sistem pendidikan di pesantrennya (memperkenalkan kurikulum yang lebih jelas, memperkenalkan system klasikal) serta mendorong mereka untuk menggali kembali sumber-sumber ajarannya dan mengaktualisasikannya dalam bermasyarakat tanpa harus meninggalkan mazhab yang mereka yakini kebenarannya. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa Tampilnya para “Kiai” tradisional dengan berbagai argumentasinya dalam membela keyakinan, baik dalam masalah praktek-praktek keagamaan maupun dalam masalah sosial-politik secara tidak langsung membuat kepercayaan masyarakat Islam kepada para Kiai semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa kharismatik sosok Kiai Tradisional di Jawa Barat demikian besar. Kharismatik seorang Kiai atau Ajengan ternyata bukan saja semata-mata karena perannya sebagai ‘*broker budaya*’ semata, tetapi lebih banyak bertumpu pada dua hal, yakni: pertama, pengetahuan dan pemahamannya mengenai masalah hukum agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Penciptanya, kedua kemampuannya dalam mengaktualisasikan semua ajaran agama yang normative itu kedalam kehidupan sehari-hari terutama dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan masyarakat kepadanya, baik persoalan furu atau khilafiah maupun berkaitan dengan masalah sosial-ekonomi dan berpolitik. Kajian Muhammad Iskandar (2006) juga menyimpulkan bahwa kedudukan para Kiai atau Ajengan mempunyai kedudukan yang demikian dominan di kalangan masyarakat atau dengan kata lain mempunyai semacam kemampuan *enabling* bagi lingkungannya. Pola perilakunya sering dijadikan panutan oleh masyarakat Islam sekitarnya.

Demikian juga fatwanya selalu dijadikan pegangan dalam praktek-praktek keagamaan, termasuk juga dalam memilih partai atau organisasi soial atau politik. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Islam di Jawa Barat khususnya di daerah pedesaan, Kiai atau Ajengan dapat dikatakan sebagai *agent of change* yakni tokoh atau peristiwa yang mampu membawa perubahan.

Penelitian tentang ulama penghulu pernah dilakukan oleh Muhammad Hisyam¹⁹ yang menelusuri dinamika dan status hukum Penghulu Jawa pada era kolonial Belanda 1882-1942 di bawah konstelasi tiga entitas yang terpisah, yaitu: usaha kolonial Belanda untuk mengakomodir institusi penghulu dalam administrasi kolonial, penyebaran gerakan pembaruan atau reformis Islam dan kemunculan gerakan nasionalis. Penelusuran ini selanjutnya dipertajam dengan diajukannya dua pertanyaan lainnya, yaitu: apa signifikansi penghulu dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas? Dan bagaimana penghulu mengemban peran mereka? Pada tataran ini, penghulu tidak hanya dilihat sebagai bagian dari sistem hukum tetapi juga sebagai pemimpin Islam yang berpengaruh. Dalam penelusuran tersebut, Muhammad Hisyam menggunakan pendekatan sosiologi sejarah (*historical-sociological approach*) yang dipahami sebagai kajian terhadap masa lampau untuk mengetahui bagaimana masyarakat bekerja dan berubah. Selanjutnya, melalui pendekatan ini, Hisyam menyimpulkan bahwa selain memiliki landasan historis yang kuat sebagai institusi yang telah sejak era pra kolonial, institusi penghulu juga memiliki peran yang signifikan dengan fungsi gandanya, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai anggota administrasi formal kolonial. Fungsi ganda ini menunjukkan

¹⁹ Muhammad Hisyam, *Caught Between Three Fires: The Javanese Pengulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942* (Jakarta: INIS: 2001), hlm. 21.

peran yang sangat penting dari penghulu, terutama perannya sebagai mediator antara kecenderungan elitis Jawa kala itu yang terbagi menjadi dua kelompok, kelompok priyayi yang pro kolonial dan kelompok ulama yang kontra kolonial. Akhirnya, dalam kaitannya dengan dinamika kolonial; gerakan pembaruan Islam; dan gerakan Nasionalis, Muhammad Hisyam menyimpulkan bahwa penghulu dalam mengemban peran mereka dihadapkan pada situasi yang sulit, baik sebagai *qadi* dihadapan Allah, pejabat dihadapan otoritas kolonial, maupun sebagai pemimpin agama dihadapan umat. Meski demikian, keberadaan institusi penghulu dalam konstelasi ketiga entitas di atas tetap signifikan terutama peran sentralnya sebagai mediator dan aktor yang terlibat dalam dinamika itu sendiri.

Di Palembang penelitian yang ada kaitannya dengan ulama pernah dilakukan oleh Husni Rahim,²⁰*Sistem Otoritas dan Administrasi Islam; Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* (1992).²¹Dalam kajiannya Rahim menitikberatkan pada permasalahan peran pejabat agama (penghulu) yang ia sebut sebagai istilah 'ulama birokrat' sebagai pemegang otoritas administrasi Islam, yakni diantaranya adalah: membantu penarikan pajak, membantu pencatatan penduduk, mengawasi pendidikan agama. Rahim juga menjelaskan sumber penghasilan para penghulu yakni selain dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, penghasilan para penghulu adalah dari; batu kawin yang diberikan dari para keluarga mempelai yang dinikahkannya, zakat fitrah. Selain itu Rahim menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam memerankan

²⁰ Buku yang berjudul *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam; Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* semula adalah disertasi untuk meraih gelar doktor (S3) pada IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1994. Tahun 1995-1999 ia menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam Departemen Agama.

²¹ Rahim, *Sistem Otoritas* (1992), hlm. 123-146.

tugas dan fungsinya di era kesultanan, institusi penghulu di Palembang terlibat penuh baik dalam bidang hukum maupun pendidikan. Peran ini berbeda dengan peran kepenghuluan di Jawa yang mengalami pemisahan antara peran *ad-da'wah wa at-tarbiyyah* dengan *at-tasyri' wa al-qada'*. Selanjutnya pada era kolonial institusi kepenghuluan juga memerankan tugas dan fungsi sebagai pejabat resmi kolonial. Kedua, dalam kaitannya dengan pihak lain, institusi kepenghuluan Palembang di era kesultanan bisa digambarkan dengan relasi kekuasaan sultan dengan agama di mana otoritas kesultanan dihasilkan dari kontrak sosial masyarakat. Relasi ini menjadikan institusi kesultanan sebagai saran dan otoritas yang berkewajiban untuk mengakomodir peran *hukumah* (pemerintahan) dan *nubuwwah* (keagamaan) yang praktiknya diemban oleh penghulu. Sedangkan pada era kolonial ditandai dengan pengakomodiran (baca, kontrol) kolonial terhadap institusi penghulu sebagai pejabat resmi. Namun dalam masalah pendidikan agama atau pengembangan keilmuan Islam, siapa saja ulama-ulama sebagai kaum elit local di Palembang dan bagaimana pemikirannya, seberapa besar peran mereka, seperti apa peran mereka, Rahim tidak mengungkap dan menjelaskan mengenai hal tersebut.

Selain itu penelitian tentang ulama di Palembang masa Kesultanan Palembang pernah dilakukan oleh Mujib Ali,²² "Pemilihan Ulama Kesultanan Palembang: Primordialisme atau Otoritas Sultan" (1997).²³ Dalam penelitiannya ini, Mujib menjelaskan bahwa sultan menentukan atau memilih sendiri terhadap ulama yang dianggap pantas menduduki jabatan sebagai penasihat keagamaan di lingkungan keluarga sultan. Dalam jabatan tersebut yang disebutnya sebagai "ulama sultan"

²² Tentang Mujib Ali, ia adalah salah seorang peneliti pada Balai Arkeologi Palembang dan kemudian ia pindah tugas ke Puslitbang Arkeologi Nasional Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

²³ Mujib Ali, "Pemilihan Ulama Kesultanan Palembang", hlm. 32.

diantara tugasnya adalah mengajarkan masalah keagamaan kepada keluarga sultan.²⁴ Namun demikian dalam kajiannya, Mujib belum mengungkap siapa saja ulama-ulama Kesultanan Palembang dan seberapa besar peran mereka, dan apa saja bentuk peran serta pemikiran mereka.

Kajian lainnya tentang ulama di Palembang pernah dilakukan oleh Jeroen Peeters, *Kaum Tuo, Kaum Mudo; Perubahan Religius di Palembang* (1997).²⁵ Dalam kajiannya Peeters mengungkapkan keberadaan kelompok Islam yang berorientasi modernis atau reformis dengan menyebutnya sebagai “kaum mudo” dan kelompok Islam yang berorientasi tradisional atau konservatif sebagai “kaum tuo”. Meski tidak dijelaskan istilah “kaum mudo” tersebut, namun dari isinya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “kaum mudo” di Palembang ini adalah mereka yang menolak taqlid, sedangkan yang dimaksud “kaum tuo” adalah mereka yang pro-madzhab khususnya madzhab Syafi’i. Namun demikian Peeters tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang disebut sebagai kelompok kaum mudo dan siapa yang disebut sebagai kelompok kaum tuo, serta apa saja ciri-ciri dari masing-masing tipe tersebut dan bagaimana karakteristik peran dan pemikiran keagamaan mereka. Disamping itu, Peeters juga tidak sama sekali menggambarkan hakikat Islam tradisional atau konservatif di Palembang. Padahal hakekat Islam tradisional atau konservatif di Palembang merupakan masalah yang signifikan untuk dikaji secara komprehensif dan mendalam.

²⁴ Mengenai ulama sultan ini bisa dibuktikan dari peninggalan arkeologis yakni pada makam-makam para Sultan Palembang, rata-rata di sebelah makamnya terdapat nama ulama dan keseluruhannya berasal dari keturunan Arab. Salah satunya, yakni di Pemakaman Kawah Tengkreup Palembang, terdapat makam Sultan Mahmud Badaruddin I (bertahta 1724-1758), di sebelahnya adalah makam ulama kesultanan yang bernama Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Aidarus.

²⁵ Peeters, *Kaum Tuo, Kaum Mudo*(1997).

Keseluruhan penelitian yang disebutkan di atas akan dijadikan referensi informasi. Hal tersebut berguna untuk menunjukkan adanya keterkaitan dan pendahuluan pengkajian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti sebelumnya pada bidang yang sama. Diharapkan agar penelitian ini dapat menampilkan sesuatu yang berbeda dengan sejumlah karya yang akan dikutip sekaligus bisa memberikan kritik terhadap karya karya tersebut melalui penelitian ini.

E. Metode dan Sumber Penelitian

Penelitian ini tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan jika tidak tersedia dan didukung sepenuhnya oleh sumber. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah, maka upaya merekonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti tersebut ditempuh melalui metode sejarah. Sebagaimana biasanya dalam penelitian sejarah, tahapan yang akan dilakukan yakni : *heuristic, kritik, interpretasi* dan *historiografi*.²⁶ Sumber pertama yang akan digunakan adalah berupa sumber lokal berupa *manuskrip* baik yang tersimpan di Palembang (masyarakat Palembang Museum Balaputra Dewa, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Perpustakaan Umariyah, dsb) maupun yang tersimpan di luar Palembang (Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, Perpustakaan Leiden Belanda, dsb). Sumber berupa *manuskrip* yang tersimpan di Kota Palembang maupun di beberapa daerah Sumatera Selatan diantaranya adalah berupa : *naskah-naskah keagamaan* sebagai bukti dari sebagian warisan intelektual para “**Haji Mukim**” Palembang, *naskah berupa surat-surat, naskah syair Perang Menteng* (di dalamnya menceritakan keterlibatan para

²⁶ Gilbert J. Garraghan, S.J. *a Guide to Historical Method* (New York : Fordham University Press, 1957), hlm. 103-421, Lihat juga ; Louis Gottschalk, *Mengertri Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI-Press, 1975), hlm. 18-19.

“Haji”), naskah-naskah yang berkaitan dengan sejarah Palembang, silsilah sultan-sultan Palembang, undang-undang Palembang, naskah piagam-piagam masa Kesultanan Palembangmaupun pada masa Kolonial Belanda dsb. Selain itu akan menggunakan sumber berupa arsip dan dokumen resmi maupun tidak resmi yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia serta Perpustakaan Nasional RI. Data yang akan dipakai diantaranya berupa ; *Memorie van overgave (MvO)*, *Koloniaal Verslag (KV)*, *Algemeen Verslag (AV)*, *Economische Verslag (EV)*, *Indische Verslag (IV)*, dsb. Sumber-sumber tersebut di atas dikategorikan sebagai sumber primer.

Disamping sumber primer, akan digunakan juga sumber sekunder berupa buku-buku antara lain : *Het Sultannat Palembang*, karya M.O Woulders, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang* karya J.L van Sevenhoven (sebagai regeeringcommissaris Palembang yang diangkat tahun 1821 M), *Dari Zaman Kesultanan Palembang* karya P. De Roo de Faille. Selain itu juga akan digunakan sumber-sumber yang diambil dari artikel-artikel yang terdapat pada ; *de Gids*, *BKI*, *TNI*, *IMT*, dan juga *TBG*.

Selain itu, studi lapangan juga akan dilakukan dengan cara ; a) observasi pada peninggalan-peninggalan bersejarah lainnya yang ada di Palembang (masjid-masjid bersejarah, mushola, madrasah, kampung-kampung bersejarah/kampung Arab : al-Munawar, al-Habsi, al-Idrusi dll) yang kesemuannya itu merupakan bukti-bukti perkembangan Islam yang ada di Palembang ; b) wawancara dengan para zuriat/keturunan para Sultan Palembang, keturunan ulama-ulama/ “Haji Mukim” maupun dengan Ulama-ulama tua/Haji yang masih ada di Palembang pada saat ini.

Konsekuensi logis dalam penelitian sejarah, bahwa sumber-sumber tersebut kemudian akan diuji keaslian dan keshohihannya melalui kritik intern dan kritik ekstern. Setelah

pengujian dan analisa data dilakukan, maka fakta-fakta yang diperoleh disintesakan melalui eksplanasi sejarah. Penulisan sebagai tahap akhir dari prosedur penelitian sejarah diusahakan dengan selalu memperhatikan aspek kronologis.

F. Kerangka Teori dan Pendekatan

Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode tersendiri di dalam kerja merekonstruksi masa lalu. Hal ini disebabkan karena sejarah sebagai ilmu yang berkentingan dengan proses dinamika manusia pada masa lalu telah sangat jauh dengan masa penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan pengkajian satu fakta sejarah dengan fakta lainnya tanpa didukung oleh kemampuan untuk menghidupkannya, maka sebuah tulisan sejarah akan hambar. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa metode sejarah sementara ini yang digunakan hanya mampu menghasilkan fakta-fakta sejarah.

Untuk menghidupkan fakta sejarah, maka secara metodologis didalam merekonstruksi sejarah dibutuhkan kerangka teoritis. Kerangka teoritis tersebut diharapkan dapat menghidupkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan, selain itu diharapkan juga untuk dapat memperkaya sebuah eksplanasi. Selain itu, penerapan seperangkat konsep dan teori dalam penulisan sejarah analitis adalah sebagai alat untuk menganalisis terhadap fenomena yang akan dikaji. Penerapan seperangkat konsep dan teori tersebut berarti mengandung implikasi metodologi yang didalam hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendekatan dari ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya.

Dengan penerapan seperangkat konsep dan teori melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial, penulisan sejarah diharapkan dapat mengekstrapolasikan berbagai macam dimensi strukturalnya maupun dimensi prosesualnya. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa fungsi kerangka teori tidak lebih

dari sekedar membantu untuk mengatur fakta sejarah. Dengan demikian dalam merekonstruksi sejarah, fakta selalu menempati posisi sentral. Oleh karenanya kerangka teori dan konseptual yang tidak dapat menerangkan fakta-fakta tidak perlu untuk dikemukakan.²⁷ Dengan kata lain, bahwa penerapan seperangkat konsep dan teori melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial memerlukan penyeleksian secara akurat supaya antara teori dan fakta dapat terjalin secara sinkron.

Istilah elite secara etimologi berasal dari kata latin yaitu "*eligere*" yang berarti "*to choose*" (memilih). Istilah tersebut kemudian berkembang pada abad XIV menjadi "*a choice of persons*" (orang-orang pilihan), dan pada abad XV istilah tersebut dipakai untuk menyebutkan "*best of the best*" (yang terbaik dari yang terbaik). Pada perkembangan selanjutnya yakni pada abad XVIII istilah tersebut dipakai dalam bahasa Perancis untuk menyebutkan sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat. Menurut "*Oxford English Dictionary*", istilah elit digunakan dalam bahasa Inggris paling awal pada tahun 1823 dan kemudian mulai tersebar secara luas melalui teori-teori sosiologi tentang-kelompok-kelompok elit terutama dari hasil pemikiran Pareto. Namun demikian dalam perkembangannya sekarang, Bottomore berpendapat bahwa istilah elit secara umum digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok fungsional dan pemangku jabatan yang memiliki status tinggi dalam suatu masyarakat.²⁸ Sedangkan istilah elite dalam Kamus Besar

²⁷ Sartono Kartidirdjo, *Pendekatan ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 6

²⁸ Sebagai referensi : Suzanne Keller, *Elitees, dalam Encyclopedia of the Sosial Sciences*, volume 5 (New York: The Macmillan Company, 1984), hlm. 26-29 ; Suzanne Keller, *Penguasa dan kelompok Elite Peranan elitee Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Terjemahan Zahara D. Noer (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm.33-34 ; T.B. Bottomore, *Elitees and Society* (New Zeland : Pinguin Books, 1964), hlm 14-17 ; Thom Kerstiens, *The New Elitee in Asia and Afrika, a*

Bahasa Indonesia pengertiannya adalah,1) orang-orang terbaik atau pilihan disuatu kelompok, 2) kelompok kecil orang terpandang atau berderajat tinggi (bangsawan, cendekiawan) .²⁹

Pakar yang membahas masalah elite antara lain adalah Vilfredo Pareto (1848-1923) dan Gaetano Mosca (1858-1941). Keduanya adalah warga Itali yang sudah diakui kepakarannya sebagai pemula teori elite. Meski demikian sebenarnya yang lebih tepat dikatakan sebagai pemula teori elite adalah Pareto, sedangkan Mosca dapat dikatakan sebagai pemula teori kelas penguasa, hal tersebut dapat dilihat dari karyanya “ *The Ruling Class*” .

Elite menurut Pareto adalah sekelompok orang yang memiliki indeks tertinggi dalam aktivitasnya. Pareto membagi elite dalam dua kelompok, yaitu kelompok elite yang memerintah dan kelompok elite tidak memerintah. Elite yang memerintah mencakup individu yang langsung maupun tidak langsung memainkan peranan penting dalam pemerintahannya. Sedangkan Mosca mengatakan elite adalah kelompok yang memegang kekuasaan yang umumnya berjumlah sedikit tetapi mengendalikan kelompok yang jumlahnya lebih besar.

Adapun yang dimaksud “elite” dalam penelitian ini adalah sebagaimana pengertian yang terdapat dalam KBBI di atas yakni, kelompok kecil orang terpandang atau berderajat tinggi yang ada di Palembang pada masa setelah Kesultanan Palembang dikuasai Kolonial Belanda tahun 1821 (bangsawan, cendekiawan), dan akan memfokuskan pada sekelompok orang yang mempunyai sebutan “*Haji Mukim*”. Sebagaimana diketahui, kehadiran mereka (Haji Mukim) berkaitan erat dengan konjuncture ekonomi tahun 1920-1930-an. Keuntungan

Comparative Study of Indonesia and Ghana (New York : federick A. Prager Inc. Publiser, 1966), hlm. 4

²⁹ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta ; Balai Pustaka, 2002), hlm. 294

yang diperoleh dari komoditi karet dan kopi memungkinkan bertambahnya jumlah pedagang kecil maupun petani kecil serta keluarga mereka yang melakukan ibadah haji ke Mekkah, dan sebagian diantara mereka ini tidak segera pulang ke asalnya (Palembang) melainkan menetap di tanah suci untuk meneruskan pendidikan. Setelah mereka kembali ke Palembang inilah kemudian pembelajaran yang telah mereka dapatkan tersebut memungkinkan mereka mendirikan jaringan pendidikan yang mana tidak tergantung pada pemerintah Kolonial Belanda, yakni dengan mendirikan gedung sekolah tersendiri. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut “elite” pada masa itu di Palembang sebagian besar diisi oleh kaum terpelajar berpendidikan Islam di Timur Tengah.

Dalam penelitian ini sumbangan pemikiran Pareto maupun Mosca tentang elite akan bermanfaat bagi kajian terhadap Elite lokal Palembang abad XIX-XX, yang mana akan memfokuskan kajian terhadap peran “Haji Mukim” dalam mengembangkan Islam di Palembang. Oleh karena kedua tokoh tersebut di atas telah mencoba mengemukakan ide-idenya mengenai sifat dan peranan elit dalam masyarakat.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan multimensional. Sebagaimana diketahui, peranan dan teori-teori dan konsep-konsep ilmu sosial sangat penting dalam penelitian sejarah. Untuk lebih memahami studi tentang elite lokal Palembang pada abad XIX-XX yang memfokuskan kajian terhadap peran “Haji Mukim” dalam mengembangkan Islam di Palembang secara mendalam, maka selain menggunakan pendekatan histories juga akan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti Sosiologi, Antropologi dan ekonomi.

Pendekatan histories mutlak digunakan untuk dapat merekonstruksi peristiwa masa lampau secara kronologis dan diakronis yang berkaitan dengan sisi keberadaan elit lokal Palembang pada abad XIX-XX. Konsekuensi logis dari

pendekatan histories adalah penggunaan metode sejarah yang meliputi ;*heuristic, kritik, intepretasi, dan historiografi.*

Adapun bantuan dari konsep sosiologi antara lain adalah tentang "*mobilitas sosial*". Konsep mobilitas sosial ini untuk menganalisis keterkaitan antara perubahan didalam masyarakat Palembang sejak keruntuhan Kesultanan Palembang pada awal abad XIX serta masuknya dominasi Kolonial Belanda, dimana perubahan tersebut diantaranya berkenaan dengan perkembangan ekonomi masyarakat muslim di Palembang (khususnya ekonomi petani). Mengenai mobilitas sosial ini Marvin E. Olsen berpendapat, bahwa mobilitas seseorang terjadi apabila seseorang pelaku sosial merubah statusnya atau lebih dalam pola stratifikasi yang lebih luas.³⁰ Konsep sosiologi lainnya adalah tentang "*gaya hidup*". Seperti diketahui, bahwa status sosial seseorang atau sekelompok sosial dapat ditunjukkan melauai gaya hidunya. Dengan kata lain bahwa, gaya hidup adalah merupakan cerminan dari status sosialnya. Selain itu gaya hidup juga merupakan cerminan dari kekuasaan maupun kekayaan. Mengenai gaya hidup ini Sartono Kartodirdjo berpendapat, gaya hidup adalah suatu totalitas dari pelbagai tatacara, adapt, kebiasaan, struktur kelakuan, kompleks lambang-lambang, sikap hidup serta mentalitas suatu golongan sosial yang secara menyeluruh mempengaruhi kehidupannya sehari-hari³¹. Oleh karena itu gaya hidup merupakan suatu system yang sangat kompleks dengan pelbagai pedoman dan persyaratan dalam pola kehidupan sosial yang sifatnya subyektif.

Sementara dalam penggunaan pendekatan ilmu-ilmu sosial ini, akan dititik beratkan pada pendekatan teori *structural-*

³⁰ Marvin E. Olsen, *The Process of Sosial Organization* (New Delhi: Oxford&IBH Publising Co, 1968), hlm. 197-199.

³¹ Sartono Kartodirdjo, *Perekembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1993), hlm. 53

fungsiional. Menurut salah satu asumsi dari teori *structural-fungsiional*, bahwa masyarakat sebagai suatu system memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga yang memiliki fungsi sendiri-sendiri.³² Asumsi lainnya adalah seperti adanya hubungan sosial yang resiprositas, system sosial yang dinamis, perubahan-perubahan secara gradual dan sebagainya.³³

G. Sistematika Pembahasan

Studi tentang Elite Lokal Palembang pada abad XIX-XX : Kajian Terhadap Peran “Haji Mukim” Dalam Mengembangkan Islam, secara sistematis akan dibagi menjadi lima bab. Bab I mencakup : latar belakang masalah, perumusan masalah dan cakupan penelitian, tujuan penelitian, metode dan sumber penelitian, kerangka teori dan pendekatan, serta sistematika pembahasan.

Bab II akan dibahas mengenai Gambaran umum Palembang pada abad XIX-XX, meliputi ; situasi dan kondisi Palembang sebelum dan sesudah Sultan Mahmud Badaruddin II diasingkan ke Ternate (1821) yang akan mencakup ; situasi politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keagamaan (Islam), dan Beberapa Zuriat Kesultanan Palembang. Selain itu akan dibahas juga mengenai; kebijakan Kolonial Belanda Terhadap Palembang,

Pada Bab III akan dibahas mengenai identifikasi elite lokal Palembang setelah kesultanan Palembang dihapus, diantaranya meliputi ; para bangsawan (priyayi), golongan Arab, para haji.

Pada Bab IV akan dibahas mengenai peran “Haji Mukim” dalam mengembangkan Islam di Palembang, diantaranya

³² Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (Yogyakarta: Tiara wacana, 1992), hlm. 25-26

³³*Ibid.* hlm. 24

meliputi ; beberapa “Haji Mukim” di Palembang abad XIX dan XX (biografi, pemikirannya) .

Pada Bab V akan dibahas mengenai warisan intelektual “Haji Mukim” dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Palembang, meliputi ; peran dalam melestarikan naskah-naskah keagamaan, terbentuknya budaya lokal Islam di Palembang antara lain dalam hal : system pengajaran agama,

BAB II

GAMBARAN UMUM

PALEMBANGPADAABAD XIX-XX

A. Situasi dan Kondisi Palembang Sebelum Dan Sesudah Sultan Mahmud Badaruddin II Diasingkan ke Ternate (1821)

1. Keadaan Geografis

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1825 wilayah Palembang³⁴ meliputi wilayah bekas Kesultanan Palembang Darussalam³⁵ yang terakhir dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin II (1803-1821) dan kemudian diambil alih oleh pemerintah Kolonial di Batavia sebagai wilayah Keresidenan Palembang. Baik pada masa kesultanan³⁶ maupun pada masa keresidenan, Palembang beribukota di Kota Palembang.

³⁴ Dalam uraian nanti, kata "Palembang" jika tidak didahului oleh kata "kota" atau "ibukota" berarti mengacu kepada Keresidenan Palembang secara keseluruhan.

³⁵*Darussalam*, menurut Hanafiah, adalah nama resmi untuk Kesultanan Palembang yang berarti tempat yang tentram. Dalam pemakaiannya, nama itu lebih sebagai julukan untuk Kesultanan Palembang karena keberhasilan pembangunan politik, ekonomi, dan social. Lihat Hanafiah, *Sistem Otoritas*, 2002, hlm. 44.

³⁶ Terdapat beberapa pendapat tentang kapan Kesultanan Palembang berdiri: Zed (2003: 28), meskipun tidak secara terang-terangan mengatakannya, namun menganggap bahwa Kesultanan Palembang berdiri pada tahun 1553. Palembang yang nyatanya tidak dapat lepas secara sosial-budaya-sejarah dari Jawa, menurut Amin (1986: 81), mulai berbentuk kesultanan yang berdiri sendiri setelah tahun 1668 pada masa Pangeran Ario Kesuma (1662-1706) ketika diperlakukan kurang menyenangkan oleh Sultan Mataram saat itu (Sultan Amangkurat I). Tentang hal ini, Abdullah memberikan sebuah tafsir tentang berdirinya Kesultanan Palembang. Menurutny (1986: 54), kesultanan berdiri pada masa pemerintahan Pangeran Ario Kesuma (1662-1706), karena ialah yang pertama kali menggunakan gelar "sultan" pada tahun 1666. Gelarnya saat itu adalah Sultan Abdurrahman yang juga dikenal sebagai Sunan Cindai Balang.

Penamaan seluruh wilayah dengan nama ibukota ini adalah sesuai dengan tradisi Jawa.³⁷

Akan tetapi, satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa konsep wilayah yang digunakan pada masa Kesultanan Palembang adalah konsep *kemandalaan*. Istilah ini berarti lingkaran raja. Dengan mengutip O.W. Wolters, Hanafiah mengatakan bahwa *kemandalaan* menampilkan satu bentuk politik khusus yang tidak dalam keadaan mantap pada wilayah geografis yang tidak jelas dan juga tanpa perbatasan yang tetap, sedangkan pusat-pusat yang kecil cenderung mencari segala arah untuk keamanan. Oleh karena itu, selama masa kesultanan wilayah geografis yang dikuasai tidak dapat dipastikan. Semua tergantung pada kemampuan sultan yang memerintah saat itu, baik kemampuannya dalam memegang kekuasaan ataupun kemampuannya dalam berdiplomasi. Dengan kata lain, demikian Hanafiah bermetafora, wilayah kesultanan tersebut bagaikan alat musik akordeon yang mampu mengembang dan mengempis ketika dimainkan.³⁸

Pendapat ini ternyata bertentangan dengan pendapat Ali Amin yang mendasarkan diri pada data arkeologis di wilayah Palembang (atau Palembang, ketika penelitian arkeologis itu dilakukan). Menurutnya, wilayah geografis kesultanan meliputi lokasi-lokasi penemuan benda-benda arkeologis yang sezaman dengan keberadaan kesultanan. Wilayah tersebut membentang

³⁷Di Jawa nama ibukota biasa digunakan pula untuk menamai seluruh wilayah kerajaan atau seluruh wilayah keresidenan; seperti Kesultanan Yogyakarta yang beribukota Yogyakarta juga atau Keresidenan Pati yang beribukota Pati, lihat Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibukota*, terj. Sugarda Purbakawatja (Jakarta: Bhuratara, 1971), hlm12-13).

³⁸ Konsep *kemandalaan* ini berasal dari Jawa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Palembang secara sosial-budaya banyak terpengaruh oleh kebudayaan Jawa selain Melayu. Untuk mengetahui gambaran terkini tentang konsep *kemandalan* ini dalam praktek dapat lihat Lombard (Jilid III, 2005: 108-129).

dari Bukit Barisan di sebelah barat sampai di Pulau Belitung di sebelah timur. Dengan pendapat ini, Ali terkesan ingin menegaskan bahwa luas wilayah Kesultanan Palembang sudah memiliki batas-batas geografis yang pasti sebelum masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II.³⁹

Apabila dilihat secara keseluruhan, maka wilayah Palembang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Dalam keadaan seperti itu, Palembang memiliki kekhasan yang juga dimiliki oleh daerah-daerah di bagian selatan itu; sebagian besar wilayah terletak di kawasan dataran rendah dengan beberapa sungai besar dan sungai kecil mengalir ke arah pantai timur. Di sebelah utara Palembang adalah Jambi, sedangkan di sebelah selatan adalah Lampung. Di bagian barat, terletak Bengkulu yang terpisahkan oleh Bukit Barisan; sebuah barisan pegunungan membentuk batas alami (*natuurlijkegrens*) dari bagian barat laut sampai ke bagian barat daya wilayah Palembang. Adapun di sebelah timur terletak Selat Bangka yang memisahkan wilayah Palembang dengan Kepulauan Bangka dan Belitung.⁴⁰ Melalui penelitian Mestika Zed dapat diketahui bahwa luas wilayah yang dimiliki Palembang (ketika sudah menjadi sebuah keresidenan) adalah ± 84.692 km². Seluas ± 71.000 km² atau sekitar 83 persen dari luas keseluruhan wilayah adalah dataran rendah.⁴¹

Daerah dataran rendah sampai ke daerah pesisir pantai di sebelah timur, dalam pengamatan Marsden pada akhir abad ke-18, terdiri dari bagian rawa-rawa yang datar. Dalam keadaan yang seperti ini, pada beberapa tempat, penduduk tidak biasa

³⁹ AliAmin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya," dalam K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (eds). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Palembang*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.

⁴⁰ ANRI, *Laporan Politik tahun 1837* (Djakarta: Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah Arsip Nasional, 1973), hlm LXXXIV.

⁴¹ Mestika Zed, *Kepialangan, Politik dan Revolusi: Palembang 1900 – 1950* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 28.

menanami bagian tersebut. Akan tetapi, umum diketahui bahwa bagian pinggiran rawa-rawa yang biasa disebut dengan *lebak* pada keadaan tertentu sering ditanami dengan padi.⁴² Kebalikan dari itu adalah semakin ke arah baratnya ke pedalaman, semakin berkurang rawa-rawa dan mulai digantikan dengan daerah-daerah yang penuh ditanami beberapa tumbuhan khas daerah setempat. Secara umum, dapat dikatakan bahwa menuju ke pedalaman keadaan akan ternaungi dengan ketebalan pepohonan yang sering ditebangi oleh penduduk setempat sebagai bakal lahan untuk perladangan. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang wajar apabila masyarakat pedalaman di sepanjang bagian barat Palembang, dapat langsung dikatakan sebagai masyarakat perladangan.⁴³

Akan tetapi, untuk melihat karakteristik lingkungan fisik daerah Palembang, dapat disederhanakan menjadi pola *iliran* dan *uluan*, dua istilah yang lazim dipakai penduduk setempat untuk membedakan kawasan dataran rendah dan kawasan dataran tinggi Palembang.⁴⁴ Sebagai masyarakat perairan sungai, dan sudah barang tentu hidup dan akrab dengan sungai-sungai yang ada di sekitar mereka, masyarakat Palembang sudah lama memakai istilah *ilir* dan *ulu* untuk

⁴² Jangan bayangkan penanaman padi di *lebak* ini seperti penanaman padi sebagaimana yang dikenal secara umum yakni dengan menggunakan sistem irigasi. *Lebak* yang sering digenangi limpahan air sungai pada keadaan tertentu, yakni ketika genangan air berada pada ketinggian tertentu, amat cocok untuk ditanami padi. Oleh karena itu, tanpa irigasi dan curahan hujan, padi *lebak* ini dapat tumbuh dan dipanen dengan baik. Sampai masuk abad ke-20, beras "*lebak*" adalah komoditas perdagangan yang cukup dikenal di daerah ibukota. *Ibid*, hlm. 31.

⁴³ William Marsden, *Sejarah Sumatrat* terjemah A.S. Nasution & Mahyudin Mendim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1975), hlm. 359-360.

⁴⁴ Dalam karyanya Marsden memaksudkan dataran tinggi (*upland*) sebagai daerah pedalaman Palembang, lihat William Marsden, *Sejarah*, hlm. 360.

menunjukkan letak suatu tempat sesuai arah aliran sungai di tengah-tengah mereka.⁴⁵ Oleh pemerintah Kolonial, konsep *iliran* dan *uluan* dirumuskan kembali untuk membagi daerah aliran sungai terpenting dalam berbagai daerah administratif berdasarkan dwi-pembagian hilir dan hulu.

Di kedua kawasan itu, sampai menjelang 1860-an seiring dengan ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan Belanda di daerah pedalaman sampai penaklukan Pasemah, yakni salah satu masyarakat kesukuan yang berdiam di kawasan *uluan*, hampir tidak ditemukan jalan darat. Sistem sungai merupakan jaringan komunikasi utama. Itu pula alasan bahwa mayoritas penduduk menetap di tepi sungai-sungai besar yang banyak terdapat di Palembang. Selain itu, karena keberadaan sungai-sungai inilah, maka pada masa pemerintahan Keresidenan Palembang julukan *Batanghari Sembilan* masih saja melekat karena keberadaan sungai-sungai besar ini. Julukan ini merujuk ke sembilan sungai utama yang melintasi wilayah Palembang. Sembilan sungai itu adalah Sungai Klingi, Bliti, Lakitan, Rawas, Rupit, Batang Leko, Ogan, dan Komering yang akan bermuara pada Sungai Musi. Sembilan sungai tersebut berhulu di gunung-gunung yang terdapat di Bukit Barisan.

Apabila hubungan *iliran* dengan kota Palembang relatif mudah, maka hubungan *uluan* dengan kota Palembang tidak demikian. Perjalanan dari kota ke hulu sungai biasanya memakan waktu berminggu-minggu. Di samping itu, perhubungan dengan kota tersebut sangat tergantung dengan

⁴⁵ Istilah “masyarakat perairan sungai” ini adalah istilah yang digunakan oleh mestika Zed. Ia beralasan bahwa istilah “masyarakat perairan pantai” hanya relevan dan terbatas untuk periode tertentu di Palembang. “Konsep itu,” demikian menurutnya, “hanya menekankan eksistensi Palembang dari sudut hubungan dengan dunia luar dan kurang menjelaskan kaitan internal yang ada, karena masyarakat Palembang di daerah pantai sekalipun juga memiliki corak masyarakat agraris”. Lihat Mestika Zed, *Kepialangan*, hlm. 36.

musim. Permukaan air di musim hujan tinggi yang membuat sungai-sungai dapat dilayari sampai ke hulu, sedangkan permukaan air di musim kemarau rendah membuat pelayaran di *uluan* dihalangi oleh batang pohon.⁴⁶

2. Keadaan Administratif

Jatuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1821, membuat pemerintah kolonial mengambil kebijakan pemerintahan yang pada awalnya bersifat sentralistis. Sistem sentralistis yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ini sebenarnya bermatadua, karena sistem sentralistis hanya berlaku untuk struktur kekuasaan dari gubernur jenderal yang berkedudukan di Batavia, residen yang berkedudukan di keresidenan, dan kontroleur yang berkedudukan di onderafdeeling. Namun untuk tingkatan yang paling rendah dalam sistem ini di Keresidenan Palembang, yaitu marga, tetap memiliki corak desentralistis. Untuk itu, Pemerintah Kolonial Belanda mengubah Kesultanan Palembang dalam bentuk Keresidenan Palembang yang langsung dibawah kekuasaan seorang residen berkedudukan di Ibukota Palembang.⁴⁷

⁴⁶ Jaroen Peteers, *Kaum Tuo Kaum Mudo*, (Jakarta, INIS: 1997), hlm. 57.

⁴⁷ 14. Kops, G. .F. de Bruyn, 1919. *Overzicht van Zuid-Sumatra* (Amsterdam: De Bussy), hlm. 33-34. Sebetulnya sistem sentralistis ini mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-undang yang termuat dalam Staatsblad. Ketika pertama kali penerapan sistem sentralistik, Keresidenan Palembang menurut Keputusan Pemerintah Hindia Belanda yang termuat dalam Regeering Almanak tahun 1870 terbagi atas 9 Afdeeling. Kemudian pada tahun 1872, Afdeeling ini diperkecil menjadi 7 Afdeeling saja. Tetapi pada tahun 1878, Keresidenan Palembang kembali mempersempitnya menjadi 6 Afdeeling, di mana Palembang sebagai ibukota Keresidenan statusnya bukan lagi sebuah Afdeeling. Dari 6 Afdeeling, Keresidenan Palembang dipadatkan lagi menjadi 4 Afdeeling lewat penetapan dalam Staatsblad 1906 no. 466 dan Staatsblad tahun 1907 no. 528. Penetapan Keresidenan Palembang menjadi 3 Afdeeling saja seperti di atas, diatur dalam tiga Staatsblad yaitu Staatsblad 1918 no. 612, Staatsblad 1921 no. 465, dan Staatsblad 1930 no. 352. Pemadatan terhadap Afdeeling yang ada di

Daerah dibawah Keresidenan Palembang berupa wilayah afdeeling langsung dibawah kekuasaan seorang asisten residen yang berkedudukan di ibukota afdeeling. Keresidenan Palembang dibagi dalam daerah berbentuk afdeeling yang meliputi tiga afdeeling yaitu:

1. Afdeelingen Palembangsche Benedenlanden (Palembang Daerah-daerah Dataran Rendah) yang beribukota di Palembang.
2. Afdeelingen Palembangsche Bovenlanden (Palembang Daerah-da-erah Dataran Tinggi) yang beribukota di Lahat.
3. Afdeelingen Ogan en Komerling Oeloe yang beribu kota di Baturaja.

Daerah dibawah afdeelingdi Keresidenan Palembang berbentuk onderafdeeling yang kekuasaannya dipegang oleh seorang Controleur dan berkedudukan di ibukota onderafdeeling. Afdeelingen Palembangsche Benedenlanden kemudian terbagi lagi atas 5 (lima) onderafdeeling, yaitu:

Onderafdeeling Banjoe Asin en Koeboestrekendengan ibukota dan kedudukan kontroleur berada di Talang Betoetoe.

1. OnderafdeelingKomerling Hilir dengan ibukota dan kedudukankontroleurberada di Kajoe Agoeng.
2. OnderafdeelingOgan Hilir dengan ibukota dan kedudukan kon-troleurberada di Tandjoeng Radja.
3. OnderafdeelingMoesi Hilir dengan ibukota dan kedudukankontroleurberada di Sekajoe.
4. OnderafdeelingRawas dengan ibukota dan kedudukan kontroleurberada di Soeroe Langoen.

Keresidenan Palembang ini dilaksanakan oleh keberadaan Pemerintah Kolonial yang sudah diakui di kota Pusat Palembang, namun masih belum dapat berkuasa penuh di daerah pedalaman atau uluan¹⁵Asisten Residen Palembangsche Benedelandenkedudukannya dipusatkan di Palembang. Lihat dalam *Algemeene Memorie van Overgave* dari D.A.F.Brautgem dengan Surat Keputusan Gubernur tanggal, 3 Desember 1918 No. 13.

Afdeelingen Palembangse Bovenlandenterbagi atas 5 (lima) onderafdeeling, yaitu:

1. Onderafdeeling Lematang Hilir dengan ibukota dan kedudukan kontroleur berada di Moeara Enim.
2. Onderafdeeling Lematang Oeloe dengan ibukota dan kedudukan kontroleur berada di Lahat.
3. Onderafdeeling Pasemahlanden dengan ibukota dan kedudukan kontroleur berada di Pagar Alam.
4. Onderafdeeling Tebing Tinggi dengan ibukota dan kedudukan kontroleur berada di Tebing Tinggi.
5. Onderafdeeling Moesi Oeloe dengan ibukota dan kedudukan kontroleur berada di Moeara Bliti.

Afdeelingen Ogan dan Komering Oeloe terbagi lagi atas 3 (tiga) onderafdeeling, yaitu:

1. Onderafdeeling Komering Oeloe dengan ibukota dan kedudukan kontroleur berada di Martapoera.
2. Onderafdeeling Ogan Oeloe dengan ibukota dan kedudukan Kontroleur berada di Loeboek Batang.
3. Onderafdeeling Moeara Doea dengan ibukota dan kedudukan kontroleur berada di Moeara Doea.

Menariknya, dalam sistem Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ini, pemerintah tetap dijalankan dengan sistem dualistik, yaitu di satu sisi mereka menerapkan hukum negara, namun pada sisi lain mereka tetap mengakui adanya hukum adat. Sumber aturan (*rechtspraak*) di Keresidenan Palembang yang dualistik ini, secara kasat mata, tergambar sebagai berikut:

1. Mengikuti dari sumber hukum yang berasal dari gubernur (pusat), misalnya dasar hukum di Hindia Belanda yang termuat dalam *wetboeken* dan *reglement*.
2. Mengikuti sumber hukum sendiri, aturan adat. Adat ini menitikberatkan pada pemutusan perkara yang didahului dengan rapat marga atau rapat dusun. Hukum adat yang diakui ini tetap berjalan dengan sangat baik dalam sistem

yang paling rendah yaitu marga. Marga menjalankan pemerintahannya secara otonom dengan dasar adat istiadat, baik susunannya (*samenstelling*), bentuknya (*inrichting*) maupun kewenangannya (*bevoegdheden*) yang berdasarkan hukum adat.

3. Keadaan Ekonomi

Sesuai dengan letak geografis Kesultanan Palembang sebagai kesultanan yang bercorak maritime, maka perekonomian Kesultanan Palembang pun sangat dipengaruhi oleh system perdagangan baik dari luar maupun dalam negeri Palembang yakni dengan memanfaatkan system perairan. Pelabuhan Palembang dapat disinggahi oleh para pedagang dengan kapal-kapal dagang. Selain itu juga sungai-sungai yang ada memungkinkan pengangkutan barang-barang dari berbagai tempat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kesultanan Palembang menjalin kontak dagang dengan berbagai wilayah baik dalam dan luar negeri, diantaranya adalah : Pulau Jawa, Riau, Pulau Penang, Singapura, Malaka, Negeri syiam, Cina. Sejak lama juga Palembang disinggahi para pedagang-pedagang asing seperti Arab, Cina, Indi dan Persia.⁴⁸ Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan orang-orang Palembang baik masyarakat local maupun pendatang (Arab, Cina dll) menjadikannya sebagai mata pencahariannya yakni sebagai "Pedagang"

Pada umumnya barang-barang komoditi impor yang diperdagangkan oleh para pedagang tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Palembang. Diantara barang-barang impor antara lain adalah : kain linen, barang-barang dari Cina maupun Eropa seperti sutera, benang emas, panci-panci

⁴⁸ Ali Amin, dalam K.H.O Gadjah Nata, *Masuk Dan Berkembangnya islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI Press, 1986), 98.

besi, pecah belah, Obat-obatan, dan lain-lain. Selain itu barang-barang yang didatangkan dari Jawa dan Siam antara lain : minyak kelapa dan minyak kacang, gula jawa, bawang , asam, gula pasir, tembaga, besi dan lain-lain.

Adapun pedagang kain linen yang terbesar adalah orang-orang Arab, mereka kebanyakan mempunyai kapal dan perahu sendiri. Mereka ini kebanyakan dikenal sebagai pedagang perantara, karena mereka kebanyakan mengurus barang dagangan orang lain dari Palembang. Pedagang lainnya adalah orang-orang Cina.

Adapun pedagang yang berasal dari Palembang asli biasanya mereka itu adalah para pedagang yang mengambil barang dari orang-orang Arab dan Cina yang kemudian mereka perdagangkan kembali ke daerah pedalaman.

Sedangkan masyarakat pedalaman rata-rata menggarap bidang pertanian maupun berkebun. Hasil komoditi yang dapat diperdagangkan dari pedalaman diantaranya adalah ; lada, kopi, gambir, pinang, tembakau, nila dan tebu. Selain itu, beberapa produk hasil hutan serta produk hasil bumi yang dapat mereka kumpulkan dan kemudian diperjual belikan antara lain adalah ; rotan ikat, dammar, kapur barus, kemenyan, kayu lako, lilin, gading, pasir emas dll. Hasil-hasil yang diperdagangkan lainnya diantaranya adalah : ikan kering, ikan asin, jerami, tikar rotan, karung-karung, songket dan barang tenunan.

Oleh karena "songket" merupakan salah satu produk yang diperdagangkan, maka dapat dipahami bahwa masyarakat Palembang pada masa tersebut sudah mengusahakan produk kerajinan tangan yakni "menenun" sebagai salah satu mata pencaharian mereka.

Pada masa pemerintaha Sultan Mahmud Badaruddinn Jayo Wikramo (SMB I), komoditi dari hasil pertambangan dari Bangka yakni tambang timah sangat banyak memberi masukan

perekonomia Kesultanan Palembang. SMB II menggiatkan dan memperluas usaha penambangan timah di Bangka tersebut. Sedangkan pada masa Sultan Muhammad Baha'uddin penggalian timah di Pulau Bangka bertambah maju dan perdagangan juga dilaporkan kian berkembang. Perahu-perahu dagang dari Jawa, Riau, dan negeri Cina ramai sekali datang dan pergi dari Mentok. Oleh karena aktivitas atau lalu lintas perdagangan di Mentok kian ramai maka oleh Sultan Baha'uddin mengizinkan membuat mata uang dari timah yang dikenal dengan sebutan "pitis" yang dapat ditukarkan dengan mata uang perak maupun tembaga apabila mau ke luar negeri. (Ibid, 101)

Seiring dengan keberadaan imperialis dan kolonialis dari Eropa, perekonomian kesultanan Palembang juga ikut dipengaruhi oleh hubungan dagang Kompeni Belanda maupun Inggris. Kontrak-kontrak dagang pun dibuat sejak pertama kali Sultan I memerintah pada kesultanan Palembang Darussalam.

Sepertihalnya pada masa Sultan Abdurrahman, yang beberapa kali mengadakan perubahan-perubahan kontrak dagang dengan Kompeni Belanda. Sumber Katalog Palembang N0. 41.6 menyebutkan adanya kontrak dagang tersebut, yakni ; *Renovasi den Contracten met de Koningen van Palembang dee 1622, 1678, 1679, en 1684 det 25 Januari 1691* . Kontrak ini berisi masalah perdagangan lada.⁴⁹

Adapun pada masa Sultan Mahmud Baha'uddin (Orang tua SMB II) dibuat juga satu perjanjian antara Sultan dengan Gubernur Jendral Me Willem Arnold Alting. Hal ini dapat di lihat dalam sumber Katalog Palembang 41/11 , yakni ; *Original Acte van renovatie der voorige Contracten met koningen van Palembang, met den Paduka seri Sulthan Ratu Muhammad*

⁴⁹ Arsip Nasional RI. Katalog Palembang N0. 41.6

Baha'uddin, en den Kroon prins Pangeran Ratu, op den 31 augustus 1791 en 28 Nopember 1791, yang isinya antara lain adalah ;

1. Monopoli lada yang bersih dengan harga enam real di gudang Kompeni di Betawi.
2. Jaminan keselamatan tanaman lada di daerah Kesultanan Palembang.
3. Pengadaan dalam tanam pertama 2000 pikul yang berat 125 pond *olanda*, tahun kedua dan ketiga 3000 pikul, tahun keempat kelima keenam dan seterusnya 4000 pikul.
4. Disamping itu juga bangsa lainnya yang berkulit putih dilarang untuk singgah atau berniaga di Pulau Bangka.
5. Syahbandar juga diminta untuk turut membantu memberantas penyelundupan lada, timah, opium serta kain.
6. Kompeni memberika izin kepada rakyat untuk berlayar, dengan ketentuan tidak boleh singgah di banten, dipihak *masyrik* (timur) Betawi sampai sepanjang *lor* (selatan) tanah Jawa. Ke pihak *maghrib* (barat) sampai di Malaka akan diperkirakan oleh Gubernur Jendral atas permintaan Sultan. Sultan boleh memberi izin ke negeri Siam kecuali ke bagian utara Siam.
7. Pelayaran dari dan ke negeri Cina di larang.
8. Orang-orang Kompeni yang mencuri lada harus dilaporkan oleh Sultan kepada Gubernur Jendral. Menjamin keamanan laut Bangka dan Belitung.⁵⁰

Bila memperhatikan isi perjanjian di atas, jelas kelihatan bahwa pihak Kesultanan Palembang dalam kondisi tertekan. Maka hal yang wajar jika akhirnya muncul kericuhan antara Pihak kesultanan Palembang dengan pihak Kompeni Belanda sebagai akibat pelaksanaan kontrak tersebut. Hal tersebut juga merupakan salah satu alasan sehingga sering terjadi adanya

⁵⁰Arsip Nasional RI, Katalog Palembang 41/11

perubahan/pembaharuan kontrak-kontrak dagang maupun persahabatan pada masa Kesultanan Palembang.

Terjadinya perubahan atau pembaharuan dalam kontrak-kontrak persetujuan persahabatan maupun perdagangan pada masa Kesultanan Palembang salah satunya adalah disebabkan oleh karena adanya pergantian tahta Kesultanan. Selain itu ada beberapa hal bila kita cermati dari isi kontrak-kontrak tersebut menjadi penyebab perubahan dan pembaharuan, diantaranya adalah :

1. Ditemukannya mutu lada yang kurang atau tidak baik di mata Kompeni Belanda.
2. Cara pembayaran yang kurang tepat oleh Kompeni Belanda yang disebabkan antara lain karena kurangnya mata uang real (*spaanse matten*)
3. Tingginya barang-barang dagangan Kompeni Belanda yang harus dibeli oleh pihak Kesultanan Palembang.
4. Jatah barang-barang yang sering lebih dari tiga kali tidak mencapai target yang ditetapkan.
5. Masalah keamanan, adanya pencurian, perompakan dll.
6. Penyelundupan.

Pada masa kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II (1804-1821) kebijakan dalam masalah perekonomian mengalami hal yang baru, sebab pada masa ia memerintah Kompeni Belanda telah dibubarkan tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799 yang kemudian diambil alih segala urusan oleh Kerajaan Belanda. Sultan Mahmud Badaruddin II dikenal sebagai pribadi yang mempunyai watak kesatria, pemberani, cepat dalam bertindak, berpendirian yang teguh, alim, sabar serta taqwa kepada Allah SWT. Selain itu ia dikenal juga seorang yang mahir dalam hal karang-mengarang dalam bidang sastra, ahli perang yang cekatan serta tentunya anti Kolonialisme. Sehingga dengan demikian tentunya kebijakan-kebijakannya (termasuk

dalam bidang perekonomian) sangat tidak mau Kooperatif dengan pihak Kolonial Belanda.

Pada kurun waktu 1804 -1821 pada masa kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddinn II penuh terjadi adanya konflik diantara elit politik, sehingga kurun waktu tersebut terjadi saling adanya pergantian penguasa di Kesultanan Palembang yakni antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan adiknya yakni Raden Husin Dhiyauddin (kemudian ia diberi gelar dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II yang memerintah dari tahun 1812-1813). Konflik yang terjadi pada masa tersebut tentunya tidak lepas dari pengaruh adanya pihak Inggris maupun Kolonial Belanda yang menguasai wilayah Kesultanan Palembang pada masa itu.

Dalam situasi konflik dan seringnya terjadi peperangan antara pihak Kesultanan Palembang dengan Kolonial Belanda maupun Inggris pada kurun waktu tersebut tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat Palembang pada masa itu. Peperangan tentunya banyak menelan selain tenaga juga biaya yang tidak sedikit. Dalam situasi demikian tentunya seorang penguasa menjadi tidak konsentrasi untuk mengurus atau memperhatikan aspek perekonomian di wilayahnya. Hal demikian tentunya beralasan jika pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II tidak mewariskan atau meninggalkan bangunan yang monumental seperti, masjid ataupun bangunan monumental lainnya, seperti halnya pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I (SMB I Jayo Wikramo).

4. Keadaan Sosial Masyarakat

4.1 Kawasan Iliran

Wilayah Kesultanan Palembang mencakup daerah Propinsi Palembang sekarang ini, yang berbatasan dengan Propinsi Lampung, Bengkulu dan Jambi. Menurut Woelders wilayah negeri Palembang meliputi segala huluan batanghari

sembilan dan negeri-negeri di luar Palembang, seperti pulau Bangka dan Belitung⁵¹. Daerah Batanghari Sembilan adalah daerah sembilan sungai utama yang hampir semuanya bermuara di sungai Musi, kecuali sungai Banyuasin. Sungai-sungai tersebut merupakan alat transportasi dari pusat Kesultanan Palembang ke daerah pedalaman yang kaya akan berbagai hasil produk perkebunan (lada, kapas, gambir), emas, hasil hutan (rotan) dan juga padi. Pusat pemerintahan kesultanan adalah kota Palembang. Kota Palembang merupakan bandar yang sangat strategis, karena letaknya di kedua tepi sungai Musi yang lebar dan dalam, sehingga dapat dilayari oleh kapal-kapal sampai jauh ke pedalaman

Oleh karena itu Palembang merupakan kota bandar, maka sejak lama bahkan sejak masa kerajaan Sriwijaya daerah ini ramai dikunjungi oleh orang-orang baik dari Arab, Tionghoa, India maupun Jawa untuk keperluan perdagangan. Faktor perdagangan nampaknya menjadi salah satu alasan mengapa daerah Palembang banyak didatangi orang-orang dari luar daerah maupun daerah Palembang banyak didatangi orang-orang dari luar maupun negara lain. Sebagian dari pendatang tersebut selanjutnya ada juga yang menetap di daerah Palembang dan kemudian berasimilasi dengan penduduk asli.

Kedatangan orang-orang dari berbagai daerah maupun dari negara lain seperti Arab, Tionghoa, dan India, tentunya merubah struktur demografi di Palembang. Keberadaan mereka yang membaaur dan berasimilasi tentunya sangat berpengaruh bagi penduduk asli di Palembang, dalam hal agama, budaya maupun dalam hal lainnya. Dari segi agama misalnya, para

⁵¹ M.O Woelders, *Het Sultanaat Palembang 1811-1825* (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975) hlm. 74.

pedagang-pedagang terutama dari Arab berperan dalam proses Islamisasi di Palembang.

Orang Arab menurut Sevenhoven, pada masa awal pemerintahan Kolonial Belanda berjumlah kurang lebih 500 jiwa yang kebanyakan mempunyai rumah sendiri dan mengelompokkan dalam suatu kampung.⁵² Mereka dikenal sebagai pedagang kain (terutama kain linen) terbesar, dan diantara mereka banyak yang mempunyai kapal sendiri maupun perahu. Selain itu mereka juga dikenal taat beragama, rajin melaksanakan sholat, berpuasa, mengerjakan berbagai kewajiban lainnya. Pada masa kesultanan, mereka mendapat perhatian dari Sultan Palembang karena dipandang sebagai ulama Kesultanan yang bertugas sebagai penasehat dalam bidang keagamaan. Ada juga diantara mereka yang mendapat gelar pangeran seperti pangeran Umar. Perkampungan orang Arab ini biasanya dikepalai oleh salah seorang dari mereka yang biasanya diberi gelar "pangeran" seperti Syarif Pangeran Abdul Rahman Bin Hassan Al-Habsyi. Selain itu banyak orang Arab di anggap ahli agama (Islam) dan mubalikh.

Adapun orang Tionghoa termasuk banyak yang menetap di Palembang. Menurut perkiraan Sevenhoven diawal pemerintahan Kolonial Belanda jumlah mereka kurang lebih 800 jiwa. Mereka biasanya tinggal di rakit-rakit yang dibangun sebesar dan seluas yang dikehendaknya. Sevenhoven juga menjelaskan bahwa orang harus bersedia tinggal di rakit. Adapun alasan dari ketentuan tersebut adalah pihak Kesultanan Palembang khawatir jika mereka tinggal di Palembang dengan catatan mereka harus bersedia tinggal di daratan mereka akan membahayakan. Sedangkan apabila mereka tinggal dirakit bambu, maka dengan mudah mereka dapat dikuasai hanya

⁵² J.I. van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang* (Djakarta: Bhratara 1971), hlm.33.

dengan membakar rakit-rakit tersebut.⁵³ Oleh karena mereka tinggal di rakit maka pekerjaan mereka hampir seluruhnya berdagang. Mereka memperdagangkan barang becah belah dari Tionghoa, Sutera kasar, benang emas, obat-obatan, manisan dan lain-lain. Adapun sejak kapan orang Tionghoa di izinkan untuk bertempat tinggal di darat, belum dapat diketahui dengan pasti, namun demikian dapat diduga semenjak Palembang berada dibawah kekuasaan Kolonial Belanda. Beberapa orang Tionghoa ada yang telah memeluk agama Islam, diantara mereka kadang mendapat gelar "demang". Orang-orang Tionghoa ini dipimpin oleh seorang yang disebut dengan "Kapitan Tionghoa".

Orang Hindustan jumlahnya tidak begitu banyak, mereka biasa disebut orang keling dan ada juga yang menyebutnya dengan orang tambu. Rata-rata mereka hidup dengan berdagang. Sedangkan orang Eropa yang bertempat tinggal di Palembang kebanyakan orang Inggris dan Belanda. Mereka tinggal di loji yang dibuat secara khusus. Namun diantara mereka ada juga yang tinggal dirakit atas kehendaknya sendiri. Rakit mereka terbuat dari kayu, beratap genting dan lebih lebar dan rapi dibandingkan dengan rakit orang Tionghoa, dalam usaha perdagangan mereka membeli rempah-rempah, hasil hutan dan berbagai kerajinan.

Penduduk pribumi dapat dikelompokkan menjadi dua yakni, penduduk di ibukota Palembang sebagai pusat kesultanan, serta penduduk daerah pedalaman. Penduduk kota Palembang sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, golongan priyayi dan rakyat biasa. Stratifikasi sosial ini bukan berdasarkan usia ataupun jabatan seseorang, namun berdasarkan keturunan dan kedekatan dengan keluarga Sultan.

Golongan priyayi adalah golongan turunan raja atau kaum ningrat. Kedudukan priyayi diperoleh karena kelahiran

⁵³*Ibid*, hlm.21

(keturunan) dan dapat juga karena perkenan raja/sultan. Golongan priyayi terdiri atas tiga tingkatan yakni: *pangeran*, (diberikan kepada putra sultan yang dikehendaki sultan), *raden*, dan *masagus*.⁵⁴ Golongan penduduk yang kedua adalah rakyat biasa, dalam golongan ini terbagi juga dalam tiga tingkatan yakni : kemas, kiagus dan rakyat jelata⁵⁵

Apabila *iliran* dipukul rata dalam makna sebagai daerah dataran rendah yang aliran air mengalir ke arah itu sebelum masuk ke laut, maka dapat dipastikan bahwa kawasan tersebut adalah sebuah kawasan yang membentang luas dari pantai timur wilayah Keresidenan Palembang sampai jauh masuk ke dalam wilayah pedalaman. Dalam wilayah yang seluas ini, pada masa kesultanan, terdapat wilayah *sikep* dan *kepungutan*.

Sikep adalah wilayah pedalaman yang paling dekat dengan ibukota dan karena itu langsung diperintah oleh bawahan sultan yang dikenal dengan istilah *jenang* dan *raban*.⁵⁶

⁵⁴*Pangeran* berarti yang memerintah, *raden* berarti yang dijunjung atau yang dicintai dan gelar ini diberikan kepada anak laki-laki dari hasil perkawinan seorang pangeran dengan anak perempuan seorang pangeran serta berlaku secara otomatis. 'Mas Agus' berarti berharga banyak dan gelar ini diberikan kepada anak laki-laki dari hasil perkawinan seorang pangeran dengan perempuan rakyat biasa. Lihat Heryani dkk, *Gelar Kebangsawanan Kaitanya Dengan Rumah Limas* (Palembang : Depdikbud, 1994).

⁵⁵Kemas adalah gelar yang diberikan kepada anak laki-laki dengan perkawinan dengan seorang masayu dengan seorang pria dari rakyat jelata. Sedangkan kiagus adalah gelar yang diberikan kepada anak laki-laki dari mantra dan turunan raden yang terendah dengan rakyat jelata. *Ibid*

⁵⁶ Keluarga sultan sangat besar, sedangkan tidak semua dari mereka dipakai sebagai pegawai keraton kesultanan. Kebalikan dari itu adalah sebagai bagian dari keluarga mereka yang tidak terpakai ini pun memerlukan mata pencaharian. Oleh karena itu, mereka yang tidak terpakai dimanfaatkan sebagai pegawai kesultanan yang membawahkan dusun-dusun di wilayah *sikep*. Tugas mereka bukan saja sebagai seorang pemungut pajak untuk sultan, namun juga sebagai penguasa yang berperan sebagai perantara antara rakyat di dusun-dusun *sikep* (dan ada juga beberapa di marga-marga *kepungutan*) dengan sultan di ibukota. Di tangan para *jenang* dan *raban*, semua urusan berada. Beda antara *jenang* dengan *raban* terletak pada faktor kekerabatan. Jabatan *jenang* diberikan kepada seorang priyayi,

Di dalam wilayah ini, terdapat dusun-dusun yang lepas dari *marga*⁵⁷ atau tidak dibawah sebuah *marga* pun. Dusun-dusun tersebut terletak di muara-muara sungai yang strategis. Masing-masing dusun memiliki tugas-tugas khusus untuk sultan; seperti dusun yang khusus menyediakan tukang kayuh perahu sultan, atau menyediakan tukang kayu keraton, atau yang menyediakan calon-calon prajurit untuk sultan, dan lain-lain. Tugas-tugas yang mereka lakukan itu disebut dengan *gawe rajo*, orang yang melakukan tugas-tugas itu disebut dengan *matogawe*. Oleh karena itu, dusun-dusun tersebut dibebaskan dari berbagai macam bentuk pajak.

Di luar wilayah *sikep*, yakni lebih ke arah pedalaman lagi, terdapat *kepungutan*. Wilayah ini terdiri dari *marga-marga* yang merupakan kantong-kantong pajak bagi kesultanan di daerah pedalaman. Para penduduk *kepungutan* berada langsung di bawah kekuasaan sultan. Penduduk *kepungutan* biasa disebut dengan *matopajeg*. Para *jenang* atau *raban* yang kebetulan juga menjadi *pasirah*⁵⁸ di wilayah *kepungutan* bertugas memungut

sedang *raban* kepada orang yang memiliki derajat yang lebih rendah dari itu. Lihat Sevenhoven, *Lukisan Tentang*, hlm. 30.

⁵⁷ Istilah “marga”, menurut Muslimin, pertama kali didapati dalam piagam-piagam Sultan-Sultan Palembang sejak sekitar tahun 1760. Pegawai-pegawai Inggris sendiri; seperti Marsden, Court dan Raffles bahkan Wallace yang sempat singgah di Palembang (1861 – 1862), tidak pernah menyebut ini di dalam karya-karya mereka. Istilah yang mereka gunakan adalah “propinsi” yang tergabung ke dalam “distrik-distrik” di pedalaman Palembang. “Marga” diyakini oleh Muslimin berasal dari sebuah kata Sansekerta, “varga”, yang mengandung arti sebagai sebuah wilayah tertentu dan juga sebagai sebuah rumpun atau keluarga. Lihat Amrah Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Propinsi Palembang* (Palembang: Pemda Palembang, 1986), hlm. 9 dan 15.

⁵⁸ Dalam penelitiannya, Barlian menduga bahwa istilah *pasirah* berasal dari sebuah kata Jawa, *sirah*, yang berarti kepala. Bagaimana pun, tambahnya, benar-tidaknya istilah ini perlu mendapat perhatian untuk penelitian lebih lanjut. Lihat Saudi Barlian, *Pengelolaan Tradisional Gender:*

pajak juga dari tiap penduduk *marga*. Itulah sebab kenapa wilayah ini disebut *kepungutan* yang berasal dari kata *pungut*; yakni dipungut atau dapat juga diartikan sebagai yang dilindungi karena berada di bawah kesultanan langsung.⁵⁹

Dalam membicarakan keadaan sosial-masyarakat kawasan *iliran*, tentu tidak akan dapat lepas dari membicarakan karakter masyarakat kawasan *sikepdan* dan kawasan *kepungutan* tersebut. Status masyarakat yang berdiam di kedua wilayah tersebut adalah sebagai *matogawe* dan *matopajeg* bagi sultan di ibukota. Dikatakan sebagai *matogawe* karena mereka dikenai kewajiban untuk bekerja pada sultan di ibukota, sedangkan dikatakan *matopajeg* karena mereka dikenai kewajiban untuk membayar pajak kepada sultan melalui wakil-wakil sultan di daerah pedalaman yang disebut dengan *jenang* dan *raban*. Penduduk wilayah *sikep* dan *kepungutan* pada masa itu menganggap sultan sebagai pemilik tanah. Adapun mereka sendiri adalah sebagai penunggu tanah sultan atau dengan istilah setempat disebut *tunggu tanah rajo*. Mereka tidak boleh memiliki dan menguasai tanah tersebut. Mereka hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan dan karena itu mereka pun diwajibkan untuk memberikan tenaga dan hasil pertanian dalam jumlah tertentu untuk sultan di ibukota. Bagi penduduk *sikep*, yang mereka berikan adalah tenaga dan/atau kerja. Adapun bagi penduduk *kepungutan*, yang mereka berikan adalah pajak berupa hasil bumi baik yang berupa hasil dari sawah-sawah, kebun-kebun, ataupun segala sesuatu yang dapat dihasilkan dari halaman rumah mereka.⁶⁰

Telaah Keislaman atas Naskah Simbur Cahaya(Jakarta: Millenium Publisher, 2000), hlm. 19.

⁵⁹ Djohan Hanafiah, *Melayoe-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.3-5.

⁶⁰ P. De Roo de la Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang* terj. Soegarda Poerbakawatja (Jakarta: Bhratara, 1971), hlm. 41 dan 43.

Kepada sultan diberikan padi dan merica. Pajak hasil bumi ini diserahkan sampai ribuan gantang per *marga* yang dikenakan. Akan tetapi, tidak sembarangan orang dapat dikenakan kewajiban sebagai *matogawe* dan *matopajeg*. Hanya penduduk yang telah dapat bekerja, sudah menikah, bertempat tinggal sendiri, dan bertanggung-Jawab dalam memenuhi kewajiban sebagai *matogawe* dan *matopajeg* kepada sultan yang dikenai kewajiban itu. Selain itu, seseorang yang kebetulan berada di suatu tempat (*orang menumpang*) yang sedang dikenai kewajiban-kewajiban dari sultan, padahal ia bukan penduduk setempat, maka tidak dikenai kewajiban-kewajiban tersebut.

Penduduk *iliran* yang dikenai kewajiban untuk melakukan kerja bakti untuk sultan di ibukota biasa bekerja bukan saja untuk kepentingan umum, namun termasuk juga kerja untuk kepentingan-kepentingan pribadi sultan. Guna keperluan kerja bakti ini, terkadang sampai berbulan-bulan para wajib kerja itu berada di ibukota dengan biaya sendiri. Hal itu karena para wajib kerja ini telah mendapatkan bayaran dari sultan melalui hasil-hasil sawah, kebun, dan halaman rumah mereka. Akibat dari hal tersebut adalah tidak sedikit pula yang kehabisan bekal dan terpaksa berhutang di sana. Apabila hutang tersebut tidak dapat dilunasi, karena lazim berbunga sampai tiga kali lipat dari hutang pokok, maka yang memiliki hutang terpaksa menebus hutang itu dengan menjadi budak dari penduduk setempat yang menghutangnya. Menurut Sevenhoven, penduduk setempat yang dimaksud adalah para *jenang* dan *raban* yang membawa tenaga wajib kerja tersebut ke ibukota. Dengan keadaan yang diwarisi seperti itu, dapat dipahami pula mengapa pemerintah Kolonial Belanda sejak sebelum 1825 demikian mudah menguasai kawasan *iliran* dan

mulai memerintah di sana tanpa ada perlawanan berarti dari penduduk setempat.⁶¹

Penduduk *iliran*, yang sering merujuk ke ibukota Palembang, sudah sejak semula merupakan kelompok masyarakat yang dilahirkan dengan bakat dagang mengingat susunan geografis atau keterbatasan lingkungan alam dan struktur kekuasaan yang diberlakukan pihak kesultanan.⁶² Mereka tidak dapat lepas dari tanah sebagai modal untuk mata pencaharian masing-masing. Akan tetapi, hasil yang mereka dapatkan biasa dibawa menghilir ke ibukota Palembang untuk diperdagangkan di sana atau dibeli oleh para pedagang perantara yang mendatangi langsung kawasan *iliran*, setelah dikurangi dengan beban pajak baik pada masa kesultanan atau pun ketika pemerintahan kolonial Belanda mulai berada. Tidak seperti penduduk dataran tinggi yang tidak mudah untuk menghilir ke ibukota, berdagang adalah sesuatu yang masuk akal bagi penduduk *iliran* mengingat keadaan mereka seperti itu. Apalagi, kawasan *iliran* sering terkena banjir dari air sungai yang pasang, sehingga hasil pertanian mereka tidak pernah berkembang leluasa. Penghapusan sistem kesultanan, yang sering mengerjai dan memajaki mereka, merupakan batas waktu yang logis bagi penduduk *iliran* untuk berkembang lebih jauh dalam dunia perdagangan yang berpusat di ibukota.

Konflik berkepanjangan dari 1811 sampai 1821⁶³ adalah faktor penting yang membuat para priyayi di ibukota melarikan

⁶¹ Severhoven, *Lukisan Tentang*, hlm. 53.

⁶² Mestika Zed, *Kepialangan, Politik dan Revolusi: Palembang 1900–1950*(Jakarta: LP3ES. 2003), hlm. 36.

⁶³ Konflik itu dimulai oleh pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Sultan Mahmud Badaruddin II terhadap orang-orang VOC pada tanggal 14 September 1811. Setahun setelah itu, Palembang jatuh ke tangan pasukan ekspedisi Inggris. Keberadaan Inggris di Palembang membuat adik Sultan Mahmud Badaruddin II, Pangeran Ahmad Najamuddin, bersedia berunding dan mengadakan perjanjian untuk membagi kekuasaan; Inggris mendapat

diri ke *iliran* sebagai kawasan terdekat dari ibukota, sehingga adalah sebuah kewajaran apabila pengaruh-pengaruh dari luar Palembang akan berimbas pada kehidupan di *iliran* lebih dulu daripada di *uluan*. Hal ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sarana transportasi di *iliran* relatif lebih mudah daripada di *uluan*. Sampai tahun 1866, pembukaan jalan darat belum dilaksanakan pemerintah. Akan tetapi, transportasi melalui sungai di *iliran* sangat mudah. Oleh karena kemudahan itu, perubahan yang terjadi dalam masyarakat *iliran* sangat mencolok. Menurut Peeters, norma-norma yang berkembang di ibukota amat mudah diterima dan berkembang di *iliran*. Sebagai agen norma-norma tersebut adalah para mantan bangsawan Kesultanan Palembang yang melarikan diri itu. Tidak saja oleh lapisan atas penduduk *iliran*, penduduk biasa pun dapat mudah menerima sesuatu yang dibawa oleh mereka. Lebih jauh lagi,

Bangka-Belitung dan Pangeran Ahmad Najamuddin diakui sebagai Sultan Palembang menggantikan Sultan Mahmud Badaruddin II. Sultan Mahmud Badaruddin II yang mengungsi ke pedalaman ketika penyerbuan ekspedisi Inggris tetap mengadakan perlawanan dari sana. Sampai kemudian diadakan perjanjian pada tanggal 29 Juni 1812. Dengan perjanjian ini kekuasaan Inggris atas Bangka-Belitung dilanjutkan, sedangkan Pangeran Ahmad Najamuddin diturunkan dari tahtanya untuk digantikan kembali oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Akan tetapi, pada tanggal 4 Agustus 1813, Raffles yang berkedudukan di Batavia mengeluarkan keputusan untuk mengangkat kembali Pangeran Ahmad Najamuddin sebagai sultan. Keadaan ini kemudian dibalikkan oleh Belanda pada 1818 dengan mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II. Akibat yang ditimbulkan adalah Pangeran Ahmad Najamuddin yang dibelakangkan Belanda berusaha mengadakan perlawanan dengan meminta bantuan Inggris. Permasalahan ini reda, namun mulai timbul pergolakan dari pedalaman akibat ekspedisi Belanda di sana (pada 1819) untuk menanam kekuasaan. Terjadilah peperangan antara pihak Belanda dengan pihak Sultan. Belanda beberapa kali mengirimkan ekspedisi ke pedalaman Palembang untuk menumpas perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II sampai tahun 1821. Ketika itu pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jendral de Kock berhasil memaksa sultan untuk menyerah pada Juni 1821. Pada tanggal 3 Juli 1821, Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarganya dibawa ke Jawa dan dibuang ke Ternate pada tahun 1822, lihat ANRI, *Laporan Politik*, hlm. 22-24.

demikian Peeters mengatakan, keberadaan para mantan bangsawan tersebut memancing juga para pedagang di ibukota untuk mengunjungi kawasan *iliran* untuk kepentingan dagang mereka.⁶⁴

Mengenai para pedagang dari ibukota ini, di *iliran* keberadaan orang-orang Tionghoa sedikit lebih baik dibandingkan dengan orang-orang asing yang lain. Mereka dijadikan perantara antara orang-orang barat (Belanda) dan orang-orang pribumi. Komoditas yang mereka perdagangkan antara lain kopi, lada, dan beras. Selain orang Tionghoa, orang asing dari ibukota yang juga turut berdagang ke *iliran* adalah orang-orang Arab. Pusat dari aktifitas perdagangan mereka adalah di Kota Palembang. Hal ini tentu berbeda dengan orang-orang Tionghoa. Sejak masa kesultanan, orang-orang Arab lebih diterima oleh kalangan kesultanan ketimbang orang-orang Tionghoa. Puncak dari penerimaan itu adalah dengan pengangkatan beberapa orang-orang Arab tersebut sebagai ulama di keratin.⁶⁵ Hak yang diberikan oleh pihak kesultanan membuat mereka leluasa untuk aktif berdagang di ibukota. Mereka pun memiliki kampung sendiri (kampung Arab). Keadaan ini membuat pedagang-pedagang Tionghoa terpinggirkan dan kemudian beralih ke kawasan *iliran*. Tentang keadaan mereka seperti ini, dapat terlihat dari cara hidup mereka yang ada di atas rakit-rakit.⁶⁶

4.2 Kawasan *Uluan*

Kawasan *uluhan* adalah daerah dataran tinggi yang membujur dari arah utara ke selatan di bagian barat Keresidenan Palembang dan membatasi langsung dengan wilayah Bengkulu. Dikatakan membatasi, karena hulu sungai-

⁶⁴ Jaroen Peteers, *Kaum Tuo*, hlm. 71-73.

⁶⁵ Mestika Zet, *Kepialangan*, hlm. 39.

⁶⁶ Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibukota*, hlm. 33.

sungai utama di Palembang berada di daerah pegunungan yang terletak di perbatasan Palembang dengan Bengkulu. Pada masa kesultanan, di kawasan ini terdapat wilayah *sindang*. *Sindang* yang berarti perbatasan memiliki peran sebagai penjaga perbatasan wilayah. Penduduk *sindang* sendiri memiliki kedudukan sebagai mitra di hadapan sultan. Mereka tidak tunduk sebagaimana penduduk *kepungutan*. Oleh karena itu, mereka tidak dibebani pajak dan beban-beban lain dari sultan. Karena berupa masyarakat kesukuan, mereka hanya diikat oleh kesadaran diri melalui kepala-kepala suku mereka untuk minimal sekali dalam tiga tahun pergi ke ibukota menemui sultan. Penghadapan seperti ini biasa disebut dengan *milir seba*.⁶⁷ Untuk membalas jasa mereka dalam menjaga perbatasan, sultan mengirim berbagai macam pemberian kepada penduduk *sindang* seperti garam, candu, dan bahan baku untuk membuat perahu.⁶⁸

Kedudukan dan peran historis yang dimiliki oleh penduduk *uluan* pada masa kesultanan membuat mereka merasa diri berbeda dengan penduduk di *iliran*. Mereka sering menganggap diri sebagai kelompok etnik sendiri. Keadaan penduduk *uluan* itu justru sering jadi perlambang tentang sikep

⁶⁷*Milir Seba* memang bukan sebuah kewajiban kepada sultan. Akan tetapi, bukan sebuah hal yang khusus bagi kepala-kepala suku di *uluan* saja *milir seba* ini, karena kepala-kepala marga di *iliran* juga menjalani tradisi ini. Se jauh ini, bahwa *milir seba* dianggap hanya dilakukan oleh kepala suku dan marga di *uluan* merujuk pada karya Faille (1971: 28). Padahal konteks pembicaraan Faille di sana adalah kebiasaan *milir seba* yang dilakukan oleh kepala suku Pasemah dan bukan *milir seba* yang hanya dilakukan oleh kepala suku dan marga di *uluan*. Keterangan tentang *milir seba* bagi kepala-kepala marga di *iliran* ini dapat dilihat dalam uraian Sevenhoven ketika sedang membicarakan tentang kebiasaan jelek *jenang* atau *raban* di ibukota (1971: 53). Penulis berhutang banyak pada Zen Zanibar yang telah memberi tahu dan menyadarkan penulis tentang hal ini.

⁶⁸ Djohan Hanafiah, *Melayoe-Jawa: Citra Budaya*, hlm.3-5. Lihat juga William Marsden, *Sejarah Sumatra*, hlm. 360; Sevenhoven, *Lukisan Tentang*, hlm. 30; Mestika Zed, *Kepialangan*, hlm. 44.

keterbelakangan mereka di mata penduduk *iliran*.⁶⁹ Dalam kehidupan penduduk *uluan*, sistem kekerabatan masih dipandang kuat. Sistem kekerabatan yang biasa disebut dengan *kejuraian* menjadi acuan bagi kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Menurut Peeters, kunci untuk memahami masyarakat *uluan* adalah *kejuraian*. *Jurai* yang berarti keturunan adalah bentuk kekerabatan yang menganalogikan kepada sebuah rumah tangga. Ketika sang ayah meninggal, maka semua saudara laki-laki mendapat harta warisan tanpa dibagi sama sekali. Tanah yang termasuk harta warisan akan dimanfaatkan bersama. Putra tertua dari sang ayah tersebut biasa dijadikan sebagai pemimpin kelompok dengan nama *jurai tuo*. Akan tetapi, tidak selalu putra tertua yang diangkat sebagai *jurai tuo*. Apabila di antara para pewaris ada yang memiliki kemampuan lebih, maka ia dapat diangkat sebagai *jurai tuo*, meskipun hal seperti ini termasuk menyimpang dari kebiasaan. Sebagai seorang *jurai tuo*, tugas mengelola dan menanggungJawabi milik bersama *kejuraian* dipegang olehnya. Semua yang dimiliki bersama ini tidak boleh diperdagangkan tanpa sepengetahuan semua anggota *kejuraian*.⁷⁰

Poros utama dalam *kejuraian* adalah *pyang*. *Poyang* sebagai orang pertama dalam struktur *kejuraian* adalah seseorang pada kedudukan nenek moyang. *Poyang* inilah yang dalam uraian sebelum ini dianggap sebagai sang ayah dalam sebuah *kejuraian*. Kedudukan keluarga terhormat ditentukan oleh garis keturunan nenek moyang itu yang juga sebagai pendatang awal di tempat tersebut. Darinya, turun-temurun jabatan kepala suku diwariskan. Adapun masyarakat kesukuan

⁶⁹ Sutan Takdir Alisjahbana yang pernah ditugasi menjadi guru pada salah satu daerah di *uluan* sempat mengabadikan kenyataan ini di dalam salah satu novelnya, *Dian yang Tak Kunjung Padam* terbitan Balai Pustaka tahun 1938.

⁷⁰ Jaroen Peteers, *Kaum Tuo Kaum Mudo*, hlm. 46.

kawasan *sindang*, sebagaimana sudah disebutkan, mereka hanya tunduk pada kepala-kepala suku. Dalam keadaan seperti ini, *pyang* secara tidak langsung menjadi dasar ideologis yang sering digunakan oleh para kepala suku itu untuk melawan kekuasaan pemerintah Kolonial. Sampai pada batas tertentu, masyarakat setempat sering mengadakan upacara pemujaan kepada *pyang* melalui perantaraan seorang dukun, meski bentuk pemujaan itu hanya terbatas pada wilayah yang dipengaruhi oleh *pyang* tersebut. Selain itu, *pyang* juga menentukan kepemilikan berikut pewarisan tanah dan hubungan perkawinan. Oleh karena itu, *pyang* memiliki pengaruh psikologis yang besar dalam *kejuraian*.

Kedudukan *pyang* yang bahkan sampai menjadi pusat dalam sistem kepercayaan pada masyarakat *uluan*, dapat dikatakan luar biasa. Bahkan di Pasemah, penduduk setempat takut berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan para *pyang* terlebih lagi apabila meninggalkan atau mengabaikannya.⁷¹ Akan tetapi, keberlangsungan hal tersebut dapat juga diberi penjelasan logis. Dalam memori serah terima jabatan Kontrolir O.B. Gunther yang dikutip Peeters, keterbatasan hubungan ibukota Palembang dengan *uluan* bertahun-tahun bahkan berabad-abad membuat keadaan seperti itu. "Makin dekat ke Palembang", demikian tulis Gunther, "orang kelihatan makin saleh." Apabila pernyataan ini dinegasikan "yakni semakin jauh dari ibukota, orang-orang akan kelihatan semakin tidak saleh saja" maka keberadaan sistem kepercayaan pada masyarakat *uluan* tersebut adalah sesuatu yang tidak mengherankan. Wajar saja, apabila seorang *pyang* dapat mudah dipercayai mampu memberikan dukungan spiritual melalui perantaraan seorang dukun. Bagi penduduk *iliran* yang sudah mengenal Islam, tentu

⁷¹ Nanang S. Soetadji, *Palembang Melawan Penjajah Abad 19* (Jakarta: Millenium Publisher, 2000), hlm. 126.

saja kepercayaan di *uluan* ini adalah sebuah bentuk penyimpangan agama yang tidak dapat ditoleransi.

Keberadaan *kejuraian* seperti itu tentu tidak lepas dari sistem mata pencaharian mereka. Penduduk *uluan* sejak masa kesultanan telah dikenal sebagai peladang-peladang yang sering membuka lahan-lahan baru di hutan-hutan dataran tinggi di sana. Dengan sistem perladangan itu, ikatan geneologis memegang peran penting dalam usaha membuka lahan tersebut. Dalam pengamatan Peeters, sistem *kejuraian* dapat bertahan lama di tengah penduduk *uluan* karena tiga faktor. Pertama, sistem ladang berpindah menuntut anggota keluarga atau kerabat untuk turut serta membuka, menyiapkan, dan mengolah lahan. Dalam proses ini, yang memimpin adalah *jurai tuo*. Kedua, karena lahan-lahan baru biasa dicari pada hutan-hutan yang terletak jauh dari pemukiman mereka (sekitar radius 10 sampai 30 km dari dusun inti), maka keadaan itu membuat sesama anggota kerabat mempertahankan kebersamaan guna memudahkan usaha yang berat itu. Ketiga, keadaan hutan yang sunyi dan belum tentu aman menuntut para anggota kerabat untuk saling melindungi satu sama lain.⁷² Oleh karena itu, ikatan erat yang dibangun antara anggota laki-laki dalam sebuah *kejuraian* dimaksudkan untuk melindungi anggota kerabat terhadap serangan-serangan yang datang dari luar.

Penduduk *uluan* tersebut biasa membudidayakan tanaman-tanaman kering. Sebelum diperkenalkan budidaya padi basah seperti di *iliran*, penduduk *uluan* sudah terbiasa menanam padi kering. Dengan memanfaatkan lahan yang berada di *talang*, mereka menghasilkan jenis padi yang sangat wangi dan lezat. Jenis padi ini tidak kalah dengan padi yang menghasilkan beras *lebak*. Inilah salah satu hal yang sering

⁷²Jaroen Peeters, *Kaum Tuo Kaum Mudo*, hlm. 48.

membedakan *uluan* dengan *iliran*. Meskipun sama-sama membudidayakan jenis padi kering, sistem yang digunakan ternyata berbeda. Apabila di *iliran* jenis padi ini dibudidayakan dengan memanfaatkan ketinggian tertentu pada air yang menggenangi *lebak*, maka di *uluan* padi tersebut memanfaatkan air hujan yang turun pada musim tertentu di *talang*. Selain itu, mereka pun membudidayakan kapas dan kopi jenis *Arabica*.⁷³Karena kedudukan yang dimiliki, *sindang* merupakan basis perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II ketika terjadi konflik panjang dengan Belanda antara 1811-1821. Pada waktu terdesak, ke sanalah sultan mengungsikan diri dan mengobarkan perlawanan sampai terjadi perundingan. Keadaan di wilayah *sindang* masih tetap bertahan dengan nuansa perlawanan terhadap Belanda. Sampai tahun 1833, berdasarkan *Laporan Politik Tahun 1837*, keadaan di sana belum aman dan tentram. Penduduk Pasemah masih saja melakukan gangguan-gangguan ke beberapa tempat yang telah dikuasai pemerintah Kolonial.⁷⁴Mereka menyerang ibukota Palembang dan Lahat pada tahun 1829, Musi Ulu pada tahun 1837, Rejang pada tahun 1840, dan Empat Lawang pada kurun waktu 1840 – 1850.⁷⁵ Pemerintah Kolonial sementara itu masih belum dapat mengatasi perlawanan-perlawanan itu, mengingat segala kekuatan militer Belanda masih terfokus pada pemulihan kekuasaan di Sumatera Barat.

Meski terjadi berbagai perlawanan di wilayah *sindang* pada awal masa pemerintahan Hindia Belanda, namun yang tercatat sempat membuat kewalahan pemerintah tersebut adalah daerah Pasemah⁷⁶. Pemerintah baru bisa menaklukkan

⁷³*Ibid*, hlm 50-54.

⁷⁴ANRI,*Laporan Politik*, hlm. 24-25.

⁷⁵Mestika Zed, *Kepialangan*, hlm. 48-49.

⁷⁶ "Pasemah," sebagaimana digambarkan Gramberg, "adalah lembah yang letaknya tinggi di pegunungan Bukit Barisan, terbentang dari timur

Pasemah pada tahun 1866. Perlawanan yang dilakukan penduduk Pasemah tentu saja sulit ditundukkan oleh karena didukung juga oleh keadaan geografi setempat. Bagaimana pun, keberhasilan ekspedisi penaklukan ini sering dianggap sebagai langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk mengintegrasikan *iliran* dan *uluan*. Apalagi, setelah penaklukan itu, banyak dilakukan pembukaan jalur transportasi darat oleh pemerintah yang sekaligus diimbangi oleh usaha-usaha swasta dalam transportasi sungai ke pedalaman yang semakin marak.

5. Keadaan Budaya dan Sastra

Kesultanan Palembang memainkan peranan penting dalam tumbuh dan berkembangnya sastra dan budaya Islam. Kesultanan Palembang dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan khususnya sastra Melayu baik yang bersifat agama, sejarah maupun karya sastra antara tahun 1750 - 1800 yakni sejak setelah Aceh mengalami kemunduran pada kreativitas di bidang ilmu pengetahuan khususnya sastra.

Dukungan yang diberikan oleh Kesultanan sangat mendorong terhadap kemajuan di bidang keilmuan. Studi terhadap berbagai cabang ilmu-ilmu keislaman seperti : fiqh (hukum Islam), teologi, tafsir maupun dogmatic Islam. Selain itu Tasawuf juga merupakan ilmu yang dipelajari dan juga tekun dijalankan oleh masyarakat Palembang.

Peninggalan atau warisan intelektual yang ada sampai saat ini berupa naskah-naskah keagamaan merupakan salah satu bukti terjadinya geliat intelektual di Palembang pada masa itu. Peninggalan karangan-karangan di bidang keagamaan juga memberi kesaksian bahwa pada masa tersebut sangat ramai

laut ke arah barat daya dengan permukaan kurang lebih 45 derajat, 1800-2200 kaki di atas permukaan air laut dan kebanyakan terkurung oleh daerah-daerah pegunungan". Lihat Nanang S. Soetadji, *Palembang Melawan*, hlm. 98-99.

melakukan kegiatan mempelajari dan mengajarkan agama . Kitab-kitab dan tulisan-tulisan lain yang dikarang oleh ulama Timur Tengah diterjemahkan atau disadur agar dapat dipelajari oleh kalangan yang lebih luas. Di samping itu ulama-ulama Palembang juga mengarang kitab-kitab mengenai berbagai bidang keagamaan yang diantaranya karya-karya tersebut kemudian menjadi pegangan penting dalam pendidikan agama di pesantren-pesantren.

Sebagai pusat intelektual, para Sultan Palembang nampaknya sangat menunjukkan perhatian dan menjadi pelindung kegiatan-kegiatan kesusasteraan. Diantara Sultan tersebut adalah **Sultan Mahmud Badaruddinn II (1804-1821 M)**. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas dan pintar serta produktif, dan juga sebagai organisator yang baik, seorang diplomat yang cerdas serta penyiasat yang ulung. (Woelders, 1975 :3)

Ia dikenal memiliki perpustakaan yang cukup luas dan minatnya mencakup berbagai bidang keilmuan. Bahkan ia memiliki sejumlah besar naskah yang indah. Perpustakaan milik Sultan Mahmud Badaruddinn II disita dan dirampas oleh Belanda ketika Palembang dikalahkan. Dalam *Notulen Bataviaasch Genootschap van Kusten en Wetwenschappen jilid XVIII* halama 75-76 (1980) dilaporkan bahwa :

“...55 naskah Melayu dan Arab yang sangat indah tulisannya, dijilid rapi dan dalam kondisi yang baik, diantaranya terdapat naskah yang sangat langka telah dikirimkan kepada Residen Batavia oleh Van Sevenhoven yang menjabat sebagai komisaris Pemerintah Belanda di Palembang. Naskah- naskah yang ditemukan kembali itu merupakan milik mantan Sultan Palembang Mahmud Badaruddinn”

Sultan Mahmud Badaruddinn II juga dikenal sebagai pengarang sejumlah karya sastra. Beberapa karangan sastra yang di tulis Sultan Mahmud Badaruddinn II (saat ini dapat

dijumpai/tersimpan di Perpustakaan Nasional RI) antara lain adalah :

1. *Hikayat Martalaya* (**Kode PN ML 5**), naskah tersebut isinya berupa sejarah.
2. *Syair Nuri*, (**Kode PN ML 8**), merupakan sebuah gubahan.
3. *Pantun Sultan Badaruddinn*,
4. *Pantun si Pelipur hati* .

Disamping itu, adik Sultan Mahmud Badaruddinn II yakni Panembahan Bupati juga menggubah "*Syair Patut Delapan*" (**Kode PN ML 9**), dan *Syair Kembang Mawar* (**Kode PN ML 10**).

Sebagaimana diketahui, terjadinya kemalut di Palembang yang terjadi pada awal abad ke-19 hingga pertengahannya maka dapat dipastikan bahwa tumbuh kembangnya kesustraan Palembang terjadi sebelum masa itu, dan apa yang terjadi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 hanya merupakan sisa kegiatan yang sudah menurun. Sehingga hal ini sesuai dengan sumber yang menyebutkan bahwa Sultan Mahmud Badaruddinn II sebagai Sultan yang gemar akan ilmu pengetahuan dengan pandangan yang luas dan sikap yang terbuka.

Bahkan dalam sebuah sumber menyebutkan bahwa Sultan Mahmud Badaruddinn II sangat melestarikan warisan budaya Palembang, salah satunya adalah manuskrip betemakan (naskah) budaya yakni : "*Naskah Wayang*". Iskandar (1986) lebih jauh memberikan informasi bahwa di Inggris yakni pada Perpustakaan (koleksi Raffles) "*Royal Asiatic Society*" tersimpan manuskrip-manuskrip dari Palembang yang dahulunya manuskrip tersebut adalah kepunyaan atau dimiliki oleh putra mahkota Sultan Muhammad Baha'uddin yakni Sultan Mahmud Badaruddinn II. Diantara naskah tersebut adalah :

1. *Cerita Wayang Purwa*, Kode RAS Raffles 28
2. *Wayang Gedog*, Kode RAS Raffles 29

3. Rama Kawi, Kode RAS Raffles 30.

Dapat dimungkinkan bahwa keberadaan naskah tersebut diperoleh Raffles pada saat penyerbuan tentara Inggris yang dipimpin oleh Kolonel Gillespie di Palembang pada tahun 1812, atau dibeli dari tentara yang merampas harta benda Kesultanan Palembang (Iskandar, 1986:67). Naskah-naskah tersebut belum diteliti.

6. Keagamaan (Islam),

Untuk mengetahui lebih jauh situasi dan kondisi system religi akan diuraikan lebih dulu sekilas awal kedatangan Islam di Palembang juga bagaimana Islam tersebar di wilayah Palembang hingga pedalaman.

a. Sekilas Awal Kedatangan dan Penyebaran Agama Islam di Palembang.

Sebelum agama Islam dipeluk oleh masyarakat Palembang, dapat diketahui bahwa masyarakat Palembang sudah memeluk agama Hindu, Budha maupun kepercayaan terhadap Animisme dan dinamisme. Hal ini dibuktikan bahwa sebelum Kesultanan Palembang Darussalam terbentuk, di Palembang sebelumnya telah berdiri dengan megah suatu hegemoni yakni kemaharajaan yang berlandaskan falsafah Budhisme. Kerajaan tersebut adalah "Sriwijaya".

Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat perkembangan agama Budha, selain itu juga merupakan kerajaan maritim yang menguasai jalur laut terutama Selat Malaka selama beberapa abad. Selain itu Sriwijaya juga memiliki sifat-sifat sebagai Negara perdagangan yang memegang kunci perhubungan laut penting diantara Cina dan Arab pada masa itu. Dengan sifat pintu terbuka dari suatu Negara maritime, maka perdagangan ini memungkinkan untuk saling dikenalnya budaya masing-masing negara tersebut. Pedagang-pedagang dari Timur Tengah

datang sekaligus dengan membawa agama yang mereka anut (Islam).

Pada abad ke-7 dan ke-8 Sriwijaya mencapai keemasannya. Kekuasaannya meliputi bagian barat Nusantara yaitu Semenanjung Malaka, Melayu, daerah Barat Borneo Barat. Ketika kekuasaan Sriwijaya sedang dipuncaknya, Palembang tidak hanya menjadi pusat politik, tetapi juga menjadi pusat agama Budha. Menurut catatan yang dibuat oleh I-Thing bahwa di Palembang pada masa itu terdapat semacam perguruan tinggi agama Budha, dan kegiatan penerjemahan kitab-kitab suci agama Budha pada saat itu giat dilakukan. Selain itu di sana juga berdiam lebih seribu orang bhikku. Dalam sebuah prasasti ada juga yang menunjukkan pentingnya Sriwijaya sebagai pusat Agama Budha.

Adapun mengenai kapan masuknya Islam ke daerah Palembang belum dapat ditentukan secara pasti, dengan kata lain masih merupakan perdebatan karena adanya perbedaan. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan salah satunya adalah kurangnya data-data atau sumber sejarah yang otentik, Untuk mengetahui lebih jauh mengenai awal masuknya Islam ke daerah Palembang, maka perlu diamati adanya peristiwa dan catatan yang dapat memberikan petunjuk tentang datang dan berkembangnya agama Islam ke daerah Palembang.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai awal masuknya Islam ke daerah Palembang, maka perlu diamati adanya peristiwa dan catatan yang dapat memberikan petunjuk tentang datang dan berkembangnya agama Islam ke daerah Palembang.

Naguib Al-Atas berpendapat bahwa Islam sudah ada di Palembang pada abad ke VII pada awal abad VII M ini kedua tempat yakni Palembang dan Kedah. Pada masa tersebut Kedah merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang beribukota di Palembang. (Marwati Djonet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1992 : 1-2)

Kedah yang letak wilayahnya di tepi selat malaka merupakan tempat singgah para musafir ataupun pedagang yang beragama Islam, dan mereka diterima dengan baik oleh penguasa setempat (Raja Sriwijaya) yang belum beragama Islam, serta dapat menjalankan ibadah menurut agama Islam. Menurut penulis, pendapat pertama yang mengatakan Islam masuk Palembang pada abad VII dimaksudkan sebagai proses datangnya Islam. Seperti diketahui bahwa pada abad VII Palembang masih merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya dan pada masa itu kerajaan Sriwijaya dalam kondisi masa kejayaannya. Dimasa itu dimungkinkan masyarakat maupun raja telah dapat menerima kehadiran pedagang-pedagang muslim dan bermukim di pelabuhan Palembang, dan mereka diberi kesempatan untuk menjalankan ajaran Islam.

Keberadaan komunitas muslim di Palembang masa Sriwijaya dapat disimak melalui berita Cina. Disebutkan pada abad XIX terjadi pengusiran orang-orang Islam di Kanton oleh kaisar Hi-Tsung karena mereka bersekongkol dengan para pemberontak petani, kemudian orang-orang tersebut melarikan diri dari pelabuhan Kanton dan meminta perlindungan Raja Kedah. Mereka ingin melangsungkan kehidupan sebagai masyarakat Islam di Palembang dan Kedah. (Marwati Djonet Poesponegoro, 1992 : 1-2)

Tentang keberadaan sejumlah muslim pada masa Kerajaan Sriwijaya, Azra menyebutkan bahwa Palembang sebagai ibukota Kerajaan Sriwijaya pada masa itu telah terdapat sejumlah muslim pribumi di kalangan penduduk kerajaan. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari interaksi antara penduduk Sriwijaya dengan kaum muslimin timur tengah yang sudah berlangsung sejak kelahiran Islam. Meskipun Sriwijaya merupakan pusat keilmuan agama Budha terkemuka di Nusantara, Sriwijaya merupakan kerajaan yang kosmopolitan. Penduduk muslim tetap dihargai hak-haknya sebagai warga

kerajaan sehingga sebagian dari mereka tidak hanya berperan dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam hubungan diplomatik dan politik kerajaan. Sejumlah warga muslim telah dikirim oleh pemerintah Sriwijaya sebagai duta kerajaan baik ke Cina maupun ke Arab. (Azumardi Azra, 1994 : 36-43)

Bukti historis tersebut membantah pendapat sejarawan T.W. Arnold yang berpendapat bahwa Islam masuk Palembang kira-kira tahun 1440 M dibawa oleh Raden Rahmad. Keterangan dari Arnold tersebut sejalan dengan pendapat Hamka yang menyatakan bahwa Raden Rahmad dikirim oleh neneknya Raja Campa (Djeumpa) ke tanah Jawa dan singgah selama dua bulan di Palembang, lalu mengajak Ario Damar (Adipati Majapahit di Palembang) memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi, kemudian ia meneruskan perjalanannya ke Jawa. Raden Rahmad ini kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel. (Hamka, 1981: 136). Mengenai tahun 1440 M tersebut diatas adalah perkiraan dari Thomas Arnold karena dari berbagai sumber didapati bahwa Ario Damar berkuasa di Palembang mulai tahun (1455 M- 1486 M).

Sebagaimana diketahui pada abad XV Palembang termasuk daerah kekuasaan majapahit dan sebagai daerah taklukan maka Majapahit menempatkan wakilnya di Palembang yakni Ario Damar (putra Prabu Brawijaya Sri Kertawijaya) pada saat Ario Damar berkuasa, Raden Rahmad atau kemudian dikenal dengan Sunan Ampel singgah selama dua bulan di Palembang dan berhasil mengajak Ario Damar masuk Islam meski dengan sembunyi-sembunyi, dengan kata lain belum mau terbuka dengan kesilamannya. Hal tersebut dimungkinkan karena kekhawatirannya terhadap penguasa Majapahit yang masih beragama Hindu. Setelah masuk agama Islam namanya berubah menjadi Ario Dillah atau Ario Abdillah. Pada waktu-waktu tertentu Ario Dillah menghadap Raja Majapahit, dan ia selalu singgah ke tempat Raden Rahmad

(Sunan Ampel) guna menambah ilmu pengetahuan Islam. Setelah kembali ke Palembang ia selalu mengadakan hubungan dengan ulama-ulama Arab yang berdagang di Palembang. Salah satu sumber menyebutkan bahwa saat itu Palembang adalah kota kedua setelah Aceh sebagai tempat mukim orang-orang Arab di Nusantara (L.W.C van den Berg. 1989 : 67 dan 73)

Adapun mengenai adanya masyarakat Islam di masa Ario Damar dapat dibuktikan dengan keberadaan seorang tokoh yang bernama Raden Fatah. Sebagaimana diketahui bahwa Palembang mempunyai kedudukan yang penting yakni sebagai tempat kelahiran seorang tokoh Raden Fatah, yakni raja Islam pertama di Demak. Dalam cerita tutur Jawa serta beberapa sumber lainnya, Raden Fatah adalah anak Prabu Brawijaya dari Majapahit dari seorang wanita Cina muslim, yang ketika sedang hamil, ia diserahkan kepada Adipati Palembang Ario Damar. Setelah anak itu lahir, ia dibesarkan di Palembang dan dididik secara Islam bersama Raden Kusen (anak kandung Ario Damar) (Hamka, 1981 : 148)

Setelah Raden Fatah (ketika masa kecilnya diberi nama Pangeran Jimbun) berumur kurang lebih 20 tahun, ia dikirim oleh Ario Damar bersama Raden Kusen ke tanah Jawa untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam kepada Sunan Ampel. Dengan demikian Palembang sebagai suatu tempat yang turut berperan membesarkan Raden Fatah, tentunya di daerah Palembang pada masa tersebut telah ada ulama maupun kelompok masyarakat Islam yang telah ikut membentuk atau memberi pengajaran secara Islam kepada Raden Fatah.

Informasi mengenai aktivitas Islam sampai berakhirnya kekuasaan majapahit di Palembang tidak banyak ditemukan. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, Palembang menjadi daerah protektorat (perlindungan) kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah. Raden Fatah secara resmi dinobatkan menjadi penguasa Demak I dengan gelar Senopati

Jimbun Ngabdurrahman Penembahan Palembang Sayidin Panatagama (artinya : Panglima Jimbun) Hamba yang Maha Kasih dan di agungkan di Palembang yang menjadi Pimpinan dan Pengatur agama) (Marwati Djonet Poesponegoro, 1992 :305).

Dengan demikian secara tidak langsung, Palembang telah merupakan bagian dari pada kerajaan Islam. Hal tersebut tentunya berimplikasi bahwa di Palembang pada masa itu telah kelihatan adanya kegiatan-kegiatan yang bercorak Islam.

Adapun Wellen yang berpendapat bahwa Islam masuk Palembang pada abad XVI M, mempunyai alasan yaitu pada tahun 1596 M terjadi perang antara Palembang dan Banten. Orang Banten menganggap perang itu sebagai perang kafir, artinya perang terhadap orang-orang yang belum Islam. (J.W.J Wellan Bijardi toot de Geschiedenis van de Masjidjid Lama te P, CI, No. 1939 : 308). Dalam hal ini Wellan menambahkan juga bukti bahwa alam kisah perjalanan van Jacob van Neck menceritakan bahwa penduduk Palembang pada akhir abad XVI M masih belum beragama.

Pernyataan Wellan di atas dapat ditanggapi yakni, pada tahun 1596 M terjadi perang antara Banten dan Palembang, dan oleh orang Banten perang tersebut dianggap sebagai perang kafir atau perang terhadap orang yang belum beragama Islam. Namun demikian pernyataan tersebut tidak berarti bahwa pada masa itu daerah Palembang masyarakatnya belum agama Islam. Perlu diingat bahwa pada masa itu daerah Palembang masih berada dibawah protektorat kerajaan Islam yakni : Demak, Pajang dan Mataram. Jadi pendapat Wellen di atas tanpa memperhatikan sumber-sumber serta alasan yang dikemukakannya tidak tepat

Pendapat-pendapat di atas tentunya memberi petunjuk bahwa Islam telah masuk Palembang pada abad VII M yakni didasarkan pada bukti bahwa pelabuhan di Palembang ramai

didatangi oleh pedagang muslim, baik dari Arab, India, Cina maupun Persia. Namun demikian baru di abad XVII M nantinya Islam menempatkan aktivitasnya dan semakin berkembang ketika masa Kesultanan Palembang (1666-1823 M). Fase perkembangan Islam di Palembang pada abad XVII M ditandai dengan didirikannya masjid dan mulai nampak berbagai kegiatan keagamaan

b. Saluran-Saluran Islamisasi di Palembang

Penyebaran Islam di Palembang dilakukan dengan jalan damai dan berlangsung dalam beberapa tahap. Proses Islamisasi dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf. Seperti diketahui, penyumbang peranan penting dalam menyebarkan Islam selain ulama, bangsawan adalah para ahli Tasawuf yang tergabung dalam Tarekat-Tarekat.

Sebagaimana diketahui hampir seluruh ahli dan pengamat sejarah menyepakati, bahwa proses Islamisasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi khususnya perdagangan. Sebagaimana dikemukakan oleh JC. Van Leur, 1960 : 850 , Uka Tjandrasasmita, dalam A. Hasymy, 1993 : 363 ; Marwati Djonet Poesponegoro, 1992 : 183) ; Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed) 1988 : 75), secara teoritis terdapat tiga jalur dalam perkembangan Islam di Indonesia yaitu : melalui ulama / wali, pedagang dan bangsawan.

Dalam konteks ini perluasan atau penyebaran muslim berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, dan seperti di daerah-daerah lainnya Islamisasi di Palembang pada awalnya juga berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan bahkan pada tahap intensifikasi banyak pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi mereka sambil menyebarkan agama Islam. Sementara itu saluran perkawinan merupakan tahap dimana sesudah adanya adaptasi antara pedagang muslim (Arab) dengan

penduduk setempat. Adapun saluran tasawuf dan sastra juga berperan dalam proses penyebaran Islam. Adapun tokoh atau yang berperan dalam proses penyebaran Islam di Palembang diantaranya adalah pedagang, ulama guru-guru agama, maupun para ahli tasawuf.

Secara rinci saluran Islamisasi di Palembang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perdagangan

Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan, karena bagi Islam tidaklah ada pemisahan antara pedagang dengan agamanya dan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk menyampaikan ajaran kepercayaannya kepada pihak-pihak lain. Kecuali itu, perdagangan pada abad-abad sebelum dan ketika kedatangan Islam sangat menguntungkan karena golongan raja-raja dan bangsawan banyak yang ikut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal.

Dalam kerangka ini, Van Leur mengatakan bahwa para penguasa pribumi yang ingin meningkatkan kegiatan-kegiatan perdagangan maka mereka harus dengan rela menerima Islam. Dengan begitu mereka mendapatkan dukungan dari para pedagang muslim yang menguasai sumber-sumber ekonomi. Sebaliknya para penguasa memberi perlindungan dan konsesi-konsesi dagang kepada para pedagang muslim. Dengan konversi mereka kepada agama Islam, para penguasa pribumi dapat berpartisipasi secara lebih eksklusif dan menguntungkan dalam perdagangan internasional.⁷⁷

Tentunya para pedagang muslim yang berada di Palembang telah memakai saluran ini sebagai sarana mengIslamkan penduduk pribumi. Kedatangan para pedagang muslim ke Palembang terutama pada abad XVI dapat

⁷⁷Azumardi Azra, Jaringan Ulama Nusantara 1994 : 31)

dimengerti karena pada masa tersebut Palembang sebagai salah satu penghasil lada terbaik dan lada telah memasuki perdagangan internasional telah menarik perhatian dari pedagang-pedagang muslim. Dua tujuan penting yang keutungan dalam bisnis maupun keutungan dalam pelaksanaan syariat Islam. Kepiawaian para pedagang dalam menyebarkan agama Islam membuat masyarakat setempat merasa tertarik dan simpatik kepada Islam, dan lama kelamaan akhirnya sebagian penduduk memeluk agama Islam

Keberadaan pedagang Arab terutama pada masa Kesultanan Palembang yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Palembang bahkan sampai ke daerah pedalaman diantaranya adalah Kyai Merogan (1811-1901). Tokoh penyebar Islam lainnya adalah : Haji Hasan (Haji Sepuh Djambi), Kyai Delamat, Haji Abdul Hamid (menyebarkan Islam ke daerah Muba) ; Mudjang Djawe Gelar Mangkubumi, Pangeran Abulumen, Kyai Delamat, Penghulu Haji Pidin (ke daerah Musi Rawas) ; Syeih Mahmud Syaid Mahmud Syaid Ratu, Syeih Alam Raja Kuase Kute Telang Gumuling Ayeh lematang, Syeih Angkasa Ibrahim Human Ayek lematang, Akhmad Sabirin Anom Suro, Raden Pallawa Syeih Djalil, Akhmad Muhammad (ke Lahat) Tuan Sarah, Nuchada Sulaiman, Qori, Said hasan (ke Bangka Belitung). (Makmoen Abdullah, 1995)

Kyai Merogan Nama aslinya adalah Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Mahmud, ia dikenal sebagai pedagang yang kaya raya sehingga dia dapat membangun dua buah masjid pada masanya. Masjid ini dikenal dengan nama 'Masjid Marogan' dan Masjid Lawang Kidul (Masjid Marogan terletak di Kampung Karang Berahi (Kertapati) dan Masjid Lawang Kidul terletak di Kampung 5 Ilir. Kedua masjid tersebut yang sekarang termasuk masjid tua dan mempunyai historis.

Para pedagang atau saudagar Arab di Palembang terbukti mempunyai pengaruh besar dalam proses pengislaman masyarakat Palembang. Setelah keruntuhan Kesultanan Palembang (1821 M), kehidupan saudagar Arab (perekonomian mereka) terus meningkat sehingga mereka tidak segan-segan memberikan modal dagang kepada penduduk setempat dengan syarat mereka mau masuk agama Islam. Untuk menunjang kegiatan pelajaran agama mereka mendirikan masjid-masjid di sekitar perkampungan Arab tempat kediamannya (Jeroen Peters, 1997 : 17-18). Diantara masjid-masjid tersebut, salah satunya adalah masjid yang dikenal dengan nama '**Masjid Sungai Lumpur**' yang terletak di Kelurahan 12 Ulu di tengah Perkampungan Arab. Masjid tersebut didirikan oleh seorang saudagar Arab yang kaya yakni Sayyid Abdullah bin Salim pada tahun 1873 M.

2. Perkawinan

Selain para pedagang, orang Arab yang berada di Palembang diantaranya adalah sebagai ulama. Sebagaimana diketahui pada masa Kesultanan Palembang dikenal tiga macam ulama yakni : ulama Kesultanan (bertugas mendampingi sultan dalam menjalankan roda pemerintahan atau menjadi penasehat sultan urusan keagamaan), ulama birokrat (bertugas mengurus administrasi dan pelaksanaan hukum Islam atau disebut juga dengan ulama penghulu) dan ulama bebas yang berperan sebagai pengajar, pembimbing dan penyebar Islam. (Mujib, 1997)

Pada masa kesultanan, para ulama (dari orang Arab) ini diberi kedudukan penting dalam pemerintahan yaitu sebagai ulama kesultanan yang bertugas mendampingi sultan dalam menjalankan roda pemerintahan antara lain sebagai penasehat sultan dalam urusan-urusan keagamaan. Diantara ulama Arab ini ada yang melakukan perkawinan dengan wanita pribumi.

Hal ini adalah sebagai bukti perkawinan sebagai salah satu jalur Islamisasi di Palembang.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Baha'udin 1775-1804 M, keadaan perekonomian di Palembang sangat bagus, karena ditopang oleh tambang di Bangka dan Ekspor Lada. Situasi inilah yang membuat pelabuhan Palembang dilirik oleh para pedagang dari negeri lain seperti Arab. Kedatangan orang-orang Arab membawa perubahan kehidupan sosial budaya bagi masyarakat Palembang. Kedekatan sultan dengan orang-orang Arab sebagai mitra dagang menyebabkan mereka mendapat perlakuan khusus, sehingga jumlah mereka semakin banyak. Diantara orang Arab yang menonjol adalah Marga al-Munawar yang bertempat tinggal di 13 Ulu, Assegaf di 16 Ulu, al-Munawar, al-Jufri di 15 Ulu, Alkaf di 8 Ilir dan 10 Ulu.

Pada Paruh kedua abad XIX M mereka adalah kelompok elit Arab di Palembang. Masyarakat Arab di sana kebanyakan anggita Ba'alawi yang menelusuri garis keturunan mereka dari Nabi Muhammad melalui cucunya Husain. Kedudukan para Alawiyin dengan sapaan Sayyid dipandang tinggi dalam masyarakat Palembang. Para saudagar Arab dan Sayyid itulah yang mempunyai pengaruh besar dalam proses Islamisasi masyarakat Palembang

Perkawinan orang-orang Arab dengan wanita setempat maupun kerabat Kesultananpun terjadi pada saat itu, sehingga perkawinan tersebut memberi peluang untuk menyebarkan agama Islam kepada keluarga wanita

3. Tasawuf

Orang pertama yang memperkenalkan teori Islamisasi di Indonesia melalui tasawuf adalah A.H. Johns ia mengatakan bahwa para pengembara sufiah yang melakukan penyiaran agama Islam di kawasan ini. Faktor utama yang menyebabkan keberhasilan mereka adalah kemampuan sufi menyajikan Islam

dalam keemasan yang aktratif. Menurut Johns karakteristik para sufi penyebar Islam ini adalah :

Mereka adalah para penyiar (Islam) pengembara yang berkelana di seluruh dunia yang mereka kenal, yang secara suka rela hidup dalam kemiskinan, mereka sering berkaitan dengan kelompok-kelompok dagang atau kerajinan tangan sesuai dengan tarekat yang mereka anut ; mereka mengajarkan teosofi sinkretik yang kompleks, yang umumnya dikenal baik orang-orang Indonesia, yang mereka tempatkan ke bawah (ajaran Islam) (atau) yang merupakan pengembangan dari dogma-dogma pokok Islam ; mereka menguasai ilmu magis, dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan ; mereka siap memelihara kontinuitas dengan masa silam, dan menggunakan istilah-istilah dan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dalam konteks Islam (Azra, 1994 : 33)

Akhirnya John berkesimpulan Islam dapat berurat berakar di Nusantara adalah setelah ikut campurnya para sufi dalam mengembangkan dakwah. Car-cara sufi yang berkuat dengan hal-hal magis mendorong penduduk pribumi untuk memeluk Islam, karena tata cara sebelumnya dan prilaku para sufi mirip dengan kehidupan mereka sebelumnya. Kontemplasi melalui zikir dalam ajaran tasawuf misalnya mirip dengan bertanpa dalam ajaran Hindul-Budha

Sementara itu, Islamisasi di Palembang melalui tasawuf berkembang cepat pesat sekitar abad XVIII M. Hal tersebut terbukti dengan berkembangnya Tarekat Sammaniyah di Palembang oleh syaikh Abdus-Shamad al Palimbani (1704-1789 M). Syaikh Abdus-Shamad Al-Palimbani adalah ulama dan sufi asal Palembang yang dikenal sebagai guru tarekat Sammaniyah dan berperan dalam penyebaran Tarekat Sammaniyah di Nusantara. Ia mengadakan penyesuaian antara inti ajaran al-wujud Ibnu Arabi dan prinsip-prinsip ajaran sufi Al-Ghazali.

Sebagai ulama asal Palembang, ia tentu saja mempunyai andil dalam penyebaran tarekat tersebut

Tidak sedikit murid yang kemudian berguru kepada Abdus-Shamad selain itu karya-karyanya juga beredar luas di wilayah Palembang dan bahkan masih dibaca dan diajarkan hingga sekarang. Dalam konteks ini masyarakat Palembang memang memiliki kecenderungan yang tinggi akan dimensi tasawuf sejak kedatangan Islam. Menurut salah satu sumber menyebutkan bahwa ajaran wahdah al-wujud yang diajarkan Syamsudin Al-Sumantri telah berkembang di kalangan masyarakat Palembang melalui karya-karyanya

Salah satu murid Abdus-Shamad yang terkenal dan memiliki andil besar dalam penyebaran Tarekat Sammaniyah di Palembang adalah Muhammad Akib bin hasan al-din ia adalah ulama dan guru agama yang disegani masyarakat sehingga muridnya jumlahnya banyak. Diantara muridnya yang terkenal adalah Abdullah bin Ma'ruf. Sedangkan guru Tarekat Sammaniyah lainnya yang ada adalah : Kemas Haji Muhammad Zain (Pemimpin dalam perang melawan belanda tahun 1819 M yang dikenal dengan perang menteng dan tertulis dalam syair perang menteng). (Zulkifli, 2001: 81)

4. Bukti-Bukti Adanya Perkembangan Islam di Palembang

Perkembangan agama Islam di Palembang dapat dilihat secara nyata yakni diantaranya melalui peninggalan-peninggalan bersejarah dalam bentuk antara lain : tempat ibadah (Masjid), kompleks makan, pusat kota, dan naskah (manuskrip)

A. Tempat Ibadah (Masjid)

Belum dapat dipastikan kapan dan dimana masjid pertama didirikan di Palembang hanya saja dapat dipastikan bahwa pendirian dan perumbuhan masjid di suatu komunitas

muslim sangat terkait dengan proses Islamisasi di daerah tersebut. Jika informasi bahwa proses pengislaman di Palembang sudah terjadi sejak zaman Sriwijaya melalui jalur perdagangan dapat diterima, dan pada akhir zaman kerajaan tersebut sudah terdapat komunitas muslim, maka kemungkinan besar masjid sudah didirikan pada masa Sriwijaya melalui jalur perdagangan dapat diterima dan pada akhir zaman kerajaan tersebut sudah terdapat komunitas muslim, maka kemungkinan besar masjid sudah ada suatu komunitas muslim di dunia yang tidak memiliki masjid (terlepas dari bentuk dan ukurannya)

Sebagaimana diketahui proses pengislaman di Palembang dapat dikatakan berjalan secara intensif, sehingga selama beberapa abad tidak ditemui komunitas muslim yang menonjol yang dapat melahirkan suatu bentuk kerajaan Islam. Palembang sebelum terbentuk kesultanan, semula menjadi wilayah protektorat kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan Islam Demak dan Mataram. Perkembangan baru terjadi ketika terjadi pertikaian antara Demak dan Pajang. Sejumlah keluarga kerajaan meninggalkan Demak, diantaranya adalah Ki Gede Ing Suro Tuo

Menurut salah satu sumber Ki Gede Ing Suro Tuo telah membangun masjid, masjid merupakan masjid pertama yang dapat dicatat dalam sejarah Palembang, pada tahun 1659 M masjid tersebut dihancurkan oleh ekspedisi Mayor Joan van der Laen (Husni Rahim, 1993 ;52).

Ketika Palembang secara resmi menjadi Kesultanan yang berdiri di bawah pemerintahan Abdurrahman (1659-1706 M) yang bergelar Susuhunan Abdurrahman Khalifah al-Mu'min Sayyid al-Imam ia mendirikan masjid sekitar tahun 1663 M. Masjid ini sekarang tidak ada lagi dan hanya menjadi nama sebuah jalan yakni Jalan Masjid Lama

Adapun beberapa masjid yang sekarang masih dapat ditemukan antara lain :

a. Masjid Agung Palembang

Masjid ini terletak di wilayah kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dan tidak jauh dari benteng Kuto Besak serta tidak jauh dengan Sungai Musi. Lingkungan masjid sekarang ini disebelah timur, utara dan selatan jalan raya, sedangkan di sebelah barat adalah pemukiman penduduk

Masjid ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badar ad'Din Jayo Wikramo pada tahun 1783 M dan diresmikan penggunaannya pada tahun 1748 M. Denah masjid adalah bujur sangkar, serta beratap tumpang dua.

b. Masjid Jami' Ki Marogan

Masjid ini didirikan pada tahun 1871 M di Karang Berahi (sekarang secara administratif terletak di wilayah Rt. 01 Rw. 01, Dusun Karang Berahi, Kelurahan Kertapati Kecamatan seberang Ulu I Kota Palembang) oleh seorang ulama kaya raya yakni Masagus Haji Abdul Hamid

Masjid Lawang Kidul, masjid ini didirikan pada tahun 1881 M oleh Masagus Haji Abdul Hamid atau Kyai Marogan. Dilihat dari arsitekturnya masjid ini mirip dengan masjid agung Palembang. Masjid ini terletak di wilayah kelurahan 5 ilir Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Paa tahun 1967 M masjid ini pernah direnovasi namun beberapa bagian masih menampakkan keasliannya, seperti tembok-tembok kelilingnya, tiang-tiangnya, mimbar, menara atap dan mustakanya

Setelah kyai Marogan wafat, penyiaran agama Islam dilanjutkan oleh muridnya yakni Haji Abdurrahman Delamat dan lebih dikenal dengan panggilan Kyai Delamat. Bersama-sama dengan Haji Khatib Akhmad ia memprakarsai pendirian masjid Suro (sekarang dinamai Masjid Al-Mahmudiah) pada tahun 1890 M

c. Masjid Jami' Sungai Lumpur

Masjid ini didirikan oleh seorang saudagar / penguasa kaya yang bernama Sayyid Abdullah bin salim Alkaf pada tahun 1873 M. Masjid ini terletak di Kelurahan 11 Ulu, Sungai Lumpur, kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang. Disekitar masjid merupakan perkampungan penduduk, dan masjid ini beratap tumpang dua.

d. Musalla Al-Barakah

Mushalla Kuna yang ditemukan di Palembang Adalah Musalla al-Barakah di 7 ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Musalla ini didirikan tepat i tepi sungai Kenduran dan dibangun dengan bentuk panggung. Dikolong bawah digunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan pengajian, sedangkan lantai atas digunakan untuk sholat

B. Tempat Pemakaman

a. Komplek Makam Sabokingkim

Komplek ini terletak di Kelurahan 3 Ilir, kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Tokoh yang dimakamkan disini adalah : Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Amangkurat IV, Imam Sultan Tuan Sayyid Muhammad Nuh, Ratu Sinuhun Putri Ki Pancanegara Sumedang, dan Nyimas Ayu Rabi'at al-Hasanah

b. Makam Kesultanandi Komplek Candi Walang

Komplek ini terletak di wilayah Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Tokoh yang dimakamkan disini adalah Imam Sultan Sayyid Mustafa al-Idrus, Sultan Abdurrahman Khalifat al-Mukminin Sayyid al-Iman dan Permaisuri. Makam-makam di sekitarnya adalah makam keluarga Kesultanan dan diantaranya makam tersebut

terdapat makam tokoh penyebar Islam yakni Sayyid Abd al-Rahman Ibn Fuad

c. Komplek Makam di Kebon Gede

Komplek ini terletak di Kampung Gede, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Tokoh yang dimakamkan disini adalah Sultan Muhammad Mansur bin Susuhunan Abd al-Rahman dan permaisurinya, Muhammad Yasin serta makam keluarga serta anak keturunan keluarga Kesultanan

d. Komplek Makam Sultan Agung

Komplek ini terletak di Kelurahan I, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Tokoh yang dimakamkan disini antara lain adalah : Sultan Agung Sri Teruna, Sultan ke-3 dari Kesultanan Palembang yang diapit oleh dua makam yang tidak diketahui namanya

e. Komplek makam Kawah Tengkurap

Komplek makan ini terletak di Kelurahan 3 Ilir kecamatan Ilir II Kota Palembang di dalamnya terdapat empat cangkup, tiga cangkup digunakan untuk pemakaman para sultan yakni : Sultan Mahmud Badar a-Din I, Sultan Ahmad Najam ad-Din, Sultan Baha' ad-Din. Adapaun satu cangkup untuk pemakaman putra-putra sultan Mahmud Badaruddinn I, para pejabat dan hulubalang Kesultanan

f. Komplek Makam Arab 14 Ulu

Komplek makam ini terletak di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang. Adapun yang dimakamkan disini terdiri dari 3 kelompok suku, yaitu : kelompok makam Arab suku Al-Habsyi, kelompok makam

Arab suku al-Munawar dan kelompok makam Arab suku al-kaff

g. Komplek Makam Arab di 16 Ulu

Komplek ini terletak di kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang. Adapun yang dimakamkan disini antara lain adalah Abd al-Hamid al-Haddad dan keluarga As-Segaf

h. Makam Masagus Abdul Hamid bin Mahmud (Kyai Marogan)

Makam ini berada di Komplek Masjid Jami' Kyai AbdulHhamid bin Mahmud atau dikenal dengan nama Masjid Marogan. Letak Makan berada di sebelah tenggara dan masih merupakan bagian dari masjid tersebut

2. Pusat Kota

a. Perkampungan Arab 7 Ulu

Perkampungan ini terletak di Kelurahan 7 Ulu, kecamatan seberang Ulu I orang-orang Arab yang menghuni daerah ini kebanyakan dari daerah seberang Ilir atau daerah lain. Perpindahan itu terjadi pada abad XVIII. Suku Arab yang tertinggal di daerah ini antara lain adalah : suku al-Haddah, at-Attas, as-Sahab, al-Kaff, As-Segaff. Mereka kebanyakan adalah sayyid (turunan Nabi), dan mata pencarian mereka adalah berdagang

b. Perkampungan Arab 12, 13 dan 14 Ulu

Seluruh perkampungan 12, 13, 14 Ulu masuk ke wilayah Kecamatan Seberang Ulu II. Perkampungan tersebut dihuni oleh orang-orang Arab dari suku Al-Hasby, al-munawwar, Al-Haddad, al-Kaff dan lain-lain

3. Naskah

Para mubaligh yang membawa Islam dan menyebarkannya di Palembang terdiri dari muslimin Arab, Persia dan India. Selain itu ulama Palembang juga yang menjadi penyebar Islam, seperti Abdusshamad al-Palimbani, Sihabuddin bin Abdullah Muhammad, serta kemas Fahrudin. Ketiga ulama ini merupakan ulama besar pada paruh kedua abad XVII dan XVIII. Ulama-Ulama tersebut diatas banyak meninggalkan karya tulis keagamaan berupa naskah-naskah kagamaan.

Naskah mengandung nilai-nilai yang berkenaan dengan sejarah, sastra, bahasa, falsafah bangsa, dan keagamaan an dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Selain itu bahasa dan aksara dalam naskah pun beragam, begitu juga dalam hal tema. Salah satu tema dari naskah adalah berupa naskah keagamaan, baik berupa tasawuf, fiqh, maupun tauhid

Naskah keagamaan (Islam) merupakan salah satu bukti adanya perkembangan Islam. Perkembangan Islam di Palembang dapat dibuktikan dengan banyaknya sejumlah naskah yang baik yang tersimpan di perpustakaan, museum, maupun yang tersimpan di rumah masyarakat setempat

Keberadaan naskah keagamaan di Palembang tidak terlepas dari peran para ulama yang menyebarkan Islam di Palembang. Para ulama Palembang tersebut menghasilkan karya tulis yang tujuannya ingin melestarikan ajaran agama yang disiarkannya kepada masyarakat dan karya tersebut diharapkan dapat dibaca serta diteruskan oleh generasi selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, pada abad XVIII M KesultananPalembang merupakan pusat kajian Islam di nusantara dan merupakan kontinuitas dari perkembangan Islam di Acehl yang mengalami kemunduran pada abad XVII M. Pada abad XVIII M tersebut para ulama dan cendikiawan

mendapat dorongan serta perhatian yang besar dari pihak kesultanan, sehingga muncul ulama-ulama penulis yang karya-karyanya masih tetap dapat dibaca dan diajarkan di masyarakat hingga sekarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kesultanan Palembang pada masa tersebut menjadi pusat koleksi besar karya-karya keagamaan para ulama setempat

Mengenai kehidupan dan pemikiran ulama Palembang hingga awal abad XVIII M belum banyak catatan yang dapat memberikan informasi. Menurut Amin pada masa Sultan Mansur Jayo Ing Lago (1706-1714 M), Sultan Agung Qomaruddin Sri Taruno (1714-1724 M) dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758 M) memerintah Kesultanan Palembang, hidup seorang ulama yang bernama Faqih Jalaluddin yang mengajarkan ilmu al-Quran dan Ushuluddin. Ia melaksanakan dakwah Islam di Palembang sampai ia wafat pada tahun 1748 M. Dari Faqih Jalaluddin ini tidak diketahui dengan jelas apakah ia meninggalkan karya sehingga corak pemikirannya belum dapat diketahui. Beberapa ulama lainnya yang muncul antara lain Shihabuddin bin Abdullah Muhammad, ia menjadi salah seorang penasihat Sultan Ahmad Najamuddin dalam bidang keagamaan. Ulama terkenal lainnya yakni Kemas Fakhruddin yang dianggap sebagai penerjemah utama teks-teks Arab di Kesultanan Palembang pada masa lalu.. (Ali Amin, 1986 : 114-115)

Adapun pada paruh kedua abad XVII dan XVIII M di Palembang terdapat tiga ulama besar yang turut berperan dalam penyebaran Islam di Palembang. Ketiga ulama tersebut adalah : Abdus-Shamad al-Palimbani, Muhammad Muhyiddin bin Shihabuddin dan Kemas Muhammad bin Ahmad. Tentang kehidupan dua ulama terakhir tersebut di atas tidak banyak diketahui, kecuali keterkaitannya dengan Tarekat Sammaniyah. Keduanya menulis biografi dan kekeramatan pendiri Sammaniyah yakni Syaikh Muhammad Samman. Adapun

Abdus-Shamad merupakan salah satu murid Syaikh Muhammad Saman yang berperan besar dalam penyebaran Tarekat Sammaniyah di Nusantara, terutama melalui karya-karyanya yang jumlahnya kurang lebih 8 karya .

Abdus-Shamad merupakan salah seorang tokoh sufi yang berhasil mengkombinasikan ajaran-ajaran tasawuf Al-Ghazali dan Ibnu Arabi yang sebelumnya dipandang sebagai dua corak tasawuf yang bertentangan. Kehadiran Abdus Shamad telah membawa corak baru dalam perkembangan Islam di Palembang terutama pada abad XVIII M. Jika sebelumnya ulama dan sultan cenderung bersikap keras terhadap tarekat, namun sejak masa Abdus-Shamad Sultan Palembang mendukung penyebaran tarekat. Hal tersebut berdampak terhadap keberadaan tarekatk sammaniyah yang selanjutnya diamlkan oleh para ulama dan sultan serta masyarakat umum. (Quzwain, :142)

Berdasarkan pengamatan penulis di Palembang banyak ditemukan naskah keagamaan terutama yang bertema tasawuf. Selain tema tasawuf isi teks dari naskah-naskah tersebut dapat dibedakan kedalam tema tauhid, fiqh, al-Quran dan tafsir jikayat, sejarah dan juga primbon. Tema-tema tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a. Tema Tasawuf

Sebagaimana diketahui, tasawuf merupakan salah satu saluran Islamisasi atau pnyebaran Islam di Palembang yang dilakukan oleh para sufi. Jika dilihat dari diketemukannya naskah-naskah Acehl yang tersimpan oleh masyarakat Palembang, dapat dipastikan bahwa salah satu ajaran tasawuf yang masuk ke Palembang adalah melalui tulisan-tulisan para sufi dari Acehl. Diantara naskah Acehl tersebut adalah berjudul *Tanbih al-Masyi*, *Bayyan Tajjali* dan *Umdah Al-Muhtajin* karya Abdur Rauf as-Sinikili. Adapaun Karya Naruddin ar-Raniri berjudul *Asrar al-Insan fi ma rifati ar-ruh wa ar-Rahman*. Di Aceh

pada abad XVII M berkembang faham sufisme yakni *Wahdah al-wujud* (kesatuan wujud) atau faham Wujudiyah yang dikembangkan oleh ulama Aceh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani. Faham tersebut dibantah oleh ulama Aceh lainnya yakni Nuruddin ar-Raniri dan Abdur Rauf as-Sinkili

Menurut salah satu sumber, menyebutkan bahwa pada abad XVIII di Palembang berkembang sebuah faham sufisme yakni al-wujud (kesatuan wujud) atau faham wujudiah. (Drewes, 1977). Banyak kaum muslimin Palembang saat itu yang tersesat karena mempelajari kitab-kitab yang memuat ajaran Martabat Tujuh. Doktrin sufisme tersebut yang dikenal dengan doktrin Martabat Tujuh, kemudian ditentang oleh beberapa ulama Palembang diantaranya adalah Sihahabuddin dan Kemas Fakhrudin. Melalui karya-karyanya oleh pihak Kesultanan dipakai untuk melawan doktrin sufisme (Martabat Tujuh). Syihabuddin dan Kemas Fahrudin kemudian mengembangkan ajaran tasawuf yang berasal dari al-Junaid al-Baghdadi (w.905 N) yakni seorang tokoh sufi pengajar tasawuf yang menekankan keadaan sadar dan tetap membedakan Tuhan dan hambanya disamping tetap mematuhi ketentuan-ketentuan syariat.

Ulama Palembang lainnya yang menentang ajaran wahdah al-wujud yang memuat ajaran martabat tujuh adalah Abdus-Shamad al-Palimbani, seorang ulama sufi (w. 1789 M). Melalui naskah yang berjudul *Tuhfah ar-ragibin fi Bayan Haqiqat Imam al-Mu'min* (hidangan para pencinta Allah mengenai penjelasan hakikat imam orang-orang Mukmin (disingkat TRBHIM). TRBHIM merupakan naskah yang berupaya untuk mnanggapi doktrin wujudiyah, karena pada saat itu di Palembang banyak kaum muslimin tersesat karena mempelajari doktrin tersebut. Kitab TRBHIM sangat populer pada masa itu, hal ini terlihat dari adanya perpustakaan yang menyimpan

naskah tersebut. Di perpustakaan RI terdapat satu naskah yang masih tutuh dengan kode (MS). (Behrend (ed) ,1998). Karya tersebut merupakan salah satu karya sastra kitab yang mengandung unsur tasawuf yang berkembang di Palembang pada abad XVIII. Abdus-Shamad berusaha menggabungkan pokok-pokok ajaran Wahdah al-wujud dengan ajaran tasawuf sunni al-Ghazali yang dipadukan dengan suatu sistem ajaran tasawuf tersendiri

Karya Abdus-Shamad lainnya adalah *Hidayat as-shalihin dan Sairu as-Salikin*. Dari kedua karya tersebut membuktikan bahwa di Palembang pada abad XVIII para ulama menganut ajaran sunni al-Ghazali. Sedangkan ajaran *wahdah al-wujud* yang populer di Aceh pada abad XVII sudah mulai ditinggalkan

b. Tema Fiqh

Fiqh adalah ilmu yang membicarakan ukum yang didalamnya dibahas tentang wajib, sunat, halal, haram, jaiz dan sebagainya. Selain membahas tentang peribadatan, Fiqh juga membahas tentang peraturan kehidupan seperti : jual beli, ketatanganan

Naskah di Palembang yang bertemakan Fiqh antara lain adalah

Ilmu Faraid, kitab fiqh, fath al-mun, tafhatu al-muin, tafhatu al-atfal wa hilyatu abna'i al-kamal, hakiyah khatim al-muhaqiqin 'ala syarh at-tahrir, kitab nikah, rukun sembahyang, kitab falaq, kitab taharah tahriru fatih al-bab fi al-fiqh 'ala mazhab al-imam al-mujtahid sy-syafi'i, fiqh 'ala mazhab al-imam al-mujtahid asy-syafi'i, fiqh imam syafi'i

Adap salah satu karya ulama Aceh Abdur Rauf as-Sinkili yang dapat diketemukakan di Palembang adalah *Mir'ah at-Thulab*. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa melayu. Kitab tersebut berisi mengenai tiga bidang ilmu hukum Islam yang

penting yang beraliran madzah syafi'i sedangkan karya ulama Palembang Abdus-Shamad yang membahas persoalan fiqh yakni *sair-al-salikin*. Dalam kitab tersebut dibahas antara lain mengenai taharah, hukum sembahyang, ibadah haji, perkawinan dalam Islam

c. Tema Tauhid

Tauhid adalah ilmu yang membahas dan mmbrikan uraian tentang keesaan tuhan. Naskah yang apat ditemukan di Palembang antara lain adalah : *Usuluddin*, *fath al-jannad*, sifat dua puluh, *sirat al-huda al-murid bayan kalimat at-tauhid*

d. Naskah Pendukung keagamaan

Naskah pendukung keagamaan adalah naskah yang mengandung ajaran Islam serta nilai-nilai Islam serta petunjuk bagi sederhana bagi umat Islam untuk menjalankan syariat. Naskah pendukung keagamaan ini antara lain

- Hikayat

Hikayat adalah bentuk cerita yang dilarang untuk memberi informasi tentang aspek-aspek agama Islam sebagai media dakwah. Diantara hikayat yang ada di Palembang adalah :

Auliyaullah hikayat, *hikayat zulfikar*, *hikayat keramat syeikh Muhammad saman dengan Ikhtisar*

- Syair Bernafaskan Islam

Syair (termasuk didalamnya berjanji dan zikir) yang dimaksud disini adalah berupa tulisan yang mengandung unsur keagamaan seperti tauhid dan puji-pujian kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang termasuk dalam tema ini antara lain adalah *maulid syaraf al-anam*. Karya ini biasanya dibaca untuk acara maulid, membuai anak, syukuran dan lain-lain sampai sekarang pun pembacaan dari isi kitab tersebut masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Palembang

7. Warisan Intelektual Keagamaan Pada Abad XVIII

Membahas mengenai warisan intelektual Islam tidak lepas dari peran ulama-ulama yang menghasilkan karya-karya tulis. Pada abad XVIII sebagian besar karya ulama Palembang banyak membahas tentang mistisisme dan teologi

Berikut ini akan dibahas sekitar ulama-ulama Palembang pada abad XVIII dan karya-karyanya

1. Shihabuddin

Ulama dan penulis ini nama lengkapnya adalah Shihabuddin bin abdullah Muhammad. Ia hidup semasa pemerintahan Kesultanan Palembang yakni sultan ahmad najamudin, dan ia juga dikenal sebagai salah seorang pnsihat sultan dalam bidang keagamaan

Adapun karya-karya yang dapat dikenal antara lain adalah :

a. *Jauhar at-Tauhid*

Alam kitab ini merupakan terjemahan dari karya Ibrahim al-Laqani adapun isi dari kitab tersebut adalah mengenai syahadat atau kepercayaan, dan kitab tersebut ditulis dalam bentuk syair. Naskah ini tersimpan di perpustakaan nasional

b. Risalah

Adapaun jika dilihat dari isi naskah ini nampaknya dibuat berdasarkan dari kitab risalah fi at-tauhid karya syaikh ruslan ad-dimasyqi dan kitab fath ar-rahman karya zakariyya al-aniari. Dari isi kitab dapat diketahui maksudnya dituliskannya tema kemungkinan adalah untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan syirik. Sebagaimana diketahui pada masa tersebut masyarakat muslim Palembang banyak yang tersesat karna mempelajari kitab-kitab yang memuat ajaran Martabat Tujuh tanpa melalui guru yang handal. Dengan demikian kitab tersebut merupakan salah satu karya yang oleh pihak

Kesultanan sendiri dipakai sebagai senjata untuk melawan doktrin-doktrin sufisme yang dipandang menyimpang, terutama doktrin wahdah al-wujud (kesatuan wujud)

c. **Aqidah al-Anzam**

Dalam kitab ini berisi antara lain mengenai sifat dua puluh, serta ditulis dengan ringkas dan sederhana. Selain itu ada dalam kitab ini juga dibahas mengenai suatu peringatan agar mengerjakan kebaikan serta menentang kejahatan, seperti sombong dan sebagainya

2. Kemas Fakhruddin

Ulama dan penulis ini merupakan generasi sesudah Shihabuddin serta usianya lebih tua dari Abdus-Shamad al-Palimbani. Menurut Drewes dia adalah orang pertama yang mempunyai potensi untuk menerjemahkan kitab-kitab Arab. Adapun karya-karyanya antara lain adalah :

a. **Mukhtasar**

Kitab tersebut merupakan kitab terjemahan Melayu dari kitab Risalah fi-al tauhid karya Syaikh Ruslan ad-Damasyqi. Kitab ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta dengan kode BG. Mal 120

b. *Futuh asy-Syam*

c. *Tuhfah az-zaman fi Zarf ahl al-Yaman*

d. *Kwawas al-Qur'an al-azim*

3. Abdus-Shamad al Palimbani

Ulama dan penulis ini nama lengkapnya adalah Abdus-Shamad bin Abdillah al-Jawi al-Palimbani. Ia lahir kurang lebih tahun 1704 M di Palembang dan wafat kurang lebih pada tahun 1789 M. Ayahnya merupakan seorang Sayyid sedangkan ibunya wanita asli Palembang. Ia adalah seorang sufi yang hidup pada abad XVIII pada masa tersebut merupakan masa kemajuan Islam di Kesultanan Palembang. Ia dikenal sebagai penyebar

Tarekat sammaniyah dan melalui kitab-kitab yang berbahasa melayu ia memperkenalkan ajaran-ajaran sufismenya. Abdus-Shamad mengadakan penyesuaian antara inti ajaran wahdah al-wujud Ibnu Arabi dan prinsip-prinsip ajaran sufi al-Ghazali. Inti ajaran kedua tokoh tersebut, oleh Abdus-Shamad diletakkan sebagai dua tingkatan pengalaman kesufian yang berbeda namun saling melengkapi yang harus dicapai oleh seorang sufi

Ajaran tarekat sammaniyah yang berkembang dalam masyarakat Palembang nampaknya memiliki ciri neo-sufi yakni pruritas dan aktivitas. Selain itu ajaran-ajaran sufisme dari Abdus-Shamad ini terbukti sampai sekarang masih diajarkan oleh para guru tarekat selanjutnya di Palembang

Adapun karya-karya dari Abdus-Shamad al-Palimbani antara lain adalah :

a. *Zahra al-murid fi bayan Kalimat at-Tauhid*

Kitab berisi antar lain mengenai Ushuluddin dan Mantiq, dan kitab ini tersimpan di perpustakaan Nasional Jakarta dengan Kode W. 49

b. *Hidayat as-Shalihin fi Suluk Maslak al-Muttaqin*

Dalam kitab ini dibicarakan antara lain mengenai aturan-aturan syariat yang ditafsirkan secara mintis. Ia menyebutkan sebagai sebuah adaptasi dari karya al-Ghazali yakni idayah al-hidayah

c. *Sairu as-Salikin ila Ibadat Rabb al-Alamin*

Kitab ini merupakan terjemahan dari kitab al-Ghazali yakni ihya Ulum ad-din

d. *Tuhfah ar-Ragibin fi Bayan Haqiqat al-mukmin*

Kitab ini ini berisikan mengenai kepercayaan yang benar, serta ditulis guna memenuhi permintaan sultan Palembang pada masa itu. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa itu di Palembang berkembang sebuah sufisme yakni wahdah al-wujud yang kemungkinan ajaran ini di bawa kitab-kitab ajaran ulama dari Aceh yakni Hamzah Fansuri maupun

syamsuddin as-Sumantri yang terkenal dengan ajaran martabat tujuh. Menurut beberapa ulama-ulama Palembang masa itu, ajaran tersebut menyesatkan sehingga masyarakat perlu diberi tahu akan akibat dari mempelajari kitab-kitab tersebut. Untuk itulah Abdus-Shamad menulis karya tersebut diatas untuk menolak ajaran sufisme yang menyimpang.

- e. *Nasihat al-Muslim wa-tazhirat al-Mu'minin fada al-jihad fi sabillillah wa karamat al-mujahidin fi sabillillah*
Kitab ini merupakan sebuah risalah yang ditulis dalam bahasa Arab yang isinya antara lain adalah memuat peringatan keras untuk berperang sabil melawan orang-orang kafir.
- f. *Al-Urwah al-Wusqa wa silsilah al wali al-atqa*
Kitab ini ditulis dengan bahasa Arab yakni berupa kumpulan rangkaian wirit yang disarankan oleh Abdus-Shamad
- g. *Ratib Abdus-Shamad al-Palimbari*
Merupakan kumpulan wirit yang ditulis dengan bahasa Arab
- h. Kitab ilmu tasawuf
- i. Risalah Kaffiyati ar-ratib lailah al-jum'ah
- j. *Za al-Muttaqin fi tauhidi rabbi al-alamin* (bicaralah wahdah al-wujud)
- k. Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah
- l. *Mulhaq al-isra wa al-mi'raj*
- m. *Kitab al-isra wa-al mi'raj*
- n. *Mulkhisu al-tuhbati al-mafdhah min ar-rahmawati mahda alaihi as-salatu wa as salam*
- o. Puisi kemenangan kedah.

4. Muhammad Muhyiddin

Ulama ini nama lengkapnya adalah Muhammad Muhyidin bin Syeikh Shihabuddin merupakan putra dari ulama penulis yakni Shihabuddin. Ia menerjemahkan kitab Arab tentang Muhammad Samman

5. Kemas Muhammad bin Ahmad

Karya-karyanya antara lain adalah : *Nafahat ar-Rahman fi manaqib ustazna al-A'zam-as-Samman, Bahr al-Aja'ib*

6. Muhammad Ma'ruf bin Abdullah

Ia dikenal sebagai khatib pada masa Kesultanan Palembang dan karyanya antara lain adalah : Tariqah mengenai Qadiriyyah an Naqsyabandiyyah

8. Warisan Intelektual Keagamaan pada Akhir abad XIX- Awal Abad XX (Masa SMB II)

Ajaran tarekat Sammaniyah berkembang pesat di Palembang mulai abad XVIII yang disebarkan oleh Abdus-Shamad al-Palimbani. Tarekat ini tetap berkelanjutan perkembangannya di Palembang bahkan hingga saat ini. Adapun penyebarannya dilakukan oleh murid-murid Abdus-Shamad secara berkelanjutan

Ulama-ulama Palembang yang berperan dalam penyebaran Tarekat Sammaniyah ini juga merupakan ulama yang menghasilkan tulisan terutama yang bertema tasawuf. Selain itu ulama-ulama Palembang lainnya yang hidup pada rentang waktu akhir abad XIX sampai awal abad XX banyak juga yang meninggalkan karya tulis keagamaan yang bertema tasawuf, fiqh, tauhid maupun falaq.

Adapun karya yang berupa kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama pada abad XIX dan awal abad XX merupakan kontinuitas dari pemikiran keagamaan ulama Palembang

sebelumnya. Dengan kata lain kitab yang ditulis oleh ulama pada abad XVIII masih tetap digunakan pada abad XIX dan awal abad XX. Meskipun hanya beberapa yang menghasilkan karya tulis dan tidak sepopuler karya Abdus - Shamad, ulama Abad XIX dari awal abad XX pemikiran keagamaan mempunyai karakteristik tersendiri yaitu sama dengan karakteristik Islam traditional yang berpegang teguh pada teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Sedangkan bidang Fiqh berpegang teguh pada Al-Syafi'i dan bin tasawuf pada Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali.

Dalam bidang tsawuf, ulama Abad XIX dan awal abad XX masih tetap menjadi pengikut guru tarekat Sammaniyah. Masing - masing bidang tersebut tampak dalam beberapa kitab yang dijadikan rujukan oleh ulama tersebut, terutama dua karya Abdus-Shamad Al-Palimbani yang berjudul *Hidayah al-Salihin* dan *Sayr-al-Salikin*.

Adapun ulama-ulama yang menghasilkan karya tulis antara lain adalah :

1. Syeikh Muhammad Azhary bin Abdullah bin Ahmad

Ia lahir dikampung Pedatukan, Palembang pada tahun 1226 H/1811 M dan wafat serta dimakamkan di Mekah pada tahun 1291 H/1874 M. Ia dikenal sebagai pencetak Al-Qur'an di Asia Tenggara yakni sekitar tahun 1854 M. (Zulkifli, 1999 : 18)

Hasil karyanya antara lain adalah :

a. *'Athiyah al-Rahman*

Hasil karya ini selesai di tulis pada tahun 1259 H/1843 M dan dicetak pertama kali pada tahun 1304 H/1887 M di percetakan al-Mayriyah al-Kainah Mekkah. Kitab ini menguraikan kaidah - kaidah imam sebagaimana ditunjukkan dalam rukun Iman yang keenam. Inti kitab ini menjelaskan rukun-rukun iman yang diawali dengan ucapan basmalah dan hamdalah dan diakhiri dengan hamdalah dan sholawat atas Nabi SAW.

b. *Kitab Tuhfah al-Muridin*

Kitab tersebut masih berupa tulisan tangan dengan menggunakan bahasa Arab yang selesai di tulis pada tahun 1276 H/1859 M. Kitab ini merupakan penjelasan atas syair dari gurunya yakni Syeikh Ahmad Bin Qasim Al-Hasany dan membicarakan tentang ilmu falak (Ilmu tentang peredaran bintang).

2. Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud (1811-1901 M)

Ia dikenal dengan sebutan Kyai Marogan (Ki Marogan), putra seorang bangsawan Palembang yakni Masagus Haji Mahmud yang menikah dengan wanita Cina dan merupakan murid dari Abdus -Shamad al-Palimbani. (Martin Van Bruinessen, 1995 : 64). Kyai marogan banyak mendalami ilmu tasawuf dan ilmu falaq. Ia dikenal gigih dan aktif mengajar, berdakwah serta memberikan bimbingan kepada masyarakat Palembang. Ia mendirikan dua buah masjid (Masjid Ki Marogan dan Masjid Lawang Kidul) sebagai pusat pengajaran dakwah Islamnya.

Beberapa naskah peninggalannya yang dapat diidentifikasi antara lain adalah "*naskah jadwal waktu shalat lima waktu*". Naskah ini menggunakan huruf Arab dengan bahasa Arab melayu, dan huruf latin digunakan dalam penulisan angkanya. Naskah ini diawali dengan khutbah pengantar yang mencakup basmalah, tahmid, shalawt, dan dasar pembuatan jadwal waktu sholat dengan ayat al-qur'an. Naskah dibagi dalam dua kelompok kanan dan kiri yang menguraikan jadwal waktu sholat selama enam bulan secara berturut-turut.

3. Haji Muhammad Azhary bin Abdullah Bin Ma'ruf (1856-1932 M).

Ia adalah ulama yang banyak mencurahkan pada kegiatan menulis dan ia ulama paling banyak menghasilkan

karya tulis setelah abdu -Shamad al-Palimbani. Karyanya kurang lebih ada tujuh yang dapat diidentifikasi dengan tema Tauhid maupun Tasawuf, antara lain adalah : *Aqid al-Iman, Badi' al-Zaman, Taqwi, al-Qiyam, Bidayah al-Rahman, Bidayah Al-Ilmiyah fi'Aqidah al-Islamiyah Yanbaghi li Ta'lim Al-Jahiliyah, risalah fi'aqidah al-Tauhid li Ma'rifah, dan Manaqib Syaikh Muhammad Samman.*

BAB III

ELIT LOKAL TRADISIONAL DI PALEMBANG

Sebagaimana diketahui, Elit tradisional adalah orang-orang besar (priyayi) yang belum terpengaruh pemikiran Barati. Pada umumnya mereka (elit tradisional) berasal dari keluarga raja, bangsawan atau priyayi yang memperoleh status kebangsawanannya dari garis keturunan. Disamping itu ciri khusus elit tradisional seperti diungkapkan Niel⁷⁸ tersebut adalah "dualisme...orang Indonesia "...pendidikan (rasionalitas) dan takhyul". Lebih lanjut Graves⁷⁹, menyebutkan "...tingkat pengaruh yang dimiliki pihak elit tradisional dalam persaingan memperoleh kekayaan dan prestise didasarkan keturunan itu sendiri"

Sebagaimana diketahui, teori tentang elit menurut Aristoteles adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik ada di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan (aetano Mosca. Pareto menyatakan Pada setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial

⁷⁸ Niel, V. R. 1984. *Kemunculan elit Modern Indonesia*. Jakarta :Pustaka Jaya, hlm 58

⁷⁹ Graves, E. E. 2007. *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. 11

dan politik. dan kelompok kesatu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang muasik, karakter moral dan sebagainya. Teori elite menurut ahli Menurut Pareto, mereka yang menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu yang tertarik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit adalah orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada umumnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya dan pandai, mempunyai kelebihan dalam banyak bidang.

Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu, lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah *governing elite*, dan elit yang tidak memerintah *non-governing*. Lapisan yang lebih rendah, yaitu non elit. Konsep pergantian elit juga dikembangkan oleh Pareto. Ia mengemukakan berbagai jenis pergantian elit, yaitu pergantian di antara kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri dan di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan seperti individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada dan individu-individu dari lapisan ialah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada. Dengan demikian Pareto membagi elit yang berkuasa menjadi dua: elite yang sedang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak sedang memerintah (*non governing elite*). *Governing elite* terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politis sehingga bisa secara langsung mempengaruhi pada

pembuatan kebijakan. Sedangkan non governing elite adalah mereka yang memiliki kedudukan tinggi atau memiliki kapasitas lebih dalam hal tertentu dalam setrata sosial, akan tetapi tidak menduduki jabatan-jabatan politis (pemerintahan) yang secara langsung dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan sebagaimana governing elite.

Berikut ini dideskripsikan beberapa hal dan dalam berbagai perspektif mengenai Elit lokal tradisional di Palembang, baik elit yang memerintah *governing elite*, dan elit yang tidak memerintah *non-governingelite*.

A. Beberapa Zuriat Kesultanan Palembang (*Governing Elite*)

1. Sekilas Deskripsi Manuskrip-Manuskrip

Beberapa manuskrip yang dapat memberi kontribusi dalam historiografi local Palembang yang terkait dengan elit local yang dapat penulis temukan diantaranya adalah :

1. Naskah I : Manuskrip Palembang : *R.M Mansyur bin R.H Abdullah bin R.H. Hasan bin Pangeran H. Prabudiradjah Abdullah bin Sultan Mahmud Badaruddin.*

Naskah ini tersimpan di Kampung Sekanak Kota Palembang dirumah R M Abdul Hamid Hasani. Naskah ini merupakan Kompilasi naskah yang terdiri dari 3 teks, dan salah satu teks tersebut adalah teks yang berisi sejarah elit local Palembang sejak masa sebelum dan sesudah Kesultanan Palembang ada. Jenis teksnya adalah prosa/narasi dengan menggunakan aksara Arab dan Bahasa Arab-Arab Melayu. Tanggal penulisan yakni 23 jumadil awal 1342 H dan tempat penulisan di Palembang

Penulis/penyalin ada pada kolofon diakhir teks namun kurang jelas bacaannya, yang terbaca yaitu ..Raden Muhammad Mansur bin Pangeran Perabubin Susuhunan Mahmud..... namun demikian di lembar paling awal tertera nama **R.M**

Mansyur bin R.H Abdullah bin R.H. Hasan bin Pangeran H. Prabudiradjah Abdullah bin Sultan Mahmud Badaruddin.

Bahan/alas yang digunakan adalah kertas eropa bergaris seperti garis pensil, dan Warna tinta adalah hitam dan merah untuk rubrikasi. Kondisi ini naskah teks terbaca dengan baik, namun sampul telah lepas dan bekasnya masih dapat dilihat dibagian pias yakni kein coklat seperti kain kassa. Jumlah halaman : teks 1= 25 teks 2= 31 teks 3= 13. Jumlah baris per halaman rata rata adalah 9 baris dan Jarak antar baris yakni 0,5 cm. Jumlah halaman yang ditulis: 66. Jumlah lembar pelindung tidak ada dan Jumlah kuras/susunan kuras yakni 2 . Ukuran halaman yaitu 17x13 /pxl dan Ukuran pias adalah : atas/bawah 2 cm/ kanan/kiri =2,5 cm x 1 cm. Cara penggarisan adalah seperti garis dengan pensil/bawaan dari kerta eropa. Kolom berjumlah 1, sedangkan Penomoran halaman dengan catchword/kata alihan.

Iluminasi ada pada halaman pertama berupa lingkaran didalamnya terdapat tulisan : (ini kitab menyatakan perihal junjungan kita sayidina nabi maulana Muhammad saw dengan sebutan Maulid dan segala kelakuannya dan perkataannya dan budi bahasanya yang sangat) ..dan teks kedua terdapat iluminasi berupa gambar flora sebagai bingkai dan didalamnya berupa kaligrafi . namun pada teks ketiga tidak ada iluminasi.

Sampul yang digunakan tidak ada, namun terdapat bekas sampul ada di pinggir jilidan yakni berupa kain kassa berwarna coklat muda. Ukuran sampul adalah 20,5 cm x 16,5 cm, dan ukuran Rusuk 20,5 cm. Pengikat berupa benang putih.

Adapun Kolofonnya ada pada bagian akhir naskah: Inilah selesai menyurat ini Maulid pada malam Arbanga jam 12 lebih 25 menit tanggal 23 Jumadil awal 1342 H/1924 M atau 30 Januari tahun 1924 di Palembang kampong 22 Ilir oleh fakir yang hina Raden Muhammad bin Raden Muhammad bin

Pangeran Perabu bin Susuhunan Muhammaad Fi bilad Palembang..

Cara memperoleh naskah: Naskah didapat secara turun temurun dalam keluarganya. Ringkasan isi: Naskah terdiri dari 3 teks (masalah mauled Nabi Muhammad SAW; Isra'Miraj dan Sejarah. teks awal: Teks 1. Kitab mauled....Teks 2, *hadhihi risalah fi isra; wal mi'raj nabi saw...* dengan nama Allah yang amat murah.....akumulai Dan Teks 3, “ ..*alhamdulillahirabbil'alamin.....* maka adapun telah diriwayatkan sesungguhnya adalah suatu raja yang memerintah diatas tahta kerajaan ditanah Palembang daripada zyuriat raja Iskandar.. dan nama raja Sulani dan ada bagian anak dua orang laki-laki maka yang tua dijadiakannya raja memerintah dibukit seguntang...dan yaitu namanya Sultan Alim..dan yang muda dijadiakannya raja memerintah digunung Meru dan yaitu namanya Sultan Maggni Shadan antara beberapa lamanya raja Sulani itupun wafatlah dan Sultan Alim pun bertetaplah di kerajaan.....

2. Naskah II :Manuskrip Silsilah

Manuskrip (naskah kuno) ini adalah yang tersimpan pada masyarakat Palembang yakni Kms Andi Syarifuddin, S.Ag. Naskah ini berupa naskah silsilah, berupa lembaran kertas karton tipis dengan ukuran pxl/ 55 x 25 cm . Naskah ini berupa silsilah yang dibuat seperti akar pohon. Tulisan yang dipakai adalah aksara Arab bahasa Arab-MelayuRingkasan isi silsilah ini berupa asal usul dan hubungan kekerabatan para penguasa di Palembang semenjak abad XV sampai abad XIX. Silsilah kekerabatan dalam naskah ini diambil sejak masa penguasa Kerajaan Majapahid yakni Prabu Brawijaya ke-7 sampai para penguasa pada abad XIX yakni Sultan Mahmud Badaruddi II, Sultan Hussin Dhiyauddin, Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu dan Sultan Najamuddin Prabu anom.

3. Naskah III :Manuskrip Silsilah dari Kulit Kayu

Manuskrip (naskah kuno) ini adalah yang tersimpan pada masyarakat yang juga termasuk zuriat Kesultanan Palembang, yakni : R.H. Muhammad Syahmi,S.H. Beralamat di : J. Raya Bastiong Talangame RT/RW 02/01 No. 22 Ternate Selatan. Naskah ini didapatkannya secara turun temurun dari keluarganya.

Manuskrip ini ditulis di atas *kertas dluwang* (kulit kayu yang dipipihkan) dan ditulis dengan menggunakan tinta hitam menggunakan aksara Arab-Bahasa Melayu. Naskah ini berupa naskah silsilah, namun di kanan kiri serta bawah (kalimat inti) terdapat marginalia yang menjelaskan kalimat inti tersebut .

Dahulunya manuskrip ini di simpan didalam sebuah bamboo, namun saat ini oleh karena manuskrip kondisinya yang memprihatinkan/hampir lapuk maka oleh pemiliknya naskah tersebut dilaminating dengan plastic tebal dan terbagi menjadi 3 bagian (lembaran). Menurut pemiliknya semestinya naskah tersebut 4 lembar, namun karena terjadi musibah sehingga tinggal 3 lembar. Naskah ini berisi silsilah para penguasa di Palembang, sejak kedatangan para bangsawan di Jawa pasca terjadinya huru-hara antara Kerajaan Demak dan Pajang sampai dengan Para Sultan-Sultan yang berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam, yang terakhir disebutkan Sultan Mahmud Badaruddin II dengan keturuannya.

Naskah ini kondisi kertasnya banyak berlubang sehingga banyak kata-kata yang tidak terbaca lagi.

Naskah ini berdasar *kolofon* yang ada, ditulis pada tahun 1263 H atau 1844 M, berarti naskah ini pada saat ditulis Sultan Mahmud Badaruddin II masih hidup. Naskah ini apabila dijadikan sebagai sumber dalam penulisan sejarah termasuk sumber tertulis yang *otentik* dan *kredibel*.

Kutipan Kolofon Naskah :

Bandar Keraton 25 hari daripada bulan mared

*sanati 1263 H Sultan Akbar/Ali Khasan
Palembang seorang tinggal
Dari Tanah Jawa menurun
Dari pada (masa akan
....Beroleh dari orang
Palembang kampong (papulun/patalan) lama
Dari tanah lama lari
Paduka Suhunan Raja-raja
Dari Bandar Palembang...*

B. Analisis Isi Teks dan Konteks

1. Biografi“Sultan Mahmud Badaruddin III (SMB II)

Sultan Mahmud Badaruddin (SMB II) merupakan sultan ke-7 pada Kesultanan Palembang Darussalam,⁸⁰ ia memerintah dari tahun 1804-1821 M. Nama asli dari Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) adalah Raden Muhammad Hasan, ia lahir di Palembang pada tahun 1182/1768 M dan merupakan anak pertama laki-laki dari Sultan Muhammad Baha'uddin (Sultan ke-6) dengan istrinya yang bernama Ratu Agung binti Dato' Manaf Ibn 'Abdullah Khadadi,⁸¹ Ia dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu pada saat bersamaan dengan ayahnya diangkat sebagai sultan yang ke-6 di Kesultanan Palembang Darussalam.

Mengenai keberadaan saudaranya yang seayah dan seibu dapat dibaca dengan lengkap pada naskah ke-1, yakni ;
“Adapun **Sultan Suhunan Mahmud Badaruddin** itu *sembilan bersaudara yang se-ibu se-bapak* , yaitu ;

1. Yang pertama **Raden Ayu Purba Negara Napisyah**
2. Yang kedua **Raden Ayu Mangku Negara Hamidah**

⁸⁰ Sultan Mahmud Badaruddi II memerintah secara bersamaan dengan Sultan Ahmad Najamuddin disebabkan pada masa tersebut Kesultanan Palembang berada dalam tekanan Kolonial Inggris dan Belanda

⁸¹ Informasi ini lebih jelas ada pada naskah yang ke- 3,

3. Yang ketiga **Raden Ayu Wikrama Khosiyah**
4. Yang keempat **Sultan Suhunan Mahmud Badaruddin***
5. Yang kelima **Suhunan Husin Dhiyauddin**
6. Yang keenam **Raden Ayu Wikrama Bariyah**
7. Yang ketujuh **Raden Muhammad Hanafiah**
8. Yang kedelapan **Pangeran Bupati Panembahan Khamim**
9. Yang kesembilan **Pangeran Adipati "Abdurrahman"**

Naskah pertama juga menyebutkan bahwa; "*Isteri Sultan Suhunan Mahmud Badaruddin itu SEMBILAN orang, maka beranak Sultan Suhunan Mahmud Badaruddin dengan isterinya yang sembilan orang itu jumlah banyaknya putra, Seri Paduka Sultan Suhunan Mahmud Badaruddin itu enam puluh dua (62) , dari pada mereka itu putra dan puteri Seri Paduka Sultan Suhunan Mahmud Badaruddin yang beranak yaitu hanya dua puluh lima orang (25) yaitu "*

1. **Pangeran Ratu Ahmad Najamuddin * (wafat di Ternate)**
2. **Pangeran Bupati Hamzah**
3. **Pangeran Prabu Kusomo Hamid**
4. **Raden Ayu Purbaya Fatimah**

Maka ibunya itu yaitu *Ratu Sepuh Asma...* dan

1. **Pangeran Prabu Nandito Muhammad**
2. **Raden Ayu Kerama Nata**
3. **Pangeran Prabu Dilaga Mukhsin**
4. **Pangeran Surya Dilaga Thoha**

Ibunya itu yaitu *Ratu Anom Qoyimah*

1. **Raden Ayu "Azimah**
2. **Pangeran Prabu Diratjah "Abdullah ***
3. **Pangeran Prabu Wikrama "Abdurrahman**

Maka yaitu ibunya ; *Nyimas Zubaidah*, yang digelaran dia **Mas Ayu Ratu Ulu**

1. **Pangeran Prabu Menggala 'Umar**
2. **Pangeran Prabu Diwangsa Muhammad Zain**
3. **Pangeran Prabu Nata Menggala "Alwi**

Ibunya itu yaitu**Mas Iroh** , yang digelar kan dia **Mas Ayu Ratu Ilir** orang *Negeri Mentok*

1. **Pangeran Prabu Dikara Muhammadyas (in)**
2. **Pangeran Surya Kusumo Muhammad Syakh**
3. **Pangeran Suryo Menggolo Makhdhi**
4. **Pangeran Kusumo Diratjah Muhammad Sofyan**
5. **Pangeran KusumoMuhammad Hanan**

Maka yaitu ibunya itu **Raden Ayu Shorikha** binti **Pangeran Jaya Dikarabin Pangeran Dipati Banjar Kusumo** bin **Sultan Mahmud Badaruddin....**yang digelarkan dia; **Ratu Alit**.

1. **Pangeran Suta Diratdjah Abu Bakar**
2. **Raden Ayu Keramo Diratdjah Sulaiman**

Ibunya itu ; *Nyimas Jairoh*

1. **Pangeran Suto Wijaya "Usman**
2. **Pangeran Suto Keramo ...**

Maka yaitu Ibunya *Nyayu Sholikha*

1. **Pangeran Putradinata "Ali**

Yaitu ibunya *Nyayu Robingah*

1. **Raden Ayu Keramo Jaya Khotimah**

Maka yaitu ibunya ; *Embok Pati Rasmi* adanya.

Jika dianalisis dari beberapa teks naskah-naskah tersebut maka diceritakan juga sewaktu ia meninggalkan Palembang menuju tempat pengasingannya yakni "Ternate", selain itu juga diceritakan keberadaan zuriat "**Sultan Mahmud Badaruddin III (SMB II)**" sewaktu di Ternate . namun demikian sebelum dibahas lebih jauh mengenai zuriat Kesultanan Palembang Darussalam di Ternate maupun di Palembang, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari zuriat itu sendiri. Kata zuriat berasal dari bahasa asing (Arab) *zurriyat* yang berarti keturunan, anak keturunan dan keluarga dan keturunan. Di dalam al-Qur'an al-Karim kata *zurriyat* menjelaskan tentang keturunan dari para nabi, kaum dan kelompok masyarakat yang dinisbahkan

kepada seseorang. Adapun ringkasan keberadaan SMB III sewaktu berada di Ternate dapat dijelaskan sebagai berikut,

Keberadaan zuriat Sultan Mahmud Badaruddin II (selanjutnya disebut SMB II) di Ternate sejak kedatangan mereka pada saat dibawa Kolonial Belanda pada tahun 1821 hingga saat ini membuktikan bahwa sejarah perjuangan tokoh dari Palembang yang telah dianugerahi sebagai pahlawan nasional ini memberikan jejak sejarah yang patut menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya, khususnya panutan dalam memperjuangkan kepentingan negara dan bangsa.

Kisah perjalanan para keluarga dan pengikut SMB II banyak terdapat dalam buku harian Gubernur Jenderal Belanda untuk Keresidenan Palembang dan Keresidenan Ternate sendiri, disamping catatan dan kesaksian para keturunan SMB II sendiri secara turun-temurun.

Sumber naskah I menceritakan : dalam pengasingannya di Ternate, isteri-isteri SMB II yang turut serta dalam pengasingan tersebut adalah Ratu Anom Kosima, Ratu Alit, Mas Ayu Ratu Ulu dan Mas Ayu Ratu Ilir Ratu Anom Kosima dalam sumber manuskrip lainnya (manuskrip III) disebut namanya dengan Ratu Anom Qoyimah. Ia memiliki 10 anak dan 2 diantaranya meninggal ketika masih bayi di Palembang. Adapun 8 anak lainnya antara lain adalah :

- (1) Pangeran Prabu Nandito Muhammad, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.
- (2) Raden Ayu Kerama Nata Khasanan, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.
- (3) Pangeran Prabu Dilaga Mukhsin, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.
- (4) Raden Ayu Fatimah, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.
- (5) Raden Ayu Salma, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.

- (6) Pangeran Surya Dilaga Thoha, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.
- (7) Raden Ayu Sekha, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.
- (8) Raden Ayu Nur, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.

Dari beberapa anak tersebut diatas, yang kemudian dapat memberikan keturunan hanya empat anak, yaitu Pangeran Prabu Nandito Muhammad, Raden Ayu Kerama Nata Khasanan, Pangeran Prabu Dilaga Mukhsin, dan Pangeran Surya Dilaga Thoha.

Ratu Alit dalam sumber manuskrip lainnya disebut namanya dengan Raden Ayu Shorikha, yakni anak dari Pangeran Jaya Dikarabin Pangeran Dipati Banjar Kusumo. Ia memiliki 15 anak, yaitu:

- (1) Pangeran Prabu Dikara Muhammad Yasin, lahir di Palembang dan wafat di Manado.
- (2) Raden Ayu Soha, lahir di Palembang dan wafat di Palembang ketika masih bayi.
- (3) Raden Ayu Salma, lahir di Palembang dan wafat di Palembang ketika masih bayi.
- (4) Raden Ayu Sidah, lahir di Palembang dan wafat di Timor Kupang.
- (5) Raden Qosim, lahir di Palembang
- (6) Raden Ayu Nur, lahir di Ternate dan wafat di Ternate ketika masih bayi.
- (7) Pangeran Surya Kusumo Muhammad Syakh*, lahir di Ternate dan wafat di Palembang
- (8) Raden Ayu Ayu, lahir di Ternate dan wafat di Ternate ketika masih bayi
- (9) Pangeran Suryo Menggolo Makhdhi*, lahir di Ternate wafat di Palembang.
- (10) Pangeran Kusumo Nindito Da-in, lahir di Ternate dan wafat di Ternate.

- (11)Raden Ayu Zahro, lahir di Ternate dan wafat di Ternate.
- (12)Raden Ayu Habiba, lahir di Ternate dan wafat di Ternate.
- (13)Raden Ayu Latifa, lahir di Ternate dan wafat di Ternate.
- (14)Pangeran Kusumo Diratjah Muhammad Sofyan (dalam sumber lain Sapin), lahir di Ternate dan wafat di Banyuwangi.
- (15)Pangeran Kusumo Dimokayo Muhammad Hanan, lahir di Ternate dan wafat di Palembang. Ia adalah anak SMB II yang terakhir selama di Ternate

Dari beberapa anak tersebut, yang kemudian dapat memberikan keturunan hanya 5 anak yaitu Pangeran Prabu Dikara Muhammad Yasin, Pangeran Surya Kusumo Muhammad Syah, Pangeran Suryo Menggolo Makhdhi, Pangeran Kusumo Diratjah Muhammad Sofyan, dan Pangeran Kusumo Dimokayo Muhammad Hanan. Beberapa anaknya yang tidak meninggal di Ternate, di antaranya karena seluruh keturunan SMB II yang berada di Ternate diizinkan untuk kembali ke Palembang atau ke daerah lainnya, setelah SMB II meninggal.

Mas Ayu Ratu Ulu dalam sumber manuskrip lainnya disebut namanya yang asli dengan nama Nyimas Zubaidah yakni anak dari Kemas Haji Muhammad. Ia memiliki 9 anak (3 laki-laki dan 6 perempuan). Adapun ke-9 anak tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Raden Ayu Kramo Diwongso Najimah, lahir di Palembang dan wafat di Palembang
- (2) Raden Ayu Azimah (istri dari Sayyid Umar Assegaf), lahir di Palembang dan wafat di Ternate.
- (3) Pangeran Prabu Diratjah "Abdullah*", lahir di Palembang dan wafat di Palembang
- (4) Raden Ayu Naimah, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.

- (5) Pangeran Prabu Wikrama "Abdurrahman*", lahir di Palembang dan wafat di Palembang
- (6) Pangeran Prabu Tohir, lahir di Palembang dan wafat di Palembang
- (7) Raden Ayu Zakiah, lahir di Palembang dan wafat di Mekkah
- (8) Raden Ayu Hajima, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.
- (9) Raden Ayu Amanah, lahir di Ternate dan wafat di Ternate.

Dari beberapa anak tersebut di atas, yang kemudian dapat memberikan keturunan hanya 3 anak, yaitu Raden Ayu Azimah, Pangeran Prabu Diratjah Abdullah, dan Pangeran Prabu Wikrama Abdurrahman.

Mas Ayu Ratu Ilir dalam sumber manuskrip disebut namanya yang asli dengan nama *Nyimas Iroh*, ia berasal dari negeri Mentok .Ia memiliki 9 anak (5 laki-laki dan 4 perempuan). Kesembilan anak tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Pangeran Prabu Menggala Umar, lahir di Palembang dan wafat di Timor Kupang.
- (2) Pangeran Prabu Diwangsa Muhammad Zain, lahir di Palembang dan wafat di Ternate.
- (3) Raden Ayu Aziza, lahir di Palembang dan wafat di Banyuwangi
- (4) Raden Mansyur, lahir di Palembang dan wafat di Ternate
- (5) Raden Ayu Mariam, lahir di Palembang dan wafat di Mentok
- (6) Pangeran Idrus, lahir di Ternate dan wafat di Ternate
- (7) Raden Ayu Cik, lahir di Ternate dan wafat di Ternate
- (8) Pangeran Prabu Nata Menggala Alwi, lahir di Ternate dan wafat di Mentok
- (9) Raden Ayu Alwiyah, lahir di Ternate dan wafat di Ternate.

Dari beberapa anak tersebut diatas, yang kemudian dapat memberikan keturunan hanya 3 anak yaitu Pangeran

Prabu Menggala Umar, Pangeran Prabu Diwangsa Muhammad Zain, dan Pangeran Prabu Nata Menggala Alwi.

Berdasarkan catatan naskah yang ke-1 dijelaskan bahwa setelah 10 tahun wafatnya SMB II di Ternate, Governement Hindia Belanda mengambil kebijakan untuk mengizinkan para keluarga dan pengikut SMB II pulang ke Palembang dan difasilitasi dengan perjalanan kapal laut.

Manuskrip ke-1 juga menyebutkan bahwa " *Pada hijrah nabi saw sanati seribu duaratus tujuh puluh (1270 H), bulan Robi'ul Akhir sekalian anak-anak dan cucu-cucu Sultan Suhunan Mahmud Badaruddin dipanggil oleh "Residen" Ternate , dan diterangkan oleh Residen Ternate menurut -Besluit- Gupernement- dari Batavia kepada Residen Palembang, .." kalau suka pulang ke Palembang apabila sudah sampai di Palembang Residen Palembang mesti pelihara dan perhatikan dengan baik-baik anak cucu Raja-Raja dari Tanah Jawa"*, dan andai kalau mau tinggal di Ternate juga Residen Ternate buat demikian itu juga..(mesti pelihara dan perhatikan dengan baik-baik anak cucu Raja-Raja dari Tanah Jawa) . Dan pada tahun (sanati) seribu dua ratus tujuh puluh (1270 H) malam Sabtu tanggal dua puluh sembilan (29) bulan Dzulhijah anak Cucu Sultan Suhunan Mahmud Badaruddin sampai di Palembang pulang dari Ternate dan adalah wafat itu terkumpul semuanya putra dan puteri Paduka Sultan Suhunan Mahmud Badaruddin di Palembang jumlahnya masih dua belas (12) orang yang laki-laki, dan enam (6) orang yang perempuan, jadi jumlahnya delapan belas (18) orang....{Ghofurullahu lahum wakila al-muslimina ajma'ina khasbunallahu wa ni'mal wakil wa la khaula wa la kuwata illa billahil 'aliyul 'dhim..}ket : jadi yang masih di Ternate anaknya masih 44 orang

Dari sumber di atas jelas tampak bahwa keturunan SMB II ketika kembali ke Palembang, ternyata mereka tetap dalam pengawasan pihak pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini beralasan mengingat konsekuensi dari status SMB II yang sebelumnya merupakan sebagai seorang tahanan politik.

Dalam manuskrip ke-1 disebutkan juga, *“Adapun Putra Seri Paduka Sultan Susuhunan Mahmud Badaruddin sampai di Palembang pulang dari Ternate pada malam sabtu yang akhir tahun yaitu sembilan likur (=29) hari bulan Dzulhijah di dalam tahun..seribu dua ratus delapan puluh dari pada hijrah (1280 H), Dan pada tahun Hijrah seribu tiga ratus tujuh belas (1317 H) pada fajar selasa yang keenam likur (=26) hari bulan Dzulkaidah di dalam Negeri (Batavia..)wafat Paduka Pangeran Kusumo Diratdjah Muhammad Sofyan, ia keluar dari Palembang pada tahun seribu dua ratus sembilan puluh delapan (1298 H) dan pada malam Itsnain yang ke sepuluh hari bulan Dzulkaidah telah habislah putra-putra Seri Paduka Sultan Suhunan Mahmud Badaruddin.”*

C. Bagan Kekerabatan Elit Lokal Tradisional Palembang berdasar Manuskrip-Manuskrip

Setelah membaca naskah-naskah yang ada maka tersusunlah silsilah dan kekerabatan Elit Lokal Palembang sebagaiberikut :

**BAGAN 1
SILSILAH RAJA-RAJA PALEMBANG**



Keterangan Bagan 1:



= Bangsawan Jawa



= Raja-raja Palembang



= laki-laki



= perempuan



= hubungan perkawinan

┌───┐ = hubungan darah

R1

R1.1 = **Kyai Gede Ing Suro Tuo** (tidak memiliki anak)

R1.2 = Nyai Gede Ing Ilir

R1.2H = Kyai Gede Ing Ilir

R1.3 = Nyai Gede Patanian (wafat di Patani)

R1.4 = Sangaji Kidul

R1.5 = Nyai Karing Karang Tengah (Nyai Gede Ing Karang Tengah)

R1.6 = Kyai Ario Kebon Jati

R2

R2.1 = **Ki Mas Anom (981 H)**

R2.2 = Kyai Mas Aryo

R3

R3.1 = Nyai Gede Pembayun (Nyai Qodiah)

R3.1H1 = Kyai Tumenggung Mancanegara

R3.1H2 = Kyai Kemas Tengah

R3.2 = Ratu Mas Adipati

R3.3 = Nyi Mas Adipati

R3.3H = **Ki Mas Adipati**

R3.4 = **Pangeran Madi Ing Angsoko (Pangeran Madi Ing Soko)**

R3.5 = **Pangeran Mading Ing Alit**

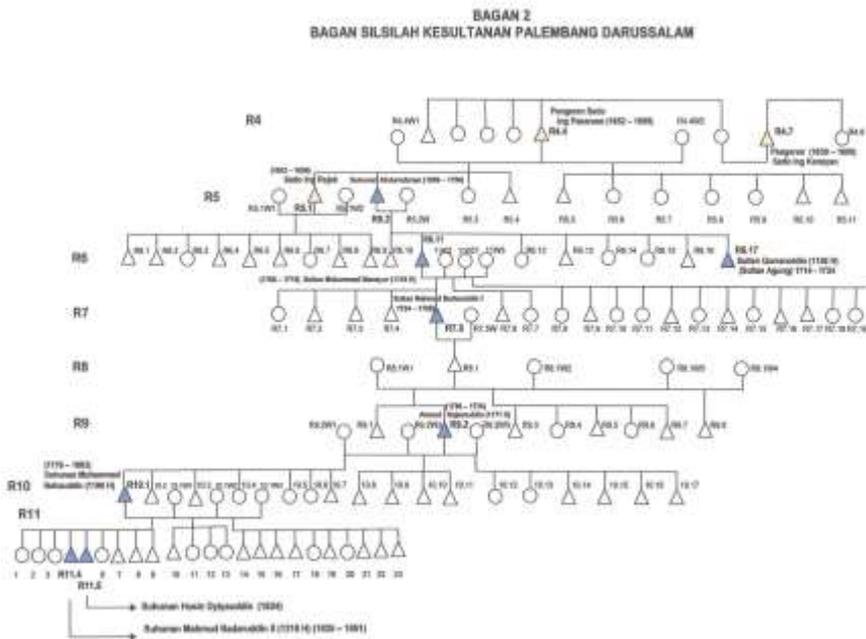
R3.6 = **Pangeran Sedo Ing Puro**

R3.7 = Nyi Mas Kember I

R3.7H = Demang Wirirayat
 R.3.8 = Nyi Mas Kember II

R4

R4.4 = **Pangeran Sedo Ing Pasarean**
 R4.4W1 = **Ratu Mas Mangkurat**



R4.4W2 = **Ratu Mas Tumenggung**
 R4.7 = **Pangeran Sedo Ing Kenayan**

Keterangan Bagan 2:

-  = Raja-raja Palembang
-  = Sultan Palembang (sudah berbentuk Kesultanan Palembang Darussalam)

R4

- R4.4 = Pangeran Sedo Ing Pasarean
- R4.4W1 = Ratu Mas Mangkurat
- R4.4W2 = Ratu Mas Tumenggung
- R4.7 = Pangeran Sedo Ing Kenayan

R5

- R5.1 = Pangeran Sedo Ing Rejek/Pangeran Ratu (1062 H)**
- R5.1W1 = Ratu Sepuh
- R5.1W2 = Ratu Anom
- R5.2 = Suhunan Abdurrahman**
- R5.2W = Ratu Agung
- R5.3 = Mas Ayu Belitung
- R5.4 = Raden Aryo
- R5.5 = Ratu Mas Tumenggung Bagus Penghulu
- R5.6 = R. A. Pulung Jiwo
- R5.7 = R. A. Mira
- R5.8 = R. A. Penghulu
- R5.9 = R. A. Aryo Pinular
- R5.10 = Mas A. Kadiah/Raden Nyotro Kusumo
- R5.11 = Mas A. Jailaini

R6

- R6.1 = Pangeran Mangkurat
- R6.2 = Pangeran Dipo Kusumo
- R6.3 = Ayu Adipati
- R6.4 = Raden....
- R6.5 = Raden Sujana
- R6.6 = Pangeran Dipo. Kusumo
- R6.7 = Raden Ayu....(tidak teridentifikasi dengan jelas, sumber manuskrip tidak terbaca)
- R6.8 = Raden.....(tidak teridentifikasi dengan jelas, sumber manuskrip tidak terbaca)
- R6.9 = Raden(tidak teridentifikasi dengan jelas, sumber manuskrip tidak terbaca)

- R6.10 = Pangeran Adipati
- R6.11 = **Sultan Muhammad Mansyur (1118 H)**
- R6.11W2 = Nyimas Sengo
- R6.11W1 = anaknya Raden Aryo bin Pangeran Sedo Ing Pasarean
- R6.11W3 = Ratu Mas Degu (janda dari kakak Sultan Mansyur)
- R6.12 = R. A. Dipo Kusumo
- R6.13 = Pangeran Tumenggung
- R6.14 = R. A. Aryo Mangkurat
- R6.15 = R.A. Dito Kusumo
- R6.16 = Raden Kusumo Marta
- R6.17 = **Sultan Qomaruddin/Sultan Agung (1126 H)**

R7

- R7.1 = R.A. Garian
- R7.2 = Pangeran Keraton

- R7.3 = Pangeran Dipo Kusumo
- R7.4 = Sultan Alimuddin Sultan Anom
- R7.5 = **Sultan Mahmud Badaruddin I (1136 H)**
- R7.6 = Raden Purboyo
- R7.7 = R. A. Pamangku/R.A. Martawijaya
- R.7.8 = Masayu Tiba
- R.7.9 = Pangeran Adia Manggala
- R.7.10 = Ratu Mas Gelamak
- R.7.11 = Raden Nayu Samadi
- R.7.12 = Raden Sulub
- R.7.13 = Raden Nayu Mandaraga
- R.7.14 = Raden Badut bergelar Pangeran Adipati
- R.7.15 = Raden Nayu Patih bergelar Raden Nayu Penghulu
- R.7.16 = Raden Balai Gedih bergelar Pangeran Adipati
- R.7.17 = Raden Bali Kecik bergelar Pangeran Wijayakrama
- R.7.18 = Raden Nayu Gedih
- R.7.19 = Raden Nayu Kecik
- R7.20 = Raden Nayu Penengah

R8

- R8.1 = tidak teridentifikasi
- R8.1W1 = tidak teridentifikasi
- R8.1W2 = tidak teridentifikasi
- R8.1W3 = tidak teridentifikasi
- R8.1W4 = tidak teridentifikasi

R9

- R9.1 = tidak teridentifikasi

R9.2	=	tidak teridentifikasi
R9.2W1	=	R. A. Ayu Murati (Ratu Sepuh)
R9.2W2	=	tidak teridentifikasi
R9.2W3	=	tidak teridentifikasi
R9.3	=	tidak teridentifikasi
R9.4	=	tidak teridentifikasi
R9.5	=	tidak teridentifikasi
R9.6	=	tidak teridentifikasi
R9.7	=	tidak teridentifikasi
R9.8	=	tidak teridentifikasi

R10

R10.1	=	Suhunan Muhammad Bahauddin (1190 H)
R10.1W1	=	Mas Ayu
R10.1W2	=	Mas Ayu
R10.1W3	=	Mas Ayu Rahma
R10.2	=	Pangeran Dipo
R10.3	=	Pangeran Purbaya
R10.4	=	R. A. Jaya Kusuma
R10.5	=	R. A. Adi Wijaya
R10.6	=	R. A.Wikrama (tidak teridentifikasi dengan jelas, sumber manuskrip tidak terbaca)
R10.7	=	Raden..... (tidak teridentifikasi dengan jelas, sumber manuskrip tidak terbaca)
R10.8	=	tidak teridentifikasi
R10.9	=	tidak teridentifikasi
R10.10	=	tidak teridentifikasi
R10.11	=	tidak teridentifikasi
R10.12	=	tidak teridentifikasi
R10.13	=	tidak teridentifikasi

- R10.14 = tidak teridentifikasi
- R10.15 = tidak teridentifikasi
- R10.16 = tidak teridentifikasi
- R10.17 = tidak teridentifikasi

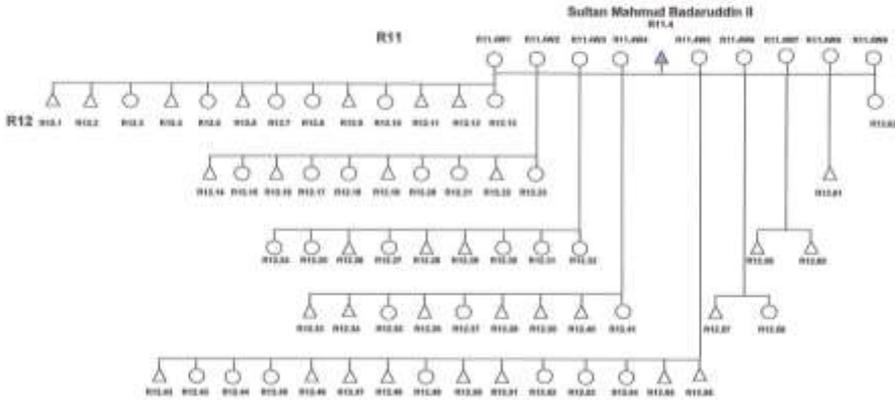
R11

- R11.1 = R.A. Purba Negara/Napisyah
- R11.2 = R.A. Mangku Negara/Hamidah
- R11.3 = R.A. Nata Wikrama Khosiyah
- R11.4 = Suhunan Mahmud Badaruddin II (1218 H)**
- R11.5 = Suhunan Husin Dyiyauddin**
- R11.6 = R.A. Wikrama Bariyah
- R11.7 = R. Muhammad Hanafiah
- R11.8 = Pangeran Bupati Panembahan Hamin
- R11.9 = Pangeran Adipati Abdurrahman

- R11.10 = Pangeran Jaya Krama
- R11.11 = R.A. Dita
- R11.12 = R.A. Marta
- R11.13 = R.A. Citra Wikrama

- R11.14 = Pangeran Nato Kusumo
- R11.15 = Pangeran Nati Pandito
- R11.16 = Pangeran Nato Wiramo
- R11.17 = Pangeran Nato Kusumo
- R11.18 = R. A. Zakiyah
- R11.19 = Pangeran Nato Wijayo
- R11.20 = R. A. Halimah
- R11.21 = Pangeran Nato Wijayo
- R11.22 = Pangeran ... (tidak teridentifikasi dengan jelas, sumber manuskrip tidak terbaca)
- R11.23 = Raden Ibrahim

BAGAN 3
KELUARGA INTI SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II



Keterangan Bagan3:

- R11.4  = **Sultan Mahmud Badaruddin II**
- R11.4W1 = Ratu Sepuh Asma
- R11.4W2 = Ratu Anom Qoyimah
- R11.4W3 = Mas Ayu Ratu Ulu (Nyi Mas Zuhidah)
- R11.4W4 = Mas Ayu Ratu Ilir (Nyi Mas Iroh)
- R11.4W5 = Ratu Alit
- R11.4W6 = Nyi Mas Jairoh (Jairan)
- R11.4W7 = Nyayu Sholikha (Soleha)
- R11.4W8 = Nyayu Robingah (Robiah)
- R11.4W9 = Embok Pati Rasmi

R11.4W1

- R12.1 = Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu
- R12.2 = Pangeran Bupati Hamzah

- R12.3 = R. A. Halimah
- R12.4 = Pangeran Prabu Kusumo Abdul Hamid
- R12.5 = R. A. Purbaya Fatimah
- R12.6 = Pangeran Prabu Wijayo Husin
- R12.7 = R. A. Azima
- R12.8 = tidak teridentifikasi namanya (wafat pada saat masih bayi)
- R12.9 = tidak teridentifikasi namanya (wafat pada saat masih bayi)
- R12.10 = tidak teridentifikasi namanya (wafat pada saat masih bayi)
- R12.11 = tidak teridentifikasi namanya (wafat pada saat masih bayi)
- R12.12 = tidak teridentifikasi namanya (wafat pada saat masih bayi)
- R12.13 = tidak teridentifikasi namanya (wafat pada saat masih bayi)

R11.4W2

- R12.14 = Pangeran Prabu Nindito Muhammad
- R12.15 = R. A. Kusumo Ratu Hasan (kramo Nato Hasanan)
- R12.16 = Pangeran Prabu Dilago Muhsin
- R12.17 = R. A. Fatimah
- R12.18 = R. A. Salma
- R12.19 = R. Suryo Dologo Toha
- R12.20 = R. A. Jeka (Seha)
- R12.21 = R. A. Nur
- R12.22 = tidak teridentifikasi namanya (wafat pada saat masih bayi)

R12.23 = tidak teridentifikasi namanya (wafat pada saat masih bayi)

R11.4W3

R12.24 = Raden Ayu Kramo Diwangso
R12.25 = R. A. Azima
R12.26 = Pangeran Prabu Dirajo Abdullah
R12.27 = R. A. Nazima
R12.28 = Pangeran Prabu Wikramo Abdurahman
R12.29 = Pangeran Prabu Tohir
R12.30 = R. A. Zakiah
R12.31 = R. A. Hazimah
R12.32 = R. A. Aminah

R11.4W4

R12.33 = Pangeran Prabu Menggalo Umar
R12.34 = Pangeran Prabu Diwangso Zen
R12.35 = R. A. Aziza
R12.36 = Raden Masyhur
R12.37 = R. A. Mariam
R12.38 = Pangeran Idus
R12.39 = R. A. Cik
R12.40 = Pangeran Prabu Nato Menggalo
R12.41 = R. A. Alwiah

R11.4W5

R12.42 = Pangeran Prabu Dikaro Yasin
R12.43 = R. A. Seha

- R12.44 = R. A. Salma
R12.45 = R. A. Sidah
R12.46 = Raden Kosim
R12.47 = Raden Ayu Nur
R12.48 = Pangeran Suryo Kesumo Syekh
R12.49 = R. A. Ayu
R12.50 = Pangeran Kesumo Menggalo Mahdor
R12.51 = Pangeran Kesumo Nindito Da -in
R12.52 = R. A. Zahra
R12.53 = R. A. Ayu Habiba
R12.54 = R. A. Latipa
R12.55 = Pangeran Kesumo Dirajo Muhammad
Sapin
R12.56 = Pangeran Kesumo Dimekayo Hanan

R11.4W6

- R12.57 = Pangeran Suto Dirajo Abubakar
R12.58 = Raden Ayu Kramo Dirajo Salima

R11.4W7

- R12.59 = Pangeran Suto Wijayo Usman
R12.60 = Pangeran Suto Kramo

R11.4W8

- R12.61 = Pangeran Putero Dinato Ali

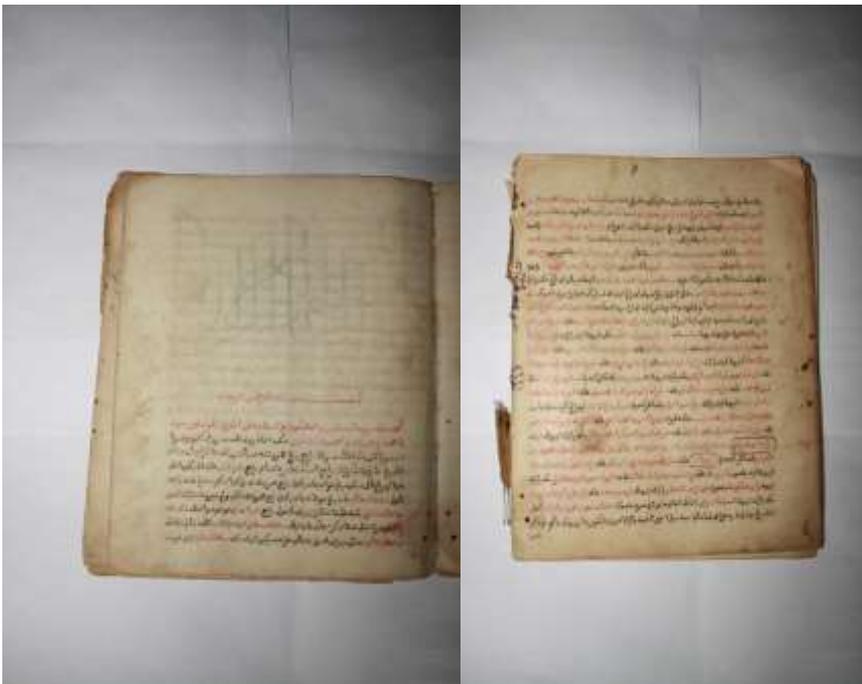
R11.4W9

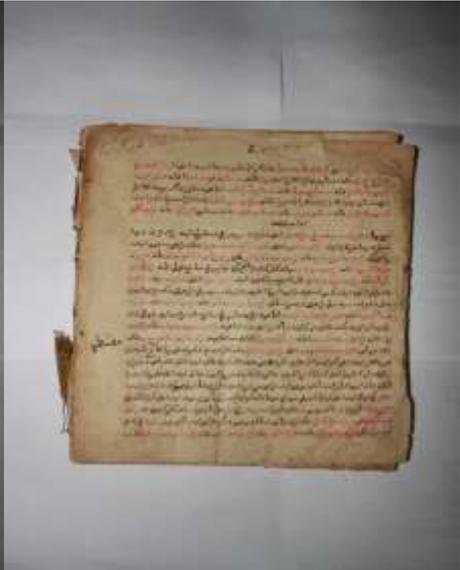
R12.62 = R. A. Kramo Jayo (R. A. Hatima)

Sumber: diolah dari berbagai sumber, yaitu

1. Naskah Palembang Arab-Melayu R.M Mansyur bin R.H. Abdullah bin R.H. Hasan bin P. H. Prabudiradja Abdullah bin Sultan Mahmud Badaruddin II
2. Naskah Silsilah dengan sumber naskah Andi S.
3. Naskah Asal-Usul Hikayat Raja-raja Palembang
4. Naskah silsilah terbuat dari kulit kayu dengan pemilik naskh Raden Syahmi
5. *Algmene verslag tahun* 1834 dan 1835

Lampiran Foto-foto Naskah :







BAB IV

ELIT LOKAL MODERN DI PALEMBANG

Istilah elit modern mungkin sangat jarang didengar saat ini di Indonesia pada umumnya dan di Palembang khususnya dalam perspektif sejarah. Elit modern itu sendiri dianggap begitu penting dan menarik, karena merupakan bagian penting dari suatu rentetan peristiwa seputar sejarah pendidikan di Indonesia. Jadi, pada masa sebelum kolonialisasi Belanda hingga pada masa politik etis di Indonesia, terdapat satu kesatuan budaya asli yang masih tradisional yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kebudayaan asli ini masih dijaga eksistensinya oleh masyarakat Indonesia, seperti pengabdian kepada raja, pemilik tanah hingga pada kelayakan perolehan pendidikan hanya pada golongan bangsawan. Maka muncullah golongan elit tradisional seperti raja, tuan tanah dan bangsawan yang memiliki harkat, martabat dan derajat sangat tinggi di Indonesia dikarenakan kedudukan atau jabatan yang dipegangnya.

Terjadi lonjakan perubahan sangat signifikan pada persepsi dan budaya masyarakat terhadap golongan elit setelah terjadi politik etis di Indonesia. Setelah orang-orang pribumi yang mampu bersekolah dan memiliki prestasi di lapangan, timbul persepsi baru dari masyarakat Indonesia pada saat itu menanggapi mereka yang terpelajar sebagai golongan elit modern. Golongan elit yang mampu eksis dan terpandang tanpa ada hubungan kekerabatan dengan kerajaan atau dengan bangsawan.

Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang mendasar dalam membicarakan tentang elit local modern ini, diantaranya adalah: apa latar belakang munculnya elit local

modern ?, Bagaimana proses kemunculan elit local modern di Palembang ?.

A. Sekilas Tentang Politik Etis

Selintas kemunculan elit modern tidak bisa dipisahkan dari peristiwa politik etis yang terjadi di Indonesia. Politik etis merupakan gerbang perubahan budaya tradisional dalam hal pandangan hidup kepada modernisasi ala Barat melalui pendidikan. Seperti disebutkan Ricklef⁸² bahwa “kaum sosial demokrat telah berusaha mengeluarkan kritikan tajam terhadap pemerintah Belanda dalam hal eksploitasi kekayaan alam dan manusia di Indonesia. Telah terjadi keadaan ekonomi dan kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Indonesia selama masa kolonial”.

Setelah menuai banyak kritikan dari golongan sosial demokrat dalam hal kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia, maka pemerintah kolonial melonggarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat eksploitasi dalam bentuk politik etis. Salah satu kebijakan dalam politik etis adalah penyelenggaraan pendidikan pada rakyat Indonesia. Setelah kebijakan politik etis ini diterapkan banyak rakyat Indonesia bisa mengenyam pendidikan di sekolah umum. Meski awalnya hanya keluarga bangsawan dan orang kaya yang mampu bersekolah, namun lama-lama kelamaan rakyat biasa bisa bersekolah di sekolah umum.

Niel⁸³ menyebutkan bahwa “Hurgronje banyak menyumbangkan saran kepada pemerintah kolonial untuk memberikan pendidikan yang bercirikan Barat kepada golongan elit pribumi”. Namun menurut Suryanegara hal ini

⁸² Ricklef, H. C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Modern, hlm. 227

⁸³ Niel, V. R. 1984. *Kemunculan elit Modern Indonesia*. Jakarta :Pustaka Jaya, hlm. 55

dianggap sebagai sebuah pendangkalan akidah Islam. Suryanegara⁸⁴ menyebutkan bahwa “politik etis merupakan praktik imperialisme gaya baru yang diciptakan oleh Belanda. Khusus pada pendidikan, pemerintah kolonial Belanda sengaja merubah sistem pendidikan agama Islam ala pesantren menjadi sistem pendidikan ala Barat yang lebih modern”.

Pendapat Suryanegara diperkuat oleh Nagazumi⁸⁵ bahwa, “tujuan politik etis; 1. Meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi dan 2. Berangsur - angsur menumbuhkan otonomi dan desentralisasi politik di Hindia Belanda. Hal ini didasari pada tiga prinsip : kekuasaan pemerintah harus dialihkan 1. Dari Negeri Belanda ke Hindia 2. Dari Batavia ke daerah - daerah 3. Dari bangsa Eropa ke penduduk pribumi”.

Hal tersebut berarti bahwa terjadi perubahan cara kolonialisasi dari cara kuno dengan tanam paksa menjadi neo kolonialisasi yang lebih moderat. Cukup melalui pribumi - pribumi yang tunduk dan bekerja sama pada Belanda, mereka (Belanda) mampu menjajah Indonesia. Maka untuk memuluskan tujuannya Belanda mendidik dan melatih pribumi - pribumi pilihan (yang bekerja sama dengan Belanda) untuk dididik agar mampu membantu pemerintah kolonial di bawah kendali Belanda. Disamping itu Belanda ingin menjadikan Hindia sebagai salah satu negara federasinya.

B. Perubahan Elit Tradisional ke Elit Modern

Ada baiknya kita menelisik salah satu faktor yang memelopori bangsa Eropa untuk sedikit memanusiakan

⁸⁴ Suryanegara, A. M. 2009. *Api Sejarah*. Bandung : Salamadani, hlm. 327.

⁸⁵ Nagazumi, A. ?. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908 - 1918*. Hlm 44

manusia jajahannya. Tilaar⁸⁶ menyebutkan “teori yang dicetuskan Rousseau pada masa Aufklarung tentang pendidikan yang wajib memberikan kebebasan kepada manusia dalam memilih sesuai dengan keinginannya”. Sedikit banyak pendapat Rousseau tersebut memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada golongan pribumi untuk memperoleh pendidikan dan memperoleh kebebasan.

Brinton⁸⁷ menyebutkan bahwa “kebudayaan modern Barat terbentuk sekitar abad ke-15 sampai dengan ke-18. Mereka mulai mengutamakan pendidikan dan rasionalitas pikiran daripada hanya sekedar dogma gereja”. Jelas perkembangan modernisasi di Eropa berdampak secara tidak langsung kepada kehidupan di daerah jajahan seperti Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Niel⁸⁸ bahwa “politik etis...memberikan rangsangan menimbulkan kesadaran pada angkatan muda Indonesia. Suasana yang sama juga memberikan rangsangan R.A. Kartini...menghasilkan wanita-wanita muda dan pemuda-pemuda elit Indonesia yang berpendidikan dalam kehidupan masyarakat yang berubah”. Beberapa elit pribumi (tradisional) yang telah mendapat pendidikan dan pengaruh Barat telah secara tidak sengaja memiliki pemikiran Barat. Salah satu contoh sederhana yaitu konsep identitas bangsa dan nasionalisme yang sudah mulai dikaji dan dipelajari. Sementara pada masa tradisional sebelum memperoleh pengaruh Barat, tidak pernah terpikirkan konsep identitas dan nasionalisme oleh para elit tradisional. Seperti dikatakan Kusuma⁸⁹ “...mahasiswa asal Hindia Belanda pada 1908 mendirikan perkumpulan sosial di negeri Belanda...namun

⁸⁶ Tilaar, H.A.R. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 83

⁸⁷ Brinton, C. 1981. *Pembentukan pemikiran modern*. Jakarta : Mutiara. hlm. 153

⁸⁸Niel, V. R. 1984. *Kemunculan elit Modern Indonesia*, hlm. 56.

⁸⁹Kusuma, A. B. 2001. “Persatuan, SARA, Globalisasi”. *Tempo*, hlm. 152

mereka yang terkumpul dari beberapa suku berbeda masih belum tau kebangsaan mereka”.

Jika kita menetapkan standar baku dan batasan elit tradisional adalah orang-orang besar (priyayi) yang belum terpengaruh pemikiran Barat, seperti Kejawen dan Islam santri. Pada umumnya mereka (elit tradisional) berasal dari keluarga raja, bangsawan atau priyayi yang memperoleh status kebangsawannya dari garis keturunan.

Kembali pada pertanyaan bahwa mengapa dengan mudahnya kaum tradisional menerima segala perubahan yang datang dari Barat. Hal ini sangat unik dan membutuhkan penguraian teori kebudayaan yang membahas tentang perubahan kebudayaan. Seperti yang disebutkan Havilland⁹⁰ menyebutkan bahwa “kemampuan berubah selalu merupakan sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa hal tersebut, kebudayaan tidak akan mampu menyesuaikan dengan keadaan yang selalu dinamis”. Lebih lanjut lagi disebutkan perubahan-perubahan yang terjadi pada kalangan elit tradisional menuju pada elit modern yang lebih bersifat Barat disebabkan oleh *invention* yang terjadi di Eropa dan dibawa melalui akulturasi antara pemerintah kolonial Belanda dengan penduduk pribumi dalam hal ini elit tradisional.

Tidak selamanya akulturasi berjalan mulus antara pemerintah kolonial dengan rakyat pribumi. Hal ini didasari atas perbedaan yang sangat mendasar, yaitu agama yang Islam yang dianut orang Pribumi Indonesia, sedangkan Belanda memiliki keyakinan Protestan. Pada mulanya golongan elit tradisional khususnya Islam santri memiliki keraguan atas pendidikan yang ditawarkan pemerintah kolonial. Jelas penyebabnya adalah pendidikan dengan sistem modern ala Barat yang mengesampingkan agama Islam dalam

⁹⁰ Havilland, W. A. 1988. *Antropologi*. Jakarta : Erlangga, hlm. 252

kurikulumnya. Namun disinilah letak kebrilianan Hurgronje sebagai antropolog profesional (bidang Islam) dari pihak pada Belanda yang berhasil meyakinkan para raja dan bangsawan Islam agar menyekolahkan anaknya di sekolah umum.

Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa hanya sedikit dari golongan pribumi yang ingin bersekolah di sekolah – sekolah Belanda. Hal ini didukung oleh pendapat Nagazumi⁹¹ bahwa “pada tahun 1902 hanya ada empat dari delapan bupati yang mampu menggunakan bahasa Belanda. Salah satu dari mereka adalah R.M. Koesoemo Oetoyo sebagai pemimpin gerakan Budi Utomo, sebagai komisaris pada 1909 dan sebagai ketua pada 1926”. Ini artinya belum banyak pribumi Jawa yang mau mengenyam pendidikan dari Belanda pada saat itu.

Hal yang menarik, diantara pribumi yang memperoleh pendidikan Barat seperti Koesoemo Oetoyo menularkan ide-ide yang luar biasa pada pribumi lain yang tidak tertarik pada pendidikan Belanda. Ide-ide tersebut antara lain memperkenalkan hierarki kolonial Belanda pada kaum elit pribumi dan bagaimana hierarki tersebut bekerja, juga proses dimana mereka (elit pribumi) semakin dalam terlibat.⁹² Ide-ide semacam itu semakin merangsang elit pribumi lain untuk bersekolah dan melakukan perubahan-perubahan sosial yang pada akhirnya nanti membentuk Budi Utomo dan Volksraad.

Untuk tahap awal para elit modern ini biasanya muncul dan berkembang setelah mendapat pendidikan di Eropa. Seperti contoh, Achmad Djajadiningrat seorang anak bangsawan Banten dan keturunan Paku Alam yang banyak melanjutkan studi di Eropa. Namun berikutnya setelah didirikannya sekolah dokter STOVIA pada 1902 di Jawa, maka banyak muncul elit-elit modern yang memiliki pemikiran-pemikiran Barat yang,

⁹¹ Nagazumi, A. tt. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908 – 1918*. tp, hlm 22

⁹²*Ibid.* hlm. 23

brilian seperti Radjiman Wideodiningrat, Boedi Oetomo, Tjipto Mangunkusumo, Wahidin Wirohoesodo dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hatmosoeprbo dalam Suwarno⁹³ bahwa “anak-anak priyayi lulusan sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Belanda...kemudian hari tumbuh menjadi golongan intelektual yang biasa disebut modern Indonesia”. Kelak mereka akan membuka wawasan dan kesadaran masyarakat Indonesia akan nasionalisme, identitas dan hak layak untuk hidup sebagai manusia bebas. Tidak hanya itu pada tahun 1916 juga muncul organisasi massa bercorak agama yang disebut SI (Serekat Islam). Cukup banyak kontribusi para pemikir Serikat Islam bagi masyarakat seperti SI menghendaki *natie* dan berpemerintahan sendiri bagi rakyat Nusantara.⁹⁴ Lebih lanjut Kartodirdjo dalam Suwarno menyebutkan⁹⁵ “BO, SI, Muhammadiyah, IP dan sebagainya berfungsi sebagai lambang identitas baru berdasarkan solidaritas modern (non-primordialis). Ide nasionalisme mentrasenden etnosentrisme, etno nasionalisme, serta segala jenis primordialisme dan komunalisme diganti solidaritas nasional.”

Sedang Nugraha⁹⁶ menambahkan “pengaruh pemikiran Barat telah membuat orang pribumi mencari identitas sosial. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya golongan priyayi Jawa yang kehilangan keyakinan terhadap mobilitas status yang diperoleh berdasarkan keturunan”. Mereka memasuki dunia intelektual yang agak terbebas dari tradisi kultural yang penuh dengan sikap hormat berlebihan. Dari mereka inilah lahir golongan yang berusaha mencari alternatif lain dari corak sosial

⁹³ Suwarno, P.J. (Ed.). 1995. *Negara dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta : Grasindo, hlm. 60.

⁹⁴ Kusuma, A. B. 2001. “Persatuan, SARA, Globalisasi”. *Tempo*, hlm. 152

⁹⁵ Suwarno, P.J. (Ed.). 1995. *Negara dan Nasionalisme Indonesia*. Hlm. 52

⁹⁶ Nugraha, P. Iskandar. *Teosofi, Nasionalisme dan Elit Modern Indonesia*. Jakarta : Komunitas Bambu, hlm. 76

dan sistem status masyarakat. Setelah memperoleh pendidikan Barat elit modern ini memiliki pemikiran faktor mobilitas sosial tidak lagi dipandang berdasarkan garis keturunan. Mereka beranggapan status sosial yang meningkat karena prestasi dibidang pendidikan, ekonomi dan lainnya lebih berhasil dan terpuja. Ini disebabkan status sosial yang diperoleh murni hasil kerja keras diri sendiri lebih baik ketimbang hanya memperoleh peningkatan status sosial dari garis keturunan bangsawan yang merupakan “pemberian” keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat Graves⁹⁷ di Sumatera Barat pada tahun 1920-an, pendidikan sekuler berbahasa Belanda menjadi syarat penting untuk status elite...”.

Maka pada perkembangan berikutnya golongan elit modern terpelajar ini mulai merambah dan berkecimpung di berbagai bidang, seperti politik, sosial, budaya dan pendidikan. Tujuan mereka sama, yaitu memperoleh hak - hak layak hidup sebagai manusia yang bebas. Tidak terkecuali kesempatan mengenyam pendidikan bagi rakyat jelata, sampai kepada tuntutan kebebasan yang pada akhirnya berujung pada konsep kemerdekaan yang hakiki.

Dalam hal ini kegiatan awal golongan elit modern dapat ditandai dengan mulai dibentuknya organisasi yang bersifat sosial - budaya seperti Boedi Oetomo pada tahun 1908 oleh Wahidin Wirohusodo. Mereka memfokuskan perhatian pada kesadaran identitas bangsa, nasionalisme dan persatuan beragam suku yang ada di Indonesia. Wahidin merekrut para mahasiswa alumni STOVIA untuk bergabung kepada Boedi Oetomo dalam rangka menyatukan visi dan misi yakni kebebasan dan hak layak hidup. Beberapa dari mereka yang bergabung pada Boedi Oetomo antara lain Tjipto Mangukumo

⁹⁷ Graves, E. E. 2007. *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Hlm. 252.

dan Suwardi Suryaningat serta Soetomo. Dan dari mereka akan berkembang pula organisasi Indische Partij yang bergerak pada bidang politik yang fokus memperjuangkan nasionalisme sebagai kesadaran nasional seluruh rakyat Indonesia dan lainnya.

Dapat di pahami bahwa "*Elit Lokal Modern*" merupakan golongan pribumi Indonesia yang pada dasarnya adalah orang-orang yang menerima perubahan kebudayaan serta pemikiran dari Barat. Perubahan budaya tradisional ke arah budaya modern ini merupakan pengaruh atau konsekwensi dari *invention* dan akulturasi yang dilakukan orang Eropa dengan orang Pribumi. Salah satu tonggak perubahan budaya pribumi Indonesia adalah dikeluarkannya kebijakan politik etis khususnya bidang pendidikan. Sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan pada rakyat pribumi telah membuka wawasan dan peluang pikiran elit tradisional terpengaruh pemikiran Barat.

Pemikiran Barat disini adalah berupa ide-ide kebebasan, memperoleh hak hidup, nasionalisme dan persatuan daerah Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Rousseau yang menjunjung tinggi kebebasan dalam menentukan sesuatu. Selain itu semangat rasionalitas orang Eropa dalam belajar dan berpikir telah mempengaruhi pemikiran para elit modern Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang merdeka.

C. Para Haji Mukim (Ulama) Sebagai Elit Lokal Modern di Palembang

Sebagaimana diketahui, pada awal abad XX kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia pada umumnya dilanda gerakan reformasi dan modernisasi, sehingga hal ini mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Ada empat factor yang menurut Karel A.

Steenbrink⁹⁸ yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kehidupan keagamaan umat Islam, 1) munculnya keinginan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Sunah untuk dijadikan sebagai sumber dan pedoman satu-satunya dalam pengamalan ajaran Islam, 2) munculnya kesadaran nasional dan timbulnya perlawanan yang bersifat nasional terhadap penguasa Belanda, 3) munculnya keinginan dari sejumlah orang Islam untuk memperkuat organisasi ekonomi mereka baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan rakyat banyak, 4) munculnya ketidak puasan terhadap sistem pendidikan Islam tradisional baik dari segi metode maupun caranya.

Munculnya faktor-faktor pendorong sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari pengaruh adanya gerakan pemurnian (purifikasi) Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1780) di Arab Saudi dan pembaruan (modernisasi) Islam yang dirintis oleh Jamaluddin Al-Afgani (1839-1897) di Mesir, dan Muhammad Abduh (1845-1905).⁹⁹

Pada awal abad XX gerakan reformasi dan modernisasi juga melanda kehidupan keagamaan umat Islam di wilayah Palembang. Pengaruh gagasan pembaharuan tersebut diantaranya dibawa oleh beberapa ulama alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Adapun ulama-ulama yang berfaham Islam modernis-reformis di Palembang tersebut diantaranya adalah tiga ulama yang merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yakni; Abdul Somad bin Abdul Muin, dan Hasan Basri bin Muhammad Amin (Mereka ini berasal dari Muara Enim) serta Akhmad Azhari bin H.

⁹⁸ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 26-28.

⁹⁹ Fachri Ali, *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 63

Abdul Hamid (Ia berasal dari daerah 4 Ulu Kota Palembang).¹⁰⁰ Ketiga ulama ini juga merupakan contoh yang menggambarkan adanya pengaruh yang membawa gagasan pembaharuan dalam Islam. Ketika mereka pulang pada awal April 1937 mereka disambut secara baik oleh masyarakat dimana mereka berasal.

Ulama Palembang lainnya yang mendapat pengaruh gagasan pembaharuan lebih dahulu adalah H. Husein Ma'rif yang berasal dari Desa Campang Tiga, Ogan Komering Ulu (OKU). Husein Ma'rif dilahirkan di Desa Campang Tiga pada tahun 1860M.¹⁰¹ Ia merupakan anak dari H. Khatib Ma'rif keturunan dari Tuan Syaikh Abdurrahman, ibunya bernama Salamah. Ia belajar dengan ayahnya dan juga dengan H. Syamsudin (alumni Al-Azhar Kairo) selama 4 tahun. Tahun 1890M ia pergi ke Mekkah maupun ke Kairo dan juga belajar disanasampai kepulangannya pada tahun 1899 M. Ia mengajarkan Islam di daerah Campang Tiga terutama masalah menjauhkan diri dari sifat khurafat, syirik, tahayul dan sebagainya. Pada tahun 1913 ia kemudian mendirikan mushola/langgar yang digunakannya sebagai tempat pendidikan non-formal.

Adapun Hasan Basri Muhammad Amin yang berasal dari Muara Enim ini adalah sebagai salah satu contoh ulama guru yang membawa gagasan pembaharuan dalam Islam. Sebagaimana diketahui, sekembalinya dari studi di Perguruan Islam Al-Azhar Kairo Mesir, ia segera didaulat untuk memberikan pidato di depan masyarakat Muara Enim oleh sebuah panitia yang sengaja dibentuk untuk acara penyambutan. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 11 April 1937 dan dihadiri oleh sebagian besar

¹⁰⁰ Lihat, "Tentang Pembijaraan Dengan Student Dari Azhar University", dalam *Pertja Selatan*, No. 42, 8 April 1937.

¹⁰¹ H. Ayub Munawar, ulama di Desa Cempaka, *wawancara*. 24 Desember 2013

masyarakat Muara Enim. Sebelum berpidato, oleh panitia disebutkan bahwa Hasan Basri merupakan seorang anak yang berasal dari Tungkal yang sebelumnya juga pernah belajar di Sekolah Perhimpunan Kaoem Moeslimin (PKM) di Muara Enim. Adapun yang menjadi salah satu poin penting dalam pidato Hasan Basri tersebut adalah seruannya kepada umat Islam di Muara Enim untuk kembali kepada apa yang disebutnya "Islam Sejati" yakni Islam yang berazaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits agar mendapatkan kemenangan dan keselamatan dunia akhirat.¹⁰²

Ulama lainnya yang membawa faham reformis yakni H. Husin Alim bin Umar. Sekembalinya dari Mekkah ia kemudian menetap di Kampung 5 ulu Palembang. Di sana ia kemudian mendirikan Sekolah Samsuel Huda. Sejak tahun 1927 dirumahnya Kampun 5 Ulu dijadikannya ruangan belajar yang menampung anak-anak yang berasal dari Kampun 3,4, dan 5 Ulu Palembang, selain itu juga diselenggarakan kursus bagi orang dewasa untuk menjadi calon da'i.¹⁰³

1. K.H Akhmad Azhari: Dari Madrasah Al- Islamiyah Hingga PSII (1901-1969)

K.H. Ahmad Azhary adalah salah seorang ulama Palembang yang berasal dari Kota Palembang. Ahmad Azhary dilahirkan di kampung 4 Ulu Laut (salah satu wilayah seberang ulu) Palembang, pada tahun 1901. Ayah Ahmad Azhary bernama Abdul Hamid adalah seorang ulama yang berprofesi sebagai pedagang. Dengan demikian sejak kecil Ahmad Azhary telah mendapat pendidikan agama langsung dari ayahnya. Baru kemudian ia diserahkan untuk melanjutkan pendidikan agama

¹⁰² Lihat, "Lezing dari Ex Student al-Azhar Mesir di rumah Sekolah de Enim Islamijah Muara Enim", *Pertja Selatan*, No. 46, tanggal 17 April 1937. Hlm. 6-7

¹⁰³ Lihat Peteers, *Kaum Tuo-Kaum Mudo*, hlm. 157.

di bawah asuhan K.H Husin serta K.H. Abdullah Azhary yang berlokasi di wilayah 5 Ulu Palembang. Ahmad Azhary hanya mempunyai dua orang saudara perempuan, yaitu Zahara dan Zaleha. Sebagai satu-satunya anak laki-laki, Ahmad Azhary di jadikan tumpuan ayahnya, terutama untuk diarahkan menjadi ulama.¹⁰⁴

Setelah menyelesaikan pendidikannya Ahmad Azhary melanjutkan pendidikannya ke Mesir, ia berangkat tahun 1925 dan tahun 1933 kembali lagi ke tanah air. Sepulang dari Mesir, Ahmad Ahzary mulai aktif dalam berbagai kegiatan antara lain dibidang pendidikan dan politik. Tujuh tahun di Palembang ia telah berhasil mendirikan Madrasah al-Islamiyah dikampungnya. Di bidang politik Ahmad Azhary tampaknya sejalan dengan ide politik Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Di organisasi ini, ia sempat memimpin selama delapan tahun, yaitu 1934- 1942.

Sebagai Alumni dari Al-Azhar tampaknya K.H. Ahmad Azhary ikut dipengaruhi oleh ide pembaharuan tersebut. Kesan ini muncul dari berbagai kegiatannya sepulang dari Mesir. Bersama K.H Akmal, teman seperguruannya di pondok pesantren K.H Husin, ia kemudian mendirikan Madrasah al-Islamiyah di kampungnya 4 Ulu Palembang, pada tahun 1940. Meskipun masih menempati gedung yang sederhana, namun madrasah itu telah dilengkapi dengan berbagai peralatan belajar yang mengacu kepada penerapan sistem klasikal. K.H.Ahmad Azhary ternyata dapat bekerjasama dengan K.H Akmal, seorang alumni madrasah Al-Irsyad Jakarta. Sebagai aktivitas PSII, mereka menjadikan madrasah al- Islamiyah berfungsi ganda, yaitu sebagai tempat belajar dan juga sebagai pusat kegiatan organisasi. Selain itu tampaknya K.H.Ahmad Azhary

¹⁰⁴Salman Ali, "Biografi Singkat Ulama di Sumatera Selatan". Laporan Penelitian (Palembang: Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah, 1985).

melihat bahwa pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada ruang lingkup kelas, tetapi perlu adanya pendidikan dimasyarakat. Untuk itu pula dalam menyebarkan pemikirannya di bidang pendidikan dan keagamaan ini, ia aktif berdakwah ke berbagai pelosok Palembang.

Perjuangannya di bidang politik kemudian dilanjutkannya setelah kembali ke Palembang dengan masuk menjadi anggota Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Kegiatan ini kemudian mengantarkan K.H. Ahmad Azhary menjadi Ketua Dewan Pimpinan PSII wilayah Palembang. Bersama dua tokoh lainnya, yaitu K. Akmal dan Abdul Saleh Mateik, K.H. Ahmad Azhary menerjuni kegiatan politik praktis.

2. Haji Malian (1862-1928) ; Dari Pasirah Hingga Madrasah Islamiyah

H. Malian (1862-1928), ia adalah putra dari Abdul Chalik (Pangeran Liting). Pangeran liting adalah putra dari Basiroen bin Zainudin (Poyang Wadin) bin Sunan Sungai Goren (Ki Renggo Wirosentiko), dimana Ki Renggo Wirosentiko adalah pejabat pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Ia dikenal sebagai kepala Marga Pegagan Ilir Suku II masat Pemerintahan Kolonial Belanda. Namun demikian ia juga dikenal masyarakat sebagai tokoh Islam yang rajin melakukan dakwah Islamiyah di tengah tengah masyarakat, serta mendirikan dan membangun sekolah Madrasah Islmiyah di Tanjung Raja.

Sebagaimana diketahui, Abdul Chalik (Pangeran Liting) adalah pasirah keempat yang memerintah Marga Pegagan Ilir Suku II dengan ibukota Marga Sungai Pinang dan pasirah pertama yang mendapat gelar 'Pangeran' dari Controleur Belanda, karena kecakapannya dalam memimpin marga dan periodesasi kepemimpinannya yang lama yaitu 36 tahun. Abdul Chalik (Pangeran Liting) mempunyai 5 (lima) orang istri yaitu :

Rabi'atul Adawiyah, Rohmah, Nurul Huda, Lembak (keturunan orang Belanda), dan Nangtjik dan 19 orang anak dari 5 orang istrinya tersebut.

H.Malian, atau dikenal dengan sebutan Pangeran Malian adalah putra dari Abdul Chalik (Pangeran Liting) dari istrinya yang pertama bernama Rabi'atul Adawiyah. Pangeran Malian dilahirkan di Sungai Pinang pada tahun 1862 dan meninggal pada tahun 1928 karena lanjut usia (uzur). Pangeran Malian adalah putra dari seorang pasirah. Pasirah pada waktu itu adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam system pemerintahan Marga. Pangeran Liting (pasirah Abdul Chalik) selaku ayah Pangeran Haji Malian dikenal sebagai seorang yang alim, sehingga pendidikan bagi putra-putrinya sangat diperhatikan sekali dalam bidang pengetahuan agama seperti : Fiqih, Hadist, dan ilmu pengetahuan agama yang lainnya.

Pangeran Haji Malian sebagai putra dari seorang pasirah memperoleh pendidikan di sekolah Belanda dalam usia 12 tahun sampai dengan kelas V (lima), kemudian pada usia 14 tahun Pangeran Haji Malian melanjutkan sekolahnya ke Al-Irsad di Jakarta. Setelah sekolah dari Al-Irsad di Jakarta, Pangeran Haji Malian kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mekkah Saudi Arabia dan tinggal di Syi'if Ali Mekkah dan berguru kepada Syaikh Umar Sumbawa untuk memperdalam pengetahuannya di bidang Agama Islam. Di Mekkah juga Pangeran Haji Malian langsung menunaikan ibadah hajinya.

Pangeran Haji Malian adalah pasirah kelima di Marga Pegagan Ilir Suku II. Sebelumnya pasirah yang memimpin Marga Pegagan Ilir Suku II adalah Pangeran Liting, yang merupakan ayah dari Pangeran Haji Malian. Pada tahun 1908 M, pangeran Liting melepaskan tampuk kepemimpinannya dikarenakan usianya yang sudah uzur. Pangeran Liting memimpin selama 36 tahun di Marga Pegagan Ilir Suku II.

Pada tahun 1908 M, terjadi pemilihan pasirah, dimana pada saat pemilihan calon pasirah ini tidak ada yang menjadi calon dalam pemilihan. Malian sebagai putra dari pangeran Liting pun dipilih oleh Masyarakat Marga Pegagan Ilir Suku II untuk menjadi pasirah di Marga tersebut, dengan alasan yaitu : Malian adalah putra dari pangeran Liting, dan Malian dikenal dengan orang yang pandai dalam bidang ilmu agama. Sejak tahun 1908 M inilah, Pangeran Haji Malian mulai menjabat sebagai pasirah. Namun, jika ditelaah dari tahun kelahiran Pangeran Haji Malian (1862) sampai dengan tahun ia menjadi sebagai pasirah, maka jarak usia Pangeran Haji Malian adalah 34 tahun. Jadi, Pangeran Haji Malian diangkat dan menjabat menjadi Pasirah pada usia 34 tahun. Pangeran Haji Malian memimpin Marga Pegagan Ilir Suku II selama 19 tahun. Karisma Pangeran Haji Malian dalam memimpin Marga Pegagan Ilir Suku II membuat Ia diberi gelar “Pangeran” oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Kepemimpinana Pangeran Haji Malian berakhir pada tahun 1927 M, karena kondisi Pangeran Haji Malian yang telah uzur.

Pangeran Haji Malian juga melakukan dakwah Islmiyahnya dengan cara mengunjungi dusun-dusun di dalam Marga Pegagan Ilir Suku II pada hari-hari yang telah diterapkan, kalau dusun itu dekat maka perjalanan yang dilakukan Pangeran Haji Malian ditempuh dengan berjalan kaki. Tetapi kalau dusun itu jauh maka ditempuh dengan menggunakan perahu tenda. Dengan menggunakan perahu tenda inilah, sambil menuju ke rumah Kerio, Pangeran Haji Malian memeriksa keadaan kebersihan dusun. Ketika sampai di rumah Kerio, Pangeran Haji Malian telah ditunggu oleh masyarakat untuk mendengarkan ceramah dan cawisan. Apabila Pangeran Haji Malian melakukan kunjungan pada hari Jum’at, maka ia menjadi khotib dan imam jum’at di dusun yang dikunjunginya. Oleh karena di Marga Pegagan Ilir Suku II,

pendidikan formal yang ada hanya sekolah milik Belanda, yaitu sekolah HIS yang ada di Tanjung Raja. Sekolah HIS hanya berlaku pada anak-anak Pasirah, anak pejabat Marga, dan orang-orang yang memiliki taraf ekonomi yang cukup tinggi, maka dengan kondisi pendidikan yang begitu terbatas bagi masyarakat membuat Pangeran Haji Malian mendirikan dan membangun sekolah Madrasah Islamiyah di Tanjung Raja. Tujuan didirikan Madrasah ini adalah untuk memberikan pendidikan yang merata bagi masyarakat Marga Pegagan Ilir Suku II. Pembangunan Madrasah Islamiyah Tanjung Raja merupakan bentuk nyata hasil pemikiran dari Pangeran Haji Malian sebagai seorang Pasirah. Menurut bapak Wirakrama Ridwan selaku zuriat Pangeran Haji Malian bahwa Madrasah Islamiyah Tanjung Raja didirikan pada tahun 1926, dengan melihat surat pernyataan wakaf tanah sekolah tersebut.¹⁰⁵

Madrasah Islamiyah di Tanjung Raja, terdiri dari 3 kelas yaitu Awaliyah, Diniyah, dan Wustho dengan jumlah murid pada waktu itu adalah 150 orang. Guru-guru yang mengajar di Madrasah Islamiyah itu didatangkan langsung dari Arab Saudi. Lulusan dari Madrasah Islamiyah ini banyak yang di kirim ke Mekkah. Pada masa kependudukan Jepang, Madrasah Islamiyah ini oleh penjajah Jepang dijadikan sebagai tempat latihan militer. Kemudian setelah dijadikan sebagai tempat latihan militer, madrasah Islamiyah ini dijadikan Sekolah Guru Bantu (SGB). Setelah dijadikan sebagai Sekolah Guru Bantu (SGB), sekolah ini akhirnya dihibahkan kepada Muhammadiyah dan sampai sekarang masih tetap bertahan yaitu SMP dan SMA Muhammadiyah Tanjung Raja

Madrasah Islamiyah Tanjung Raja dengan demikian mewakili profil lembaga pendidikan Islam di wilayah pedesaan

¹⁰⁵ Lihat Endang Rochmiatun, "Sejarah perkembangan Islam di OKI". Laporan Hasil Penelitian, DIPA Puslitbang lektur Keagamaan Kementerian Agama RI, Tahun 2006.

(uluan), yang mana lembaga ini telah membawa program pembaharuan dalam bidang pendidikan. Meskipun inisiatif pertama dari pendirian madrasah ini adalah Pangeran Haji Malian, namun demikian juga dibantu oleh para tokoh-tokoh muslim di Tanjung Raja pada masa itu. Guna merealisasikan tujuan tersebut, mula mula pada tahun 1925 didirikan terlebih dahulu sebuah perserikatan yang diharapkan untuk memayungi pendirian madrasah tersebut. Perserikatan atau organisasi yang memayungi Madrasah di Tanjung Raja ini bernama "Al-Islamiyah". Dengan demikian penamaan "Madrasah Islamiyah Tanjung Raja" tersebut sesuai dengan nama perserikatan. Adapun presiden pertama dalam organisasi Al-Islamiyah tersebut adalah "Tuan Dahlan" yang bergelar "Soetan Lembak Toeah". Tokoh Ini kemudian pindah dari Tanjung Raja dan kemudian digantikan oleh Tuan Abdoel Razak pada akhir tahun 1928. Namun setelah Tuan Abdoel Razak diangkat menjadi Demang di Pagar Alam pada awal tahun 1931,¹⁰⁶ ia kemudian digantikan oleh Tuan M. Noeh Pangeran Tanjoeng Sedjaroe.

Dengan bantuan *Controleur* Tanjung Raja bernama Gunther, H. Malian dan beberapa tokoh muslim Tanjung Raja mengadakan rapat bersama yang dihadiri oleh beberapa *ambtenaar* dan *Indland Hoofden* serta para penduduk Onderafdeling Ogan Ilir. Untuk selanjutnya Madrasah Islamiyah Tanjung Raja ini untuk pertama kali dibuka secara resmi pada tanggal 8 Desember 1925. Pada awal berdirinya madrasah ini dipimpin oleh seorang alumni dari Jami'atul Khoir bernama Sayyid Muhammad bin Yahya.¹⁰⁷ Namun sejak tahun 1926 Madrasah ini dipimpin oleh Sayyid bin Agil yang juga

¹⁰⁶ Lihat, " Nasibnya Sekolah Agama Islam di Tandjoeng Radja" dalam *Pertja Selatan* No,27, 7 mared 1931, hlm. 3.

¹⁰⁷ Lihat, " Parajaan Sekolah Agama di Tandjoeng Radja", dalam *Pertja Selatan* No,17, 22 februari 1927, hlm. 3.

didatangkan dari Betawi. Beberapa guru yang membantu di Madrasah Tanjung Raja ini berasal dari wilayah Onderafdeling Ogan Ilir yang telah berpengalaman mengajar di beberapa sekolah agama.¹⁰⁸

Salah satu sumber menyebutkan bahwa sejak bulan Nopember 1926, Madrasah Islamiyah Tanjung Raja telah mulai menerima pendaftaran anak-anak dari masyarakat muslim yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yakni: sanggup membayar uang sekolah mulai dari f.1 sampai dengan f 2,50 sesuai dengan kemampuan.¹⁰⁹

Keadaan Madrasah Islamiyah Tanjung Raja ini tetap berkembang baik sampai akhir tahun 1927- awal tahun 1928, hal ini dapat dilihat dari segi tenaga pengajarnya. Kualifikasi guru-guru yang mengajar di madrasah ini, menurut salah seorang guru yang bernama Aboelhasan, antara lain adalah : “ tentang guru kepala, telah mendapat izin dari pemerintah ontoek mengajar, pertama di Kota Palembang, dapat Besluit dari Resident, dan juga telah di oedji ilmoenya oleh *Hoofdpenghoeloe* Palembang hingga disyahkan menjadi seorang goeroe. Goeroe bantoe Aboelhasan jang memegang vak Melajoe lebih dari 6 tahoen mendjadi goeroe kepala sekolah Gouvernement klas II. Goeroe Bantoe Karman bin Hadji Halid, verklaringsnya dari Hadramautschool Soerabaja dan telah menjadjadi goeroe djoega di Palembang” .¹¹⁰

Adapun materi pelajaran yang diberikan di Madrasah Tanjung Raja ini telah disusun secara sistematis serta disahkan oleh *Schoolopziener* dan presiden organisasi Islamiyah, yakni Dahlan yang bergelar Sutan Lembak Tuah. Materi pelajaran

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Lihat, “ Al-Midrasatoel Islamijah”, dalam *Pertja Selatan* No, 40, 22 Nopember 1926, hlm. 3.

¹¹⁰ Lihat, “Sekolah Agama ”, dalam *Pertja Selatan* No, 114, 6 Oktober 1928, hlm. 6.

juga disahkan oleh H. Abdoelhadi serta Ulama-Ulama di Ogan Ilir seperti H. Zen serta para pengurus Madrasah Islamiyah Tanjung Raja, seperti : Kasim (sebagai *1e Onderwijzer* HIS) dan Zahri (*Schoolhoofd* Tanjung Raja).¹¹¹

D. Elit Lokal Modern Dalam Organisasi Sarekat Islam

Secara historis, Sarekat Islam ini sebenarnya berbarengan dengan trend gerakan pembaruan dan reformasi Islam yang lahir pada abad ke-19 M di sejumlah negeri-negeri Islam di Timur Tengah, yang sesungguhnya merupakan bagian dari reaksi atas tantangan dunia Barat. Gerakan ini dicirikan dengan pencarian nilai-nilai yang dipandang lebih sesuai dengan modernitas dan bersifat rasional. Percaya ada kemajuan ilmu pengetahuan, bekerja keras merupakan nilai positif, dan sikap fatalis dan kerahibian ditolak. Gerakan ini juga melakukan pembersihan agama Islam dari perilaku bid'ah yang telah lama bersenyawa dengan praktik keagamaan di sejumlah umat Islam, menuntut umat Islam untuk kembali kepada ajaran Al-Qur'an. Gerakan ini dalam konteks kebudayaan merupakan upaya agar agama Islam dihargai sepenuhnya oleh orang Barat.¹¹²

Gerakan reformasi dan pembaruan Islam ini pada perkembangannya merembes ke Indonesia pada akhir abad 19 melalui berbagai cara. Pertama-tama adalah melalui masyarakat Arab yang bermukim di Indonesia. Pada era 1900-an jumlah mereka ini diperkirakan mencapai delapan belas ribu orang. Kebanyakan mereka ini berasal dari Hadramaut, akan tetapi mereka yang berasal dari India dan bermukim di Indonesia juga

¹¹¹Lihat, "Sekolah Agama", dalam *Pertja Selatan* No, 17, 1928, hlm. 6.

¹¹² Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia*, h. 116. Lebih untuk penjelasan ini lihat, Deliar Noer, *Gerakan Moderen dalam Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), yang secara khusus membahas dalam satu bab.

disebut sebagai 'orang Arab', dan hampir semua dari mereka mata pencahariannya adalah berdagang. Selanjutnya melalui pernikahan dengan perempuan-perempuan Indonesia. Dalam sistem perkawinan ini, agama Islam telah mengikat mereka dengan orang Indonesia menjadi lebih erat. Ikatan kerohanian, orang Arab ini dengan negeri-negeri Arab tetap kuat. Sejumlah pikiran-pikiran reformis di Timur Tengah merembes di tengah masyarakat Arab di Indonesia ini. Mereka ini juga berpandangan bahwa kedudukan umat Islam harus diperbaiki dan ini bisa terjadi dengan baik melalui perbaikan pendidikan. Ahmad Soerkati adalah salah satu tokoh penting dari kalangan Arab yang berperan di dalam pembaruan Islam di kalangan orang pribumi ketika itu. Orang pribumi yang pertama-tama merintis reformasi tersebut adalah Sjech Thare Djalaloeddin dari Minangkabau, Sumatra Barat, yang sebagian besar dari usianya dihabiskan di Timur Tengah dan Malaysia. Ia menerbitkan majalah bulanan bernama Al-Imam yang terbit pada 1905-1910. Majalah ini mempunyai peran dan pengaruh yang besar di kalangan reformis Islam di Minangkabau. Di dalamnya memuat artikel soal keagamaan, masalah ilmiah populer, dan sejumlah peristiwa yang terjadi di belahan dunia. Pada intinya, majalah ini mempromosikan perlunya kemajuan umat Islam dan menjernihkan Islam. Selain Al-Imam pada masa-masa selanjutnya terbit majalah Al-Munir. Majalah ini dipelopori oleh H. Abdoellah Ahmad dan terbit pada 1910-1916 di Padang. Majalah bertujuan menyebarkan Islam, meningkatkan pengetahuan umat Islam, dan mempertahankan Islam dari serangan-serangan pihak luar.

Sarekat Islam didirikan di Solo pada tanggal 11 Nopember 1911. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari organisasi Sarekat dagang Islam yang didirikan sebelumnya oleh Haji samanhudi dan kawan-kawan. Sarekat Islam berikhtiar agar anggota-anggotanya satu dengan yang lainnya

bergaul seperti saudara sehingga akan timbul kerukunan dan tolong menolong satu sama lainnya diantara sesama kaum muslimin sehingga derajat rakyat diangkat supaya menimbulkan kemakmuran dan kesejahteraan. Setelah didirikan Sarekat Islam berkembang ke daerah-daerah lain. Di Solo sendiri, kegiatan anggota-anggotanya meningkat terus, sehingga Residen Surakarta merasa kewalahan untuk mengatasinya. Sebagai akibat kemudian sarekat Islam dibekukan untuk sementara, Pembekuan tersebut kemudian dicabut pada tanggal 16 agustus 1912 dengan syarat ruang lingkup kegiatannya dan juga keanggotaanya hanya meliputi Karesidenan Surakarta saja.

Bersamaan dengan pembekuan tersebut, sarekat Islam mendapat anggota baru dari Surabaya yakni Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Sebagai seorang intelektual muda, dia adalah tenaga pemikir sekaligus pelaksana yang eenergik, ia pun kemudian menyusun konsep satatuten baru dan mengajukannya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mendapatkan pengesahan. Dalam statute yang bary tersebut ia meminta kepada pemerintah agar keanggotaan serta ruang gerak Sarekat Islam meliputi seluruh Hindi Belanda.

Dalam rangka mempermudah pengawasan pemerintah Kolonial Belanda hanya bersedia memberikan pengesahan terhadap statute kepada organisasi Sarekat Islam lokal secara tersendiri. Terhadap organisasi Sarekat Islam lokal yang sifat dan tujuannya sama dengan Sarekat Islam, pemerintah Hindia Belanda memberikan pengesahan dengan ketentuan bahwa ruang geraknya hanya meliputi lokalitas tertentu yang sangat terbatas.

Maka dari itu sepanjang tahun 1913 bermunculah organisasi-organisasi Sarekat Islam Lokal, dan pada tanggal 18 Februari 1914 diadakan konferensi Sarekat Islam yang diikuti oleh para pemimpin Sarekat Islam Lokal dari berbagai daerah.

Dalam konferensi ini disepakati untuk membentuk pengurus central Sarekat Islam (CSI) dengan komposisi , H. Samanhudi sebagai ketua kehormatan, HOS Tjokroaminoto sebagai ketua dan Goenawan sebagai wakil ketua. Awalnya kepengurusan ini ditolak oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan baru kemudian bersedia memberikan pengakuan pada penguurus CSI¹¹³ sebagai suatu lembaga koordinasi terhadap organisasi-organisasi Sarekat Islam Lokal pada tanggal 18 mared 1916.

Bersamaan dengan maraknya pembentukan Sarekat Islam Lokal di Jawa pada akhir tahun 1913, persiapan pendirian Sarekat Islam Lokal Palembang telah pula di mulai. Belum diketahui secara pasti kapan persisnya SI berdiri di Palembang, namun berdasarkan informasi¹¹⁴ Sarekat Islam masuk ke Palembang tahun 1911 melalui Lampung dan dibawa oleh RM. Tirtohadisuryo dan R Gunawan. Jika informasi ini benar maka berarti Sarekat Islam di Palembang ini berasal dari sarikat dagang Islam di Bogor. Keberadaan sarekat Islam di Palembang Tahun 1911 juga dapat diperkuat dari adanya laporan tahunan pemerintah Kolonial Belanda mengenai Karesidenan Palembang, bahwa pada tahun 1911 tersebut di Palembang pengaruh Sarekat Islam mulai ada dimasyarakat.¹¹⁵

Masuknya Sarekat Islam di Palembang juga membuktikan kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam di Palembang sepertinya mulai terlihat tanda-tandanya antara tahun 1913 dan 1916. Pada bulan November 1913, di Palembang didirikan cabang Syarekat Islam (SI), yang dengan cepat merambat ke pedalaman. Selama tiga tahun, SI amat berhasil di Palembang, dan dalam waktu singkat, pimpinan gerakan memobilisir rakyat pedesaan untuk memakai lambang agama.

¹¹³ Deliar Noer, *Gerakan Pembaharuan Islam*. hlm 119

¹¹⁴ Tim Penulis, *Peranan Sarekat Islam di Karesidenan Palembang 1911-1920* (Jakarta: Depdikbud,), hlm 42.

¹¹⁵Lihat *Kolonial Verslagh* Tahun 1912.

Sebagai tanda semangat keagamaan, pegawai Belanda memperhatikan, pada puncak gerakan politik tahun 1915 dan 1916, masjid-masjid di Keresidenan Palembang ramai dikunjungi orang. Bahkan di *Uluhan* Palembang, penduduk desa, yang semula tidak menghiraukan kewajiban ritual mereka, kelihatan ramai mengunjungi masjid waktu sembahyang Maghrib dan Isya. Akan tetapi, mobilisasi massa ini, yang sifatnya sementara saja, belum mampu menerobos secara definitif dalam imbalan kekuatan kebudayaan. Dengan dihapuskannya agitasi politik pada tahun 1916, lenyap pula minat rakyat pedesaan untuk melaksanakan kewajiban religius

Sementara itu, seiring dengan penerapan desentralisasi dan perubahan dalam sistem politik "open the door", di tanah Uluhan Palembang, mulai banyak mengalir para pemodal besar asing yang menanamkan investasinya dalam bidang perkebunan-perkebunan besar dan perminyakan. Selain minyak bumi dan gas, di daerah uluan memiliki kekayaan dalam hal kecocokan tanah dengan tanaman *para* atau karet yang cukup laku di pasaran internasional. Sehubungan dengan dibukanya politik ekonomi "open the door", maka di daerah uluan ini masuk perusahaan-perusahaan asing yang didominasi oleh orang-orang Belgia. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini, pada dasarnya menyebabkan munculnya dualisme ekonomi di kalangan masyarakat daerah uluan, tanah marga untuk kesejahteraan masyarakatnya banyak yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan yang mempunyai modal kapital yang sangat besar. Namun kemunduran kesejahteraan di kalangan masyarakat bawah ini, menimbulkan kesejahteraan di kalangan atas daerah uluan ini, para penguasa formal tradisional seperti pasirah, kerio, pembarap dan lain-lain dapat memanfaatkan situasi ini dengan memperkaya diri. Perusahaan-perusahaan besar asing dalam memiliki tanah dengan cara berkolusi pada para penguasa formal tradisional, setelah mendapat

tanahperusahaan besar ini juga memberi prioritas kepada merekadalam memiliki tanah-tanah luas untuk ditanami karet secaraluas.

Kenyataan ini, menyebabkan berubahnya orientasi parapenguasa formal tradisional dari pemimpin kharismatik yangmemiliki visi mensejahterakan masyarakatnya. Mereka yang padazaman kesultanan bertindak sebagai pelindung dan pengayomdi daerah uluan, berubah menjadi pemimpin yang mulai memperkaya diri sendiri. Keadaan inilah yang mulai memunculkanperlawanan-perlawanan yang disebabkan dari kebencian di kalangan masyarakat bawahan di daerah uluan. Perlawanan iniacapkali timbul dalam bentuk semacam “protes” atau membangkang dengan menghindari dari gawe raja.¹¹⁶ Bahkan perlawanan yang dilakukan secara terbuka terjadi pada tahun 1918 didaerah Onder Afdeling OganHilir. Sebagaimana laporan yang termuat dalam Kolonial Verslag tahun 1918, yakni ;
..... Pada suatu hari, pada pagi dini hari tanggal 6 Februari1918 didaerah Onder Afdeling OganHilir, penduduk dari DusunSukkadana(Onder Afdeling OganHilir, dibawah Afdeling Palembang) melakukan penyerangan terhadap aparat Pemerintah Kolonial Belanda (*Controleur Ogan Hilir*) dan para pejabat lainnya. Pada peristiwa itu para penduduk pria mengenakan “*baju putih putih dengan ikat kepala warna merah*”, membawa senjata pisau belati dan parang. Sebelum melakukan penyerangan dilaporkan bahwa mereka (penduduk pria Dusun Sukkadana) sebelum

¹¹⁶ Konsep perlawanan masyarakat di daerah uluanini, sebetulnya merupakanperlawanan masyarakat umum kebanyakan terhadap penindasan yang merekaalami secara sewenang-wenang dari penguasa. Perlawanan ini tidak menggunakankekerasan, karena secara fisik mereka tidak mampu membuat perlawanan sepertiitu. Inilah yang dalam konsep Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-orangyang Kalah*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. Hlm. xxii-xxxii, disebut sebagaisenjatanya orang-orang kalah.

melakukan penyerangan, mereka melakukan *“ritual”* yakni dengan cara *“mandi di sungai”*, *“memakai Djimat”*. Dilaporkan juga bahwa Djimat tersebut sudah tersedia dengan harga per satuan Djimat f 0,50. Pada peristiwa tersebut kemudian mereka dihalau atau dihadang oleh patroli militer (*militaire patroulie*) dengan menggunakan senjata api. Peristiwa tersebut memakan korban dari pihak penduduk sebanyak 18 orang tewas terbunuh, dan dari pihak patroli militer Kolonial Belanda sebanyak 20 orang terluka parah. Diantara 18 penduduk yang tewas terbunuh tersebut terdapat pemimpin utama mereka, yang menyebut dirinya dengan nama *“Raden Gunawan”*. Dilaporkan juga bahwa seorang provokator dalam peristiwa tersebut adalah *“Haji Ali”*.¹¹⁷

Gerakan sosial yang terjadi tanggal 6 Februari 1918 di daerah Onder Afdeling Ogan Hilir ini merupakan gerakan sosial yang terjadi juga akibat masuknya perekonomian barat yang tidak diinginkan para petani dan pengawasan politik yang merongrong tatanan masyarakat tradisional. Gerakan sosial yang dilakukan oleh para petani ini tidak dilakukan para petani yang berada dikalangan bawah, akan tetapi dilakukan oleh para petani dikalangan atas. Tidak hanya para petani saja yang melakukan pemberotakan, akan tetapi justru lebih banyak dilakukan oleh para ahli agama sebagai propagandanya seperti yang dilaporkan dalam *Kolonial Verslag* tahun 1918, gerakan sosial tersebut dipropagandai oleh ulama yakni Haji Ali. Gerakan sosial yang terjadi ini dipimpin oleh kalangan atas yang ada di pedesaan yakni kaum elite agama serta kaum bangsawan.

¹¹⁷ Sumber : Perpustakaan Nasional RI , *Kolonial Verslag(Palembang)* ,Tahun 1918, hlm 15-16

Dalam kasus gerakan sosial di atas dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan mileniaris, dimana ada kelompok elit yang menggerakkan petani melalui sejumlah kreasi simbolik dan magis-agama. Gerakan seperti ini muncul dalam kondisi dimana terjadi benturan antara tatanan tradisional dan tatanan baru yang dibawa oleh kolonialisme. Benturan itu bisa dilihat mengganggu keseimbangan masyarakat tradisional, yang kemudian melahirkan frustrasi dan deprivasi, yang berkembang menjadi keresahan dan kegelisahan yang meluas, dan akhirnya mengarah kepada gerakan sosial. Mengapa gerakan sosial tersebut di atas disebut gerakan milenarian? Hal ini dapat dilihat adanya peran agama yang dominan dan tokoh kharismatik yang berpengaruh.

Peristiwa tahun 1918 di Onderafdeling Ogan Hilir sebenarnya memperlihatkan trauma sosial-kultural masa awal dari hubungan Kolonial yang bersifat sub-ordinatif.

Seperti diketahui setelah terjadi perang Palembang yang terakhir pada masa masa kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II pada tahun 1821 yang kemudian Sultan diasingkan ke Ternate, pemerintah Kolonial Belanda kemudian mengangkat Ahmad Najamuddin sebagai Sultan di Palembang. Bagi para kerabat SMB II pengangkatan ini tidak sah karena yang berhak sebenarnya menjadi Sultan adalah Husin Dhiyauddin yang merupakan adik kandung SMB II. Pada masa selanjutnya kerabat dan keluarga serta keturunan dan pendukung SMB II migrasi ke daerah pedalaman salah satunya di daerah Afdeling Ogan Hilir. Daerah ini dikenal sebagai markas pendukung SMB II. Diketahui juga bahwa para bangsawan Palembang yang migrasi ke daerah tersebut juga dikarenakan mereka sudah tidak mempunyai lagi hak-haknya sebagai bangsawan seperti halnya ketika sultan masih berkuasa.

Akibat Perang Palembang pada tahun 1821 dan kemudian Sultan diasingkan akhirnya berdampak terhadap

berbagai bidang diantaranya ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam hal ekonomi kemerosotan ekonomi semakin kelihatan sebagai dampak adanya pungutan berbagai macam pajak. Birokrasi tradisional pun menjadi hancur ketika pemerintah Kolonial berkuasa, terutama pada masyarakat pedalaman (Uluu).

Dalam situasi yang tidak mementu tersebut masyarakat desa/dusun berusaha memulihkan atau bahkan berusaha merombak dunia realitas (dibawah tekanan Kolonial Belanda) dan menginginkan terciptanya suatu dunia yang mereka sendiri sebenarnya tidak tahu secara pasti bagaimana bentuknya. Mereka sepertinya hanya menginginkan mengembalikan adat pada kebiasaan semula. Mereka menginginkan suasana hidup yang aman dan damai, dan membenci sebuah kekuasaan yang jahat dan penuh kekerasan. Ambruknya tatanan sosial kesultanan akibat penetrasi kolonial, mengakibatkan timbulnya cita-cita masyarakat untuk membangun kembali tatanan lama yang telah ambruk dalam bentuk harapan akan kedatangan Mahdi

Pada suasana yang demikian itu pada tahun 1915-an di daerah OnderAfdeling Ogan Hilir Organisasi Sarekat Islam menanamkan pengaruhnya dengan tokoh yang kemudian dikenal dengan nama "Raden Gunawan". Organisasi Sarekat Islam (SI) sebenarnya adalah organisasi yang tujuannya adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat dengan nilai-nilai dasar pergerakan kaum terjajah dengan bertumpu pada dimensi religiusitas dengan akar keIslaman, nasionalisme keindonesian, dan kerakyatan (demokrasi) bagi kebangunan kaum Bumi Putera (Inlander). Titik tujuannya adalah kehendak mengenyahkan penjajah Belanda, dan diraihnya sebuah pemerintahan sendiri yang dipegang,

ditentukan, dan dijalankan oleh bangsa Indonesia secara mandiri.

Figur dan aktivitas Raden Gunawan tersebut ternyata memberi inspirasi kepada seorang tokoh di Onderafdeling Ogan Ilir/Hilir yakni Pesirah (Depati) Abdul Hamid dan Muhammad Amin. Pesirah (Depati) Abdul Hamid dan dibantu oleh Muhammad Amin mendirikan sebuah perkumpulan yang disebut dengan *Sarekat Abang*. Melalui organisasi inilah kemudian salah satu peristiwa tanggal 6 Februari 1918 di daerah Onder Afdeling Ogan Hilir terjadi.

Tokoh "Raden Gunawan" sendiri sebenarnya meski dalam sumber teks Kolonial disebut sebagai pemimpin mereka, namun jika dianalisis kemungkinan nama "Raden Gunawan" adalah simbol bagi ideologi mereka. Karena "Raden Gunawan" keberadaan nama tokoh tersebut sebagai pemimpin gerakan sosial muncul juga di daerah-daerah lain baik di Afdeling Palembang maupun di Afdeling Muara Tembesi Karesidenan Jambi.¹¹⁸ Nama "Raden Gunawan" seolah adalah tokoh yang dikagumi, ia seakan akan menjadi personifikasi dari kepemimpinan.

Dalam keadaan yang seperti peristiwa di atas, di mana para umara, tidak bisa menjadi "tumpuhan", masyarakat di kalangan bawah mulai mengingat masa lampau dengan mengharapkan datangnya juruselamat dalam sosok "ratu adil" atau "Imam Mahdi". Di kalangan penduduk bawah uluan, bersamaan dengan adanya politik etnis yang salah satunya adalah berisi tentang edukasi, dengan tujuan memajukan pendidikan justru berdampak mulai muncul gap di kalangan penduduk, yaitu adanya golongan atas, anak pasirah, pembarap, bahkan kerio yang dapat mengenyam pendidikan formal yang

¹¹⁸ Lihat Teuku Ibrahim Alfian dkk, *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis: kumpulan karangan dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo* (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1987)

diselenggarakan Belanda. Sementara anak-anak golongan bawah sepertinya hanya mendapat pendidikan agama, yang ditampung oleh golongan agama, baik itu oleh ulama golongan "kaum tuo" maupun "kaum mudo".¹¹⁹

Golongan agama inilah yang mendirikan sekolah hampir di setiap marga dan dusun di uluan.¹²⁰ Bersamaan dengan itu, padatataran nasional, masa ini mulai timbul pergerakan nasional, terutama pergerakan yang dimotori oleh kaum agama. Pergerakan kaum agama ini mulai masuk jauh pada tingkatan lokal untuk mendidik kader-kader agar sadar akan kenasionalismenya.

Dengan demikian, setelah masuk ke Kota Palembang pada tahun 1912 yang dibawadua orang tokohnya, R.M. Tirtohadisuryo dan Raden Gunawan, organisasi Sarekat Islam mulai masuk juga ke daerah-daerah Uluan Palembang. Tercatat dalam rentang waktu 1914 sampai dengan 1920 telah terbentuk cabang-cabang Sarekat Islam hampir di seluruh Keresidenan Palembang lengkap dengan pengurus dan anggota-anggotanya yang cukup banyak. Pengaruh pergerakan pada tingkat nasional, di mulai ketika masuknya pengaruh Sarekat Islam di daerah Uluan Keresidenan Palembang. Gerakan emansipasi ini meletakkan spiritnya pada Islam sebagai agama yang

¹¹⁹Istilah kaum tuo dialamatkan untuk para ulama atau pemimpin agama yang mendapat pengetahuan agama secara tradisional dari orang tua atau moyangnyayang biasanya bekas ulama sepuh penasehat pada zaman Kesultanan Palembang, yang mana mereka dipandang masih berpendirian kolot. Sementara istilah kaum mudodialamatkan pada ulama atau pemimpin agama yang mendapat pengetahuan agamamelalui pendidikan modern, dengan masuk pesantren atau giat di organisasi-organisasi politik yang berpandangan modern, seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam dan sebagainya. Pada lingkup dalam mencari pengaruh dua golongan ini sering didapat perbedaan, namun pada tingkat ajaran keduanya sepakatsama. Lihat dalam Jaroen Peeters. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang, 1821-1942*. Jakarta: INIS, 1998.

mendorong setiap orang untuk bergerak membangun kesetaraan, kemerdekaan dan kemanusiaan.

Ternyata Sarekat Islam juga menjadikan surat kabar sebagai alat perjuangannya. Sebagaimana diketahui, media massa baik itu berupa koran, majalah maupun famlet, dalam sejarah perjuangan revolusi di Indonesia bukan hanya sebagai industri bisnis percetakan dan penerbitan, tetapi sekaligus juga merupakan sarana pendidikan, penyebaran gagasan, dan bahkan sebagai alat perjuangan serta propropaganda politik. Para pembaharu Islam menggunakan media massa sebagai salah satu cara memperkenalkan pemikiran dan gagasan-gagasannya, seperti dapat dilihat pada majalah *Al-Imam* (1905-1910) dan *Al-Munir* (1910-1916).

Sepertihalnya keberadaan Sarekat Islam di Palembang, pada masa selanjutnya oleh para pembaharu tersebut kemudian menerbitkan Koran pada tahun 1920 dengan nama "**Teradjoe**". Koran ini sepertinya sebagai alat untuk menyebarkan gagasan-gagasan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tertindas dan lemah. Hal ini bisa dilihat dari judul yang ada di lembar pertama bagian atas, yakni berbunyi : "**Teradjoe**, 1919, 1920. *Orgaan Boeat Kaum Jang Tertindas dan Jang Lemah*, diterbitkan oleh **Sarikat Islam Palembang** tiap hari senin di Palembang kecuali hari umum. Redaktur RHM Rasyid. Direktur R. Nangling kantor redaksi 17 Ilir "*Sajanganweg*".¹²¹

E. Elit Lokal Modern Dalam Organisasi Muhammadiyah : Dari Sekolah Hingga Madrasah

Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya, yakni pada bulan Nopember 1912 tidak lepas dan merupakan menifestasi dari gagasan pemikiran dan amal

¹²¹ Perpustakaan Nasional RI. Surat kabar *Teradjoe*, Tahun 1919, dan Tahun 1920.

perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kyai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang; juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kyai Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kyai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Sesudah tahun 1924, organisasi Muhammadiyah mulai merambah ke luar Jawa. Cabang pertama Muhammadiyah di luar pulau Jawa didirikan oleh Haji Rasul atau Haji Abdul karim Amrullah (HAMKA) di Sungai Batang Sumatera Barat pada bulan Juni 1925.¹²²

Untuk mengetahui awal kehadiran Muhammadiyah di Palembang, maka sebelumnya mau tidak mau harus

¹²² HAMKA, Muhammadiyah di Minangkabau (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1974)

membincangkan siapa pertama yang membawa faham baru tersebut. Kehadiran seseorang yang berasal dari kaum Yogyakarta dengan tujuan berdagang batik dan perak merupakan awal kehadiran faham Muhammadiyah ini, dan ia adalah H. Ridwan. Kehadiran H. Ridwan ini membawa semangat pembaharuan di Palembang, maka dengan cara berdakwah atau tablig ia melancarkan gerakannya. Pada tahun 1928 ia berdakwah ke daerah Talang Jawa bersama temannya yakni Subono Purwawiyata yang mana ia adalah seorang yang bekerja sebagai pegawai kantor pos di Palembang.¹²³ Maka di daerah Talang Jawa inilah selanjutnya banyak simpatisan yang bergabung dengan H. Ridwan.

Talang Jawa adalah sebuah pemukiman yang dihuni masyarakat yang berasal dari Jawa. Hal ini adalah dampak adanya “kolonisasi” pertama di distrik Lampung. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka kemudian membuka lahan kebun di sebuah tanah talang, dan kemudian mereka biasanya menjualnya ke kota. Kampung Talang Jawa ini letaknya di tanah perbatasan antara Lampung dan Palembang. Akibat yang ditimbulkan dengan terciptanya ekonomi pasar di Palembang salah satunya adalah banyaknya suku pendatang, baik dari Jawa maupun Minang. Ternyata kehadiran Kolonial Belanda di Palembang yang berusaha ingin mendominasi sumber ekonomi tersebut juga membawa dampak yang luas bagi penduduk Palembang terutama sehubungan dengan terciptanya ekonomi pasar.

Sebagaimana diketahui, ditengah-tengah perubahan sosial dan politik ini berdampak terjadinya juga perubahan yang sangat besar pada aktivitas ekonomi penduduk, terutama perubahan yang berkaitan dengan perluasan produksi serta

¹²³ Jamaluddin, *Riwayat Berdiri dan Berkembangnya Muhammadiyah Cabang Palembang Sampai tahun 1942* (Palembang: 1982), hl. 1-2.

perdagangan komoditas ekspor terutama karet, kopi, dan lada. Perubahan tersebut sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan yang terjadi pada periode sebelumnya, terutama sejak akhir abad XVIII. Sejak dekade kedua abad XX ketika terjadi 'puncak' perdagangan karet, Palembang ternyata menjadi salah satu tujuan utama pendatang dari Minang. Kebanyakan perantau tersebut datang melewati Bengkulu dan sebagian besar menetap di dataran tinggi Bukit Barisan, sebelum mereka melanjutkan perjalanannya ke ibukota Palembang. Di kota pelabuhan ini, para pendatang dari Minang kebanyakan mencari nafkah sebagai pedagang kecil, terutama dengan menjual barang yang terbuat dari besi seperti periuk, panci dll. Pusat perdagangan yang berada di Pasar 16 ilir Palembang memang telah lama dikuasai oleh pedagang dari Arab dan Cina.

Pedagang-pedagang Cina, mampu bertindak sebagai agen yang mengandalkan pengalaman-pengalaman mereka sebagai pedagang tangguh. Warga kota ini, hampir semuanya menerjunkan diri dalam berbagai kegiatan dagang, mulai dari penunggu warung atau toko, pedagang kecil-kecilan, pengecer kebu-tuhan sehari-hari, sampai kepada agen penyalur komoditas kopidan karet sekaligus eksportir dan importirnya yang memiliki jaringan usaha luas ke luar kota Palembang. Keadaan seperti ini jelas merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan buat orang-orang dagang. Orang-orang Cina di Palembang, termasuk dalam kelas warga kota yang dapat melihat peluang ini. Oleh karena itu, mereka berusaha kuat untuk memelihara perdagangannya di Kota Palembang. Mereka tidak berusaha melawan perdagangan asing, tetapi dengan baik berusaha mempertahankan perdagangan sendiri. Mereka tetap menjalin dan memelihara kongsi-kongsi dagang dengan sebaik mungkin sesama mereka, seperti kongsi dagang Siang Loen Tjoen atau bernama lain Tjong Hoa Sing Loen Choen Kongsi

dan Han Lie. Mereka jarang sekali mengirim barang-barang dagangannya dengan kapal KPM, paling-paling kalau terpaksa hanya untuk membawa barang-barang ke tanah Jawa.¹²⁴

Demikian juga dengan orang-orang Arab, termasuk didalamnya sebenarnya ada orang-orang India serta Timur Asinglainnya, dalam pertengahan abad ke-19 juga tidak mau kalah dengan orang-orang Cina, mereka mendominasi perdagangkain dan tekstil serta kapal dan perusahaan kayu.¹²⁵Salah satu perusahaan besar yang dimiliki warga kota yang berasal dari golongan ini adalah perusahaan Said Aboe Bakar bin Ahmadyang bergerak dalam usaha tanaman tebu dan industri guladipinggiran kota. Walaupun menjelang abad ke-20, para pengu-saha Arab ini mengalami kemunduran karena tekanan pemerintah kolonial dengan menjalankan kebijakan diskriminasi yangtidak memperbolehkan mereka untuk berdagang memasukidaerah pedalaman, namun ada sedikit yang dapat bertahan sampai pertengahan abad ke-20 seperti Firma Assegaf dan FirmaAlimoenar, P.T. Ali yang bergerak sebagai pengergajian kayu.¹²⁶

Arus pendatang baru dari daerah luar ke Palembang pada awal abad XX juga disebabkan oleh keberadaan perusahaan minyak yang juga makin membuka peluang pekerjaan. Pada sektor pemerintahan juga terbuka peluang bagi orang pendatang, salah satunya juga yang berasal dari Minang.

¹²⁴ Lihat dalam *Kemoedi, Palembang*, Sabtoe, 3 Juli 1926. Beberapa orang-orang Cina ini juga memiliki perusahaan besar dalam sektor eksport seperti N.V. Palembang Ruber dan N.V. Hok Tong, eksportir kopi Firma Lim KimHin, Firma Ong Tek Jang, N.V. Goei's Handelmaatschaappij, dan Handelmaatschaappij Kian Gwan serta perusahaan balok es N.V. Nieuweljsfabriek. Lihat juga dalam Wellan, 1932. op. cit. hlm. 300-398. Lihat juga dalam Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, (Jakarta : INIS, 1997), hlm. 133.

¹²⁵ Lihat dalam G. Fischer, *Een Papierfabriek te Palembang*, (Palembang: (s.n, 1920), hlm. 13.

¹²⁶ *Pertja Selatan*, Palembang, 16 Januari 1932.

Migran dari minang ini diantaranya adalah juga sebagai kader Muhammadiyah dari tempat asalnya, sehingga ketika berada di Palembang membawa pengaruh terhadap perkembangan gerakan pembaharuan di Palembang. Salah satu pendatang dari minang yang bekerja sebagai pegawai kantor pos adalah Muhammad Rusli, selain itu juga Zainal Abidin Djambek yang merupakan putra dari seorang ulama reformis dari Padang panjang yakni Djamil Djambek. Zainal Abidin Djambek ini bekerja sebagai pegawai pada industry minyak di Plaju..

Para kader Muhammadiyah yang berasal dari luar Palembang ini dalam aktifitasnya masih bersifat informal, sehingga belum ada menunjukkan indikasi adanya cabang Muhammadiyah pada dekade kedua abad XX. Meski berdasarkan sumber pada tahun 1928 ada usaha untuk mendirikan cabang muhammadiyah di Palembang, namun usaha ini mendapat perlawanan dari golongan ulama konservatif yang berusaha menghalangi tumbuh dan berkembangnya pengaruh reformis tersebut. Akhirnya baru pada tahun 1931 para aktivis dari kelompok reformis ini membentuk pengurus Muhammadiyah yang mana anggotanya kebanyakan dari suku Jawa, Minang serta Palembang. Adapun yang ditunjuk sebagai ketua yang pertama adalah Zainal Abidin Djambek.¹²⁷

Meskipun di Kota Palembang cabang Muhammadiyah baru diresmikan pada bulan Januari tahun 1931 di Kampung 21 Ilir,¹²⁸ namun demikian cabang pertama Muhammadiyah di Karesidenan Palembang justru terdapat di wilayah pedesaan yakni di Sekayu pada tahun 1926. Pembukaan cabang tersebut adalah bersamaan dengan pembukaan sebuah sekolah

¹²⁷*Pertja Selatan*, Palembang 20 januari 1931.

¹²⁸ Lihat dalam Jaroen Peeters. *Kaum Tuo-Kaum Mudo*: hlm. 168.

Muhammadiyah yang dihadiri langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Yogyakarta.

Meski Sekolah Muhammadiyah sekayu telah resmi didirikan, namun demikian sekolah tersebut sempat berhenti selama empat bulan sejak awal pembukaannya disebabkan karena guru sekolah tidak mendapatkan izin mengajar dari residen Palembang. Sekolah baru tersebut baru dibuka kembali setelah Residen Palembang menerima surat dari *Adviseur voor Inlandsche Zaken* yang tidak membenarkan tentang penutupan sekolah tersebut. Residen Palembang kemudian menyatakan bahwa penutupan tersebut karena kekhilafan. Untuk selanjutnya ia memerintahkan Controleur untuk membuka kembali sekolah tersebut.¹²⁹

Berdasarkan fakta di atas maka keberadaan tentang Muhammadiyah beserta lembaga pendidikan Islam yang didirikannya sampai pada tahun 1930-an awal keberadaannya masih sebatas wilayah sekayu dan beberapa tempat di luar Kota Palembang sendiri. Kemunculan lembaga-lembaga pendidikan Islam Muhammadiyah baik yang berbentuk sekolah maupun madrasah, tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan organisasi Muhammadiyah sendiri yang mana organisasi tersebut merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan.

Oleh karena gerakan Muhammadiyah ini berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, maka upaya yang kemudian paling menonjol dalam gerakannya adalah mendirikan lembaga pendidikan Islam baik yang berbentuk sekolah maupun madrasah.

¹²⁹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 194. Sebelum dibuka di Sekayu, cabang Muhammadiyah di wilayah Sumatera bagian selatan tampaknya lebih dahulu dibuka di wilayah Kepahiang (Bengkulu). Lihat, "Openbare Vergadering Moehammadijah Tjabang Kepahiang", dalam *Pertja Selatan*, No. 126, 3 Nopember 1928, hlm. 5.

Adapun data yang paling awal yang menginformasikan tentang keberadaan lembaga pendidikan Islam yang didirikan Muhammadiyah adalah di wilayah Sekayu yakni pada bulan Februari 1928. Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 1928, diinformasikan telah diselenggarakan kegiatan ujian terhadap murid-murid Sekolah Muhammadiyah Sekayu. Ujian tersebut diselenggarakan dalam dua tahap. Tahap pertama, mulai jam 8 pagi hingga jam 10 diperuntukkan bagi murid-murid kelas satu. Pelajaran yang diujikan antara lain adalah membaca ayat-ayat al-Qur'an dan bercakap-cakap dalam Bahasa arab. Tahap kedua, dari jam 10 sampai jam 12 ujian diselenggarakan untuk murid-murid kelas II, dan pelajaran yang diujikan antara lain adalah hukum-hukum agama Islam yang ringkas dan tarikh perjalanan nabi Muhammad SAW. Selain itu juga pelajaran Bahasa Arab, hitungan, menulis huruf Arab serta semuanya dilakukan dengan Bahasa Arab.¹³⁰ Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa sejak dibukanya Sekolah Muhammadiyah pada tahun 1926 sampai dengan bulan Februari 1928, sekolah tersebut telah memiliki dua kelas yakni kelas I dan kelas II.

Diberitakan juga bahwa setelah ujian tersebut, maka pada hari Minggu 12 Febrauri 1928 kemudian diadakan perayaan sekolah dengan mengadakan karnaval yang menampilkan berbagai kegiatan serta dihadiri banyak pengunjung serta dihadiri okeh orangtua, murid, masyarakat umum serta para pejabat. Para pejabat yang hadir dalam perayaan tersebut diantaranya adalah ; Demang, Pembarap, Mantri Belasting, Guru Kepala Sekolah Gouvernemen Kelas II, Kerio penghulu, Khotib dari Kayu Ara, serta seorang Ulama bernama KH Somat dan Controleur.¹³¹

¹³⁰ Lihat, "Moehammadijah Sekajoe", *Pertja Selatan* No. 22(21 Februari 1928), hlm. 2.

¹³¹*Ibid.*

Keinginan untuk memajukan terus Sekolah Muhammadiyah Sekayu direalisasikan antara lain melalui pertemuan yang diadakan pada tanggal 1 April 1928 di Gedung Sekolah tersebut, untuk mendirikan apa yang disebut "Perkumpulan Muhammadiyah cabang Sekayu". Adapun rencana pembentukan perkumpulan ini adalah bertujuan menghimpun dukungan bagi kesinambungan sekolah Muhammadiyah baik dalam bentuk dana maupun tenaga.¹³²

Lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk selanjutnya dari Sekayu kemudian berkembang merambah ke luar daerah yakni di desa Kotaraja pada pertengahan tahun 1929. Sekolah yang ada di wilayah ini merupakan transformasi dari pengajaran agama Islam yang dilakukan secara non-formal oleh seorang tokoh bernama H. Sjamsoeddin pada majelis ta'lim di perkebunan Dusun Jerambah Pandan dan Tjakatan Tapah. Oleh karena peserta pengajian di lingkungan pegawai perkebunan yang berasal dari beragam usia ini semakin banyak, maka kemudian H Sjamsoeddin ini mengajak Alwi dan H. Arif (seorang aktifis Muhammadiyah) untuk mengembangkan pengajian tersebut. Berdasarkan petunjuk dari persyarikatan Muhammadiyah cabang Betawi, H. Sjamsoeddin dan Alwi mentransformasikan majelis ta'lim tersebut menjadi sekolah agama yang merupakan salah satu afiliasi lembaga pendidikan Muhammadiyah.¹³³ Meski tidak dapat keterangan lebih jauh mengapa H. Sjamsoeddin menerima saran Alwi bin H. Arif untuk memilih organisasi Muhammadiyah sebagai patron bagi lembaga pendidikan Islam yang ia dirikan, namun demikian hal ini menunjukkan bahwa ia tidak mempunyai problem dengan faham 'puritanisme' atau faham keagamaan Islam modernis-reformis ini yang pada masa tersebut banyak ditentang oleh

¹³² Lihat, "Openbare Vergadering Moehammadijah Sekajoe", *Pertja Selatan*, No.47 (26 April 1928), hlm. 6.

¹³³ Lihat, "Moehammadijah", *Pertja Selatan*, No.62 (1929), hlm. 5.

banyak tokoh serta ulama-ulama di Karesidenan Palembang. Dimungkinkan bahwa Sjamsoeddin ini juga merupakan simpatisan dari kelompok yang berfaham Islam modernis.

Adapun dari segi organisasinya, Muhammadiyah yang ada di Kotanegara ini tampaknya mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga bulan Mei 1929. Alasan tersebut antara lain dapat dilihat ketika diadakannya pertemuan besar di halaman rumah H. Sjamsoeddin (vice president) dan dipimpin oleh Alwi bin H. Arif selaku president atau vorzitter Muhammadiyah group Kotanegara, pada saat itu dihadiri kurang lebih 200 orang yang terdiri dari para pengurus Muhammadiyah, Penghulu di Kotanegara, guru-guru, para Khatib, beberapa anggota masyarakat dari kotanegara dan sekitarnya, serta seorang Penggawa (wakil pemerintah).¹³⁴

Adapun Muhammadiyah cabang Palembang yang berdiri pada tahun 1931 justru baru memulai kegiatannya dalam bidang pendidikan pada tahun 1933, yakni dengan membuka sebuah sekolah HIS Partikelir di Kampung Kepandean di sisi Ilir Palembang. Setahun kemudian yakni pada tahun 1934, Muhammadiyah di 27 Ilir dan 4 Ulu Kota Palembang mendirikan sebuah Madrasah di kampung 4 Ulu yang dinamakan Madrasah Al-Hidayah.¹³⁵ Peresmian gedung Madrasah Al-Hidayah ini dilakukan pada tanggal 15 April 1934 yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat. Keberadaan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi di Kota Palembang didukung sepenuhnya oleh penyandang dan yakni H. Anang yang merupakan cucu dari H.Akil.¹³⁶

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵ Lihat, "Comite Al-Madrosatoel Hidadjah Diboebarkan", *Pertja Selatan*, No.27 (3 Maret 1934), hlm. 2.

¹³⁶ Lihat dalam Jaroen Peeters. *Kaum Tuo-Kaum Mudo*; hlm.169. H. Akil ini dikenal juga sebagai tokoh Islam yang juga mendirikan lembaga pendidikan Islam yang bernama "Madrasah Ahliyah" di Kampung 28 Ilir Palembang.

Memasuki tahun 1936 Muhammadiyah semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan Muhammadiyah yang baru bermunculan di berbagai tempat, diantaranya adalah : di Pagar Alam, Lahat, Plaju dan juga Kota Palembang. Pada akhir bulan Mei 1936 Konferensi Muhammadiyah daerah Lampung-Palembang yang diselenggarakan di Pagar Alam telah menerbitkan salah satu keputusan penting, yakni kesepakatan untuk mendirikan sebuah Madrasah 'Mu'allimin (Kweekschool) di Pagar Alam paling lambat pada bulan Juli 1936. Direncanakan bahwa Madrasah ini akan mengajarkan lima bidang ilmu, yakni : Agama dan Bahasa Arab, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Keorganisasian dan Kepanduan. Dinyatakan juga bahwa kurikulum Madrasah Mu'allimin ini akan disamakan dengan Kweekschool Muhammadiyah di Yogyakarta.¹³⁷ Disamping Mu'allimin, Aisyiah Muhammadiyah juga merencanakan untuk mendirikan Madrasah Mu'alimmat (Kweekschool khusus untuk putri) pada tahun 1936, yang direncanakan akan di bangun di wilayah Plaju.¹³⁸

Adapun di Lahat, telah berdiri juga sebuah lembaga pendidikan Islam yang bernama Diniahschool Muhammadiyah. Sampai dengan pertengahan tahun 1936 Madrasah ini terus melakukan berbagai upaya pencarian dana untuk mengembangkan madrasah tersebut. Salah satu yang dilakukan oleh Diniahschool Muhammadiyah Lahat untuk mencari dana ialah dengan mengadakan pertunjukan "Toonel" (drama), yang bekerjasama dengan sebuah HIS partikelir di daerah tersebut. Maka pada malam Minggu 8 juni 1936 para pemuda Muhammadiyah Lahat mengadakan pertunjukan toonel tersebut di Gedung Edison Theater Lahat di bawah arahan S.

¹³⁷ Lihat, "Madrasah Mu'allimin; Kweekschool Moehammadijah", *Pertja Selatan*, No.63 (26 Mei 1936), hlm. 5.

¹³⁸*Ibid.*

Miharjo. Hasil dari pertunjukkan tersebut kemudian disumbangkan untuk HIS Partikelir dan Dinihschool Muhammadiyah Lahat.¹³⁹

Lembaga pendidikan muhammadiyah juga didirikan di Plaju, sebuah kota kecil di seberang Ulu Sungai Musi. Sampai dengan bulan Juni 1936 ternyata telah muncul berbagai jenis lembaga pendidikan Muhammadiyah. Perkembangan lembaga pendidikan cabang Muhammadiyah di Plaju pada masa itu bahkan diberitakan lebih maju daripada cabang Muhammadiyah lainnya di wilayah karesidenan Palembang. Beberapa lembaga yang didirikan sampai dengan akhir bulan Juni 1936 di Plaju antara lain adalah : standaarschool, diniyah School, Frobelschool serta kursus-kursus pada waktu siang serta malam hari. Sejak 1 Agustus 1936 didirikan pula sebuah Schakelschool dengan jumlah 5 kelas, sedangkan standaarschool yang berjumlah 5 kelas akan dirubah menjadi Volksschool dengan 3 kelas, sebagai *onderbouw* Schakelschool. Selain itu terdapat juga Madrasah Mu'alimmat (sekolah guru perempuan). Muhammadiyah Plaju juga telah memiliki gedung sekolah sendiri seharga f 2000. Sampai dengan akhir bulan Juli 1938, Muhammadiyah cabang Plaju telah memiliki dua gedung sekolah sendiri, yang mana gedung pertama digunakan untuk HIS dan Schakelschool, serta yang lainnya digunakan untuk Aisyah dan Bustanul Atfal (dibuka secara resmi 31 Juli 1938).¹⁴⁰

Sementara itu di Kota Palembang sampai dengan Juli 1936 terdapat 6 jenis lembaga pendidikan Muhammadiyah. Sekolah dan Madrasah Muhammadiyah cabang kota Palembang yang terletak di Bukit Kecil no 23 ini antara lain adalah: HIS Muhammadiyah (kelas I-VII), Schakelschool Muhammadiyah (kelas I-III), Dinijah School (kelas I-III), Madrasah Wutqo (kelas

¹³⁹Lihat, "Pertoenjoekan Toonel di Lahat", *Pertja Selatan*, No.69 (9 Juni 1936), hlm. 2.

¹⁴⁰ Lihat, "Ondewijs di Plajoe", *Pertja Selatan*, No 76 (25 Juni 1936).

I- III), Madrasah Mu'alimmin (Kweekschool laki-laki) dan Madrasah Mu'alimmat (Kweekschool putri).¹⁴¹ Lembaga pendidikan Muhammadiyah juga dibuka di Desa Sungai Pinang.

Ekspansi lembaga pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah selalu juga diiringi oleh ekspansi Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi social-keagamaan. Pada pertengahan juli 1936, Muhammadiyah cabang Palembang telah melebarkan sayap organisasinya dengan membuka cabang baru di Dusun teluk Marga Epil Musi Ilir. Pembukaan ini ditandai dengan kedatangan dua orang Mubaligh dari Muhammadiyah cabang Palembang ke desa tersebut dengan maksud mengadakan tabligh dan melantik pengurus Muhammadiyah group teluk. Adapun mereka yang dilantik adalah para pengurus Persyarikatan Muhammadiyah sebanyak 43 orang, anggota Aisiyah 54 orang, anggota Pemuda Muhammadiyah sebanyak 47 orang, serta 50 orang anggota Nasyyatul Aisiyah. Muhammadiyah group teluk ini juga telah memiliki lembaga pendidikan dan telah mempunyai siswa sebanyak 51 siswa.

Pemekaran organisasi selanjutnya dilakukan di Desa Lumpatan dengan peresmian yang diadakan pada 5 Juli 1936 di rumah Ghazali dan dipimpin oleh Husein (Ketua Muhammadiyah Cabang Sekayu). Acara tersebut dihadiri kurang lebih 500 orang anggota dari masyarakat Dusun Teluk.¹⁴²

Sampai dengan awal tahun 1937 ekspansi organisasi Muhammadiyah telah memenuhi wilayah Afdeling Ogan Ilir

¹⁴¹ Lihat, "Madrasah Mu'alimmin (Kweekschool laki-laki) dan Madrasah Mu'alimmat (Kweekschool Putri), *Pertja Selatan*, No 153(23 Desember 1937), hlm. 5-6.

¹⁴² Lihat, "Moehammadijah Melebarkan Sajap di Moesi Hilir", *Pertja Selatan*, No.84 (14 Juli 1936), hlm. 5.

dan Ogan ulu. Sedangkan di wilayah Komering Ilir, group Muhammadiyah baru terdapat di Sira Pulau padang. Sementara itu pembukaan cabang Muhammadiyah di wilayah afdeling Komering Ilir bertempat di Kayu Agung pada tahun 1937.¹⁴³ Namun demikian perkembangan Muhammadiyah di Kayu Agung ini tidak lancar, hal ini disebabkan karena besarnya tantangan dari pihak yang anti terhadap Muhammadiyah.

Perkembangan yang sangat pesat pada organisasi Muhammadiyah ini hingga tercatat sampai dengan bulan Februari 1937 terdapat tidak kurang dari 20 group Muhammadiyah di wilayah Karesidenan Palembang. Ketika organisasi Muhammadiyah terus melebarkan sayapnya, lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak hanya berkembang secara kuantitas, namun juga semakin diakui kualitasnya. Hal ini dibuktikan ketika dalam pemeriksaan atau penilaian oleh Inspecteur van Onderwijs dan Hoofdschool Opziener, sejak bulan Juli 1936 salah satu lembaga pendidikan Muhammadiyah yakni Perguruan Muhammadiyah yang ke-11 di Bukit Kecil Palembang berhak menggunakan nama "Holland Inlandsch School (HIS) untuk sekolahnya.¹⁴⁴ Pengesahan terhadap HIS Muhammadiyah ini tampaknya menyerupai proses akreditasi terhadap sekolah swasta pada saat ini,

Adanya proses transformasi perguruan Muhammadiyah ke-11 menjadi HIS, maka dengan demikian di Kota Palembang bertambah satu lagi HIS Muhammadiyah. Sebab sejak tahun 1932/1933 Muhammadiyah di Palembang telah mendirikan HIS pertama di Kampung Kepandean sebelah Ilir Kota Palembang.

¹⁴³ Lihat, "Perkoempoelan Moehamadiah", *Pertja Selatan*, No. 11 (29 Januari 1937).

¹⁴⁴ Lihat, "Pergoeroean Moehamadiah Bukit Ketjil ke-11 telah Mendapat pengesahan (Erkenning)", *Pertja Selatan*, No. 149 (12 Desember 1936), hlm.11. Sekolah Muhammadiyah Bukit Kecil ini disahkan oleh Pemerintah Kolonial menjadi HIS partikelir berdasarkan Besluit Departemen Onderwijst No. 37147/B tertanggal 10 Desember 1936.

Akan tetapi HIS ini sepertinya belum mencapai status sebagaimana HIS di Bukit Kecil. Sementara itu, pada tanggal 3 Januari para aktivis Muhammadiyah cabang Palembang merayakan 5 tahun berdirinya HIS Muhammadiyah cabang Palembang pertama tersebut. Perayaan tersebut dipimpin sendiri oleh ketua Muhammadiyah cabang Palembang, yakni Soebono.¹⁴⁵ Soebono ini kemudian digantikan oleh H. Moehammad yang terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah cabang Palembang yang baru dalam rapat tahunan Muhammadiyah cabang Palembang 14 Februari di gedung HIS Muhammadiyah Bukit kecil. Rapat tersebut juga membahas hal-hal penting lain, antara lain adalah *Verslag* (laporan) tahunan, dan urusan rumah tangga. Soebono juga kemudian terpilih kembali sebagai ketua Muhammadiyah cabang Palembang untuk periode 1938-1940 pada rapat umum pemilihan pengurus baru Muhammadiyah pada tanggal 1 Februari 1938. Selain itu juga tokoh Iskhak Lazim sebagai wakil ketua serta Kanan Pane sebagai sekretaris.

Dalam mengelola lembaga pendidikan Islam ini, tampaknya Muhammadiyah sangat mampu sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pada sebagian masyarakat di beberapa tempat di karesidenan Palembang. Beberapa sekolah dan madrasah yang tidak maju atau bahkan mati ditangan pengelola sebelumnya, kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah untuk dikelola dan dijadikan salah satu perguruan Muhammadiyah. Salah satu contoh adalah kasus yang terjadi pada sebuah sekolah yang dikelola oleh organisasi yang bernama Taman Pendidikan di Desa Tebing Gerinting. Oleh karena terus menerus mengalami kemunduran, pengurus organisasi tersebut kemudian menyerahkan sekolahnya kepada

¹⁴⁵ Lihat, " Moehammadijah Palembang", *Pertja Selatan*, No. 25 (27 Februari 1937), hlm. 5-6.

Muhammadiyah. Pihak Muhammadiyah pun menerima penyerahan tersebut dan segera mengirimkan seorang guru kepala alumni HIK Muhammadiyah Solo untuk mengelolanya.¹⁴⁶ Beberapa tahun sebelumnya juga sebuah madrasah yang berada di Tanjung Raja, pada tahun 1932 juga sempat akan menyerahkan kepada muhammadiyah karena terus mengalami kemunduran.

Selain dua buah HIS Muhammadiyah Kampung Kepandean Ilir dan Bukit Kecil di Kota Palembang, terdapat satu buah lagi HIS Muhammadiyah partikelir yang dibuka di Sungai Gerong Plaju. Adapun perayaan pembukaan HIS Muhammadiyah ini diadakan pada hari senin, tanggal 8 Agustus 1937 serta dihadiri oleh para undangan dari beberapa organisasi, seperti: Nurul Huda, Cooperatie BSB, Rukun Periatin, Mars, Cooperatie Rukun setia, setia hati, dan JMP.¹⁴⁷ Dalam usia yang relative muda ini, HIS Muhammadiyah Plaju ini telah mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Plaju dan sekitarnya. Sebagaimana sekolah partikelir Barat semisal NP HIS dan *Volkschool Gemeentee* di Plaju, HIS Muhammadiyah ini juga diminati banyak calon siswa. Dilaporkan bahwa pada HIS yang baru dibuka ini terdapat 30 orang siswa.¹⁴⁸

Sepertinya dalam bidang pendidikan ini, Muhammadiyah banyak dinilai positif oleh pemerintah Kolonial. Pemberian *Besluit* untuk akreditasi sekolah Muhammadiyah menjadi HIS dan kunjungan-kunjungan pejabat Dinas pendidikan Belanda terhadap Perguruan Muhammadiyah membuktikan hal ini. Pengakuan pemerintah Kolonial terhadap kualitas perguruan Muhammadiyah juga

¹⁴⁶ Lihat, 'Moehammadijah Tebing Gerinting', *Pertja Selatan*, No. 8 (18 Juli 1937), hlm 5.

¹⁴⁷ Lihat, "Resepsi Pemboekaan HIS Moehamadijah di Soengai Gerong", *Pertja Selatan*, No. 96 (12 Agustus 1937), hlm.2.

¹⁴⁸ Lihat, "Sekoelah-Sekoelah di Plaju Kebanjiran Moerid", *Pertja Selatan*, No.100(21 Agustus 1937), hlm. 13.

terlihat ketika pada awal April 1938, Nyonya Hoek ter Moelen, Inspectrice Huishoudelijke Scholen (Inspektur Sekolah-sekolah Perawatan Rumah Tangga) Departemen Onderwijs en Eredienst Karesidenan Palembang mengadakan kunjungan ke sekolah Muhammadiyah dan sekolah-sekolah di bawah organisasi Aisyah di kampung 4 Ulu Palembang. Kedatangan Nyonya Hoek yang ditemani oleh para guru dan Ketua Majelis Konsul Muhammadiyah, R.Z. Fananie, di sebuah ruangan yang disediakan H. Anang. Dalam kesempatan itu, Nyonya Hoek yang juga melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dibuat oleh para siswi Sekolah Aisyah memuji kreativitas para siswi dan menganjurkan kepada para guru agar pelajaran ketrampilan, seperti merenda dan menenun tenunan Palembang supaya terus ditingkatkan.¹⁴⁹

F. Elit Lokal Modern Dalam Organisasi Al-Irsyad

Untuk mengetahui awal kehadiran Al-Irsyaddi Palembang, maka sebelumnya mau tidak mau harus membincangkan siapa pertama yang membawa faham baru tersebut.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa Al-Irsyad pertama membuka cabang di Palembang justru di wilayah uluan, yakni di wilayah Ranau pada tahun 1927.¹⁵⁰ Organisasi ini dibawa oleh seorang guru agama bernama H. Ahmad Rivai yang mana ia merupakan alumni dari perguruan Al-Irsyad di Batavia. Setelah menyelesaikan studi di Sekolah Al Irsyad Batavia, ia kemudian kembali ke Ranau. Melalui organisasi Al-Irsyad tersebut, kemudian H. Ahmad Rivai membuka lembaga pendidikan Islam di bawah naungan organisasi tersebut.

¹⁴⁹ Lihat, " Nyonya Hoek ter Moelen Memeriksa Sekoelah Moehammadijah", *Pertja Selatan*, No. 41 (5 April 1938), hlm. 3.

¹⁵⁰Jaroen Peeters. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang, 1821-1942*(Jakarta: INIS, 1998), hlm 222.

Sekolah Al-Irsyad di Ranau ini kemudian diresmikan pada tanggal 31 Juli 1927. Sepertinya pembukaan cabang Al-Irsyad ini bersamaan dengan pembukaan lembaga pendidikan Islam tersebut.

Pembukaan sekolah Al-Irsyad di Ranau tersebut selain dihadiri masyarakat, ternyata dihadiri juga oleh pejabat pemerintah setempat diantaranya adalah demang dan kontrolir dari Muara Dua. Dalam acara tersebut sekretaris Al-Irsyad yang bernama Ali Harharah yang berasal dari Aceh membuka acara tersebut. Dalam orasinya tersebut, Ali Harharah menyampaikan tujuan gerakan Al-Irsyad tersebut antara lain adalah: dakwah Islam, sesuai adat istiadat yang sopan, dan bermazhab Syafi'i.

Keberadaan Al-Irsyad di Ranau ternyata tidak semua kalangan masyarakat yang menaruh simpati terhadap keberadaan organisasi ini. Hal ini di buktikan dari adanya sikap sebagian masyarakat yang menentangnya meski dilakukan secara diam-diam. Sikap penentangan tersebut dilakukan dengan cara mencoret-coret dinding sekolah Al-Irsyad pada malam pembukaan sekolah tersebut dengan kalimat-kalimat: "Ini sekoelah wahabi", "Ini sekolah kaum Mudo".¹⁵¹ Tanda-tanda perlawanan masyarakat terhadap faham baru yang masuk di Ranau yang ditujukan pada para pengurus Al-Irsyad.

Kehadiran gerakan modernisasi Islam yang dilancarkan oleh ulama modernis pada awal abad XX adalah salah satu diantara tonggak sejarah penting di Palembang. Sebab nasionalisme sebagai titil tolak tegaknya kesadaran nasional, tidak dapat diingkari diperkenalkan melalui organisasi sosial dan politik yang berpusat di Jawa dan meliputi seluruh nusantara. Dalam wadah organisasi Sarekat Islam dan Muhammadiyah serta al-Irsyad inilah para anggota dan

¹⁵¹*Ibid*, hlm 223.

simpatisan yang berasal dari Palembang berinteraksi dengan para anggota dan simpatisan yang lain dari daerah lain. Muncul kesadaran nasional serta pentingnya umat Islam melepaskan diri dari kebodohan kemiskinan dan keterbelakangan menuju kemajuan di segala bidang kehidupan.

BAB V

PENUTUP

Dapat di pahami bahwa "*Elit Lokal Modern*" merupakan golongan pribumi Indonesia yang pada dasarnya adalah orang-orang yang menerima perubahan kebudayaan serta pemikiran dari Barat. Perubahan budaya tradisional ke arah budaya modern ini merupakan pengaruh atau konsekwensi dari *invention* dan akulturasi yang dilakukan orang Eropa dengan orang Pribumi. Salah satu tonggak perubahan budaya pribumi Indonesia adalah dikeluarkannya kebijakan politik etis khususnya bidang pendidikan. Sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan pada rakyat pribumi telah membuka wawasan dan peluang pikiran elit tradisional terpengaruh pemikiran Barat.

Pemikiran Barat disini adalah berupa ide-ide kebebasan, memperoleh hak hidup, nasionalisme dan persatuan daerah Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Rousseau yang menjunjung tinggi kebebasan dalam menentukan sesuatu. Selain itu semangat rasionalitas orang Eropa dalam belajar dan berpikir telah mempengaruhi pemikiran para elit modern Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang merdeka.

Ternyata , mereka inilah salah satu yang dapat dimasukkan dalam kategori "*Elite Lokal Modern*" Palembang, karena fakta yang ada menunjukkan bahwa para "*Haji Mukim*" ini memunyai peran sentral dalam mengembangkan Islam di Palembang.

Pada awal abad XX kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia pada umumnya dilanda gerakan reformasi dan modernisasi, sehingga hal ini mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Ada empat factor

yang menurut Karel A. Steenbrink¹⁵² yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kehidupan keagamaan umat Islam, 1) munculnya keinginan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Sunah untuk dijadikan sebagai sumber dan pedoman satu-satunya dalam pengamalan ajaran Islam, 2) munculnya kesadaran nasional dan timbulnya perlawanan yang bersifat nasional terhadap penguasa Belanda, 3) munculnya keinginan dari sejumlah orang Islam untuk memperkuat organisasi ekonomi mereka baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan rakyat banyak, 4) munculnya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan Islam tradisional baik dari segi metode maupun caranya.

Munculnya faktor-faktor pendorong sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari pengaruh adanya gerakan pemurnian (purifikasi) Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1780) di Arab Saudi dan pembaruan (modernisasi) Islam yang dirintis oleh Jamaluddin Al-Afgani (1839-1897) di Mesir, dan Muhammad Abduh (1845-1905).¹⁵³

Pada awal abad XX gerakan reformasi dan modernisasi juga melanda kehidupan keagamaan umat Islam di wilayah Palembang. Pengaruh gagasan pembaharuan tersebut diantaranya dibawa oleh beberapa ulama alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Adapun ulama-ulama yang berfaham Islam modernis-reformis di Palembang tersebut diantaranya adalah tiga ulama yang merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yakni; Abdul Somad bin Abdul Muin, dan Hasan Basri bin Muhammad Amin (Mereka ini berasal dari Muara Enim) serta Akhmad Azhari bin H.

¹⁵² Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 26-28.

¹⁵³ Fachri Ali, *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 63

Abdul Hamid (Ia berasal dari daerah 4 Ulu Kota Palembang).¹⁵⁴ Ketiga ulama ini juga merupakan contoh yang menggambarkan adanya pengaruh yang membawa gagasan pembaharuan dalam Islam. Ketika mereka pulang pada awal April 1937 mereka disambut secara baik oleh masyarakat dimana mereka berasal.

Ulama Palembang lainnya yang mendapat pengaruh gagasan pembaharuan lebih dahulu adalah H. Husein Ma'ruf yang berasal dari Desa Campang Tiga, Ogan Komering Ulu (OKU). Husein Ma'ruf dilahirkan di Desa Campang Tiga pada tahun 1860M.¹⁵⁵ Ia merupakan anak dari H. Khatib Ma'ruf keturunan dari Tuan Syaikh Abdurrahman, ibunya bernama Salamah. Ia belajar dengan ayahnya dan juga dengan H. Syamsudin (alumni Al-Azhar Kairo) selama 4 tahun. Tahun 1890M ia pergi ke Mekkah maupun ke Kairo dan juga belajar disana sampai kepulangannya pada tahun 1899 M. Ia mengajarkan Islam di daerah Campang Tiga terutama masalah menjauhkan diri dari sifat khurafat, syirik, tahayul dan sebagainya. Pada tahun 1913 ia kemudian mendirikan mushola/langgar yang digunakannya sebagai tempat pendidikan non-formal.

Adapun Hasan Basri Muhammad Amin yang berasal dari Muara Enim ini adalah sebagai salah satu contoh ulama guru yang membawa gagasan pembaharuan dalam Islam. Sebagaimana diketahui, sekembalinya dari studi di Perguruan Islam Al-Azhar Kairo Mesir, ia segera didaulat untuk memberikan pidato di depan masyarakat Muara Enim oleh sebuah panitia yang sengaja dibentuk untuk acara penyambutan. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 11 April 1937 dan dihadiri oleh sebagian besar

¹⁵⁴ Lihat, "Tentang Pembijaraan Dengan Student Dari Azhar University", dalam *Pertja Selatan*, No. 42, 8 April 1937.

¹⁵⁵ H. Ayub Munawar, ulama di Desa Cempaka, *wawancara*. 24 Desember 2013

masyarakat Muara Enim. Sebelum berpidato, oleh panitia disebutkan bahwa Hasan Basri merupakan seorang anak yang berasal dari Tungkal yang sebelumnya juga pernah belajar di Sekolah Perhimpunan Kaoem Moeslimin (PKM) di Muara Enim. Adapun yang menjadi salah satu poin penting dalam pidato Hasan Basri tersebut adalah seruannya kepada umat Islam di Muara Enim untuk kembali kepada apa yang disebutnya "Islam Sejati" yakni Islam yang berazaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits agar mendapatkan kemenangan dan keselamatan dunia akhirat.¹⁵⁶

Ulama lainnya yang membawa faham reformis yakni H. Husin Alim bin Umar. Sekembalinya dari Mekkah ia kemudian menetap di Kampung 5 ulu Palembang. Di sana ia kemudian mendirikan Sekolah Samsuel Huda. Sejak tahun 1927 dirumahnya Kampun 5 Ulu dijadikannya ruangan belajar yang menampung anak-anak yang berasal dari Kampun 3,4, dan 5 Ulu Palembang, selain itu juga diselenggarakan kursus bagi orang dewasa untuk menjadi calon da'i.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Lihat, "Lezing dari Ex Student al-Azhar Mesir di rumah Sekolah de Enim Islamijah Muara Enim", *Pertja Selatan*, No. 46, tanggal 17 April 1937. Hlm. 6-7

¹⁵⁷ Lihat Peteers, *Kaum Tuo-Kaum Mudo*, hlm. 157.

DAFTAR PUSTAKA

A. Manuskrip

Silsilah Penguasa Palembang dan Keturunannya (SPPK).

Silsilah Penguasa di Palembang Beserta Keturunan-Keturunannya (SPPBK), Pemilik: R.M Mansyur bin R.H. Abdullah bin R.H Hasan bin Pangeran H. Prabudiradjah Abdullah bin Sultan Mahmud Badaruddin (Narasi Prosa).

B. Buku-Buku

Abdullah, Taufik. 1983, "Pengantar", dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, V-XV. Jakarta: CV. Rajawali.

----- 1987, *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta : LP3ES.

----- . 1990. "Ke Arah Pemikiran Sejarah Nasional di Tingkat Lokal", dalam Taufik Abdullah (ed). *Sejarah Lokal Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 309-323.

Abdullah, Taufik dan Sharon Siddique (peny.). 1988. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta : LP3ES.

Azra, Azyumardi. 2007. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Grup.

Baihaqi, A.K. 1983. "Ulama dan Madrasah Aceh", dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta : Rajawali), hlm. 132.

Behrend, Tim (ed). 1998. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan EFEO.

Bruinessen, Martin van. 1992. *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan.

----- . 1995. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Burger, D.H. 1970. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid II*, Peny & Terj. Prajudi Atmosudirjo. Jakarta: Pradnja Paramita.

Dobbin, Christine. 1992. *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah: Sumatra Tengah 1784-1847*. Jakarta: INIS

Dhofier, Zamakhsyari. 1984. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.

Garraghan, Gilbert S.J., 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.

Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Trans. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI-Press.

Gazalba, Sidi. 1983. *Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka al-Husna.

Geertz, Clifford. 1960. "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker", *Comparative Studies in Society and History*, 2, 2, hlm 228-249.

----- . 1973. *Penjajah dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi dari Dua Kota Indonesia*. Trans. S. Supomo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

----- . 1983. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Trans. Aswab Mahasin. Jakarta : Pustaka Jaya.

Gramsci, Antonio. 2002. *Sejarah dan Budaya*. Trans. Ira Puspitorini. Surabaya: Prometheus.

Hasyim, Umar. 1980. *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi (Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hanafiah, Djohan. 1995. *Melayu-Djawa; Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

----- . 1987. *Kuto Gawang; Pergolakan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang*. Palembang: CV Pariwisata Jasa Utama.

Hisyam, Muhammad . 2001. *Caught Between Three Fires* Muhammad Hisyam, *Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942*. Jakarta: INIS.

- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial*. terj. Umar Basalim dan Andi Mualry Sunrawa. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Iskandar, Muhammad. 2001. *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai Dan Ulama di Jawa Barat , 1900-1950*. Yogyakarta: Matabangsa
- Ismail, Arlan. 2003. *Periodisasi Sejarah Sriwijaya*. Palembang: Unanti Press.
- Ismail, Ibnu Qoyim. 1997. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- K.H.O Gadjah Nata dan Sri-Edi Swasono (eds). 1986. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- , 1992. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848* Jakarta: ANRI.
- Kuntowijoyo. 1985. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset.
- , 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

- , 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- , 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris; Madura, 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- , 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- , 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leur, J.C. van. 1983. *Indonesian Trade and Society*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Lloyd, Christopher. 1993. *The Structure of History*. Oxford: Blackwell.
- , 1987. *Teori Sosial Dan Praktek Politik*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Mansurnoor. Jik Arifin. 1990. *Islam in The Indonesian World: The Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Mastuhu. 1989. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (eds). 1990. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- M. Chatib Quzwain, 1985. *Mengenal Allah; Suatu Studi Mengenai Ajaran Tasawuf Syaikh Abdus Samad al-Palimbani*. Jakarta: Bulan Bintang.

Noer, Deliar. 1982. *Gerakan ModernIslam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta:LP3ES.

Muchtarom, Zaini. 1988.*Santri dan Abangan di Jawa*,Trans. Sukarsi. Jakarta: INIS.

Mulkaan. Abdul Munir. 1994. *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Dalam Islam*. Yogyakarta : Sipress.

Muthahari, Murtadha. 1992. *Masyarakat dan Sejarah*. Trans. M. Hashem. Bandung: Mizan.

Nasution, Harun. 1985. *Gerakan Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Niel, Robert van. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya. (Tran.Niel, Robert van. 1960. *The Emergence of the Modern Indonesia Elite*. Den Haag: W.vanHoeve)

Noer, Deliar. 1982. *Gerakan ModernIslamdi Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

Peeters, Jeroen . 1997. *Kaum Tuo Kaum Mudo; Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Terj. Soetan Maimoen. Jakarta: INIS (Terj. Dari Peeters, Jeroen, 1994. *Kaum Tuo Kaum Mudo; Sociaal-religioeze Verandering in Palembang, 1821-1942*).

Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam; Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Palembang*. Jakarta : Logos.

- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (Transl. from: Ricklefs, M.C. 1981. *A History of Modern Indonesia*. Hampshire: Macmillan).
- Roo de la Faille, P. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta: Bhratara, 1971.
- Setiawan dkk (peny.), 1991. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 17. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Sevenhoven, J.I van, 1971. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Trans. Soegarda Poerwakawatja. Jakarta: Bhratara.
- Suminto, Aqib. 1984. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Suyitno, Amin. 2006. *Studi Ilmu-Ilmu Hadits*. Yogyakarta: Idea Press.
- Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Tim Penyusun. 2006. *Gerakan Sosial: Konsep, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: Averroes.
- Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Winstedt, R. 1969. *A History of Classical Malay Literature*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Woelders, M.O. 1975. *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*. Leiden: Martinus Nijhoff. [VKI 72].

Zamroni, 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.